



**KONDISI SOSIAL-EKONOMI
MASYARAKAT PESISIR DI LOKASI
COREMAP II :
KASUS KABUPATEN SIKKA**



100020

KONDISI SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DI LOKASI COREMAP II : KASUS KABUPATEN SIKKA

**Daliyo
Soewartoyo
YB. Widodo
John Haba**



**COREMAP-LIPI
PUSAT PENELITIAN KEPENDUDUKAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
(PPK-LIPI), 2008**



COREMAP-LIPI

© 2008 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Pusat Penelitian Kependudukan bekerja sama dengan COREMAP*

Katalog dalam Terbitan

Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat di Lokasi COREMAP II: Kasus
Kabupaten Sikka/Daliyo, Soewartoyo, Y.B. Widodo, John Haba. –
Jakarta: LIPI Press, 2008.

xxii + 152 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-283-5

1. Terumbu karang
2. Potensi sosial-ekonomi
3. Sumber daya laut

333.955 3

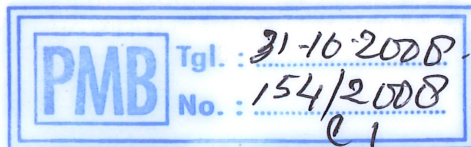
Layout isi : Nova Hendarto
Desain cover/Perwajahan : Puji Hartana

Editor : Daliyo
Penerbit : LIPI Press, anggota Ikapi



LIPI

*Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI
Gedung Widya Graha Lt. X, Jl. Gatot Subroto 10
Jakarta Selatan, 12710
Telp. : (021) 5221687, 5251542 psw. 720
Fax. : (021) 5207205, 5221687
E-mail : ppk-lipi@rad.net.id



KATA PENGANTAR

Kerusakan terumbu karang di Indonesia dewasa ini sudah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah meluncurkan suatu program penyelamatan terumbu karang yang disebut COREMAP (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program*). COREMAP bertujuan untuk menciptakan pengelolaan ekosistem terumbu karang agar sumber daya laut ini dapat direhabilitasi, diproteksi dan dikelola secara berkesinambungan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Dalam pelaksanaan COREMAP diperlukan pemahaman tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut, khususnya terumbu karang, yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum program dilaksanakan. Pemahaman mengenai kondisi masyarakat juga merupakan dasar untuk merancang program dan kegiatan yang sesuai dengan potensi, permasalahan dan aspirasi masyarakat setempat, dan untuk mendapatkan pemahaman tersebut dilakukan baseline studi atas kerjasama COREMAP – LIPI dengan Pusat Penelitian Kependudukan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK – LIPI).

Buku ini merupakan salah satu laporan hasil baseline studi yang berisi data dasar dan kajian tentang kondisi demografi dan sosial – ekonomi masyarakat di lokasi COREMAP, berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut, khususnya terumbu karang. Kajian ini merupakan bahan masukan yang dapat dipakai oleh para perancang, pengelola dan pelaksana COREMAP untuk merancang, melaksanakan dan memantau program tersebut.

Kegiatan penelitian dan penulisan buku ini dapat terlaksana dengan baik berkat bantuan berbagai pihak. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Direktur NPIU CRITC COREMAP II-

LIPI yang telah memberikan kepercayaan pada peneliti PPK – LIPI untuk melakukan baseline studi. Kami juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua narasumber dari berbagai unsur: pemerintah daerah Kabupaten Sikka, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sikka, Unit pelaksana Coremap di Kabupaten Sikka, dan berbagai pihak yang ada di daerah yang telah membantu kelancaran pelaksanaan penelitian serta memberikan data dan informasi. Kepada para informan: masyarakat nelayan, para pemimpin formal dan informal, tokoh masyarakat Desa Kojadoi dan Namangkewa kami ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pewawancara yang telah membantu pelaksanaan survai. Kepada tim teknisi komputer PPK-LIPI yang terdiri dari Puji Hartana S.Sos, Nova Hendarto BSt, Sutarno, BSc dan Suparman yang telah melakukan pengolahan data, mengerjakan *layout* isi buku dan membuat desain cover juga kami ucapkan terima kasih.

Tim peneliti telah berusaha untuk melakukan kajian dan penulisan secara maksimal, tetapi kami menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih belum sempurna dan memerlukan perbaikan-perbaikan. Untuk itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaannya.

Jakarta, Agustus 2008
Kepala Pusat Penelitian Kependudukan
(PPK-LIPI)

Dr. Ir Aswatini, MA.

KATA PENGANTAR

COREMAP fase II yang telah dimulai sejak tahun 2004 dan direncanakan akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2009 bertujuan menciptakan pengelolaan ekosistem terumbu karang agar sumber daya laut ini dapat direhabilitasi, diproteksi dan dikelola secara berkesinambungan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Keberhasilan COREMAP dapat dikaji dari berbagai aspek, diantaranya dari aspek biofisik dan sosial-ekonomi. Dari aspek biofisik diharapkan akan tercapai peningkatan tutupan karang sebesar 5 persen per tahun, sedangkan dari aspek sosial ekonomi diharapkan terjadi peningkatan pendapatan penduduk dan jumlah penduduk yang mempunyai kegiatan ekonomi berbasis sumber daya terumbu karang serta kegiatan alternatif lainnya meningkat sebesar 10 persen pada akhir program.

Keberhasilan COREMAP salah satunya dipengaruhi oleh kesesuaian desain program dengan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, sangat penting pada masa persiapan melakukan perencanaan program yang didukung oleh data dasar aspek sosial-ekonomi berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya terumbu karang. Selain dipergunakan sebagai masukan-masukan dalam merancang program, data dasar aspek sosial-ekonomi terumbu karang ini juga penting untuk melakukan evaluasi keberhasilan program. Untuk mendapatkan data dasar tersebut perlu dilakukan *baseline study* sosial ekonomi yang bertujuan untuk mengumpulkan data tentang kondisi sosial-ekonomi, budaya masyarakat di lokasi COREMAP sebelum program berjalan. Hasil *baseline study* sosial-ekonomi ini dipakai sebagai titik awal (T0) yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum program/intervensi COREMAP dilakukan.

Buku ini merupakan hasil dari *baseline study* sosial-ekonomi yang dilaksanakan di lokasi-lokasi COREMAP di wilayah Indonesia Bagian Timur (lokasi program World Bank). *Baseline study* sosial-

ekonomi dilakukan oleh tim peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI (PPK-LIPI) dan beberapa peneliti sosial dari kedeputian IPSK - LIPI.

Terlaksananya kegiatan penelitian dan penulisan buku ini telah melibatkan berbagai pihak. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI yang telah memberikan dukungan kepada tim peneliti melakukan *baseline study* ini. Kepada para informan, yakni masyarakat nelayan, pemimpin formal dan informal, tokoh masyarakat di lokasi penelitian Kecamatan Maumere dan Kecamatan Kewapante kami ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pewawancara yang telah membantu pelaksanaan survei. Kami juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua narasumber dari berbagai unsur, seperti Bappeda Kabupaten Sikka, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sikka, Unit Pelaksana COREMAP di Kabupaten Sikka yang telah membantu memberikan data dan informasi.

Pada akhirnya, kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna meskipun tim peneliti telah berusaha sebaik mungkin dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini.

Jakarta, Agustus 2008

Direktur NPIU CRITC COREMAP II-LIPI

Prof. DR. Ono Kurnaen Sumadiharga, MSc.

RANGKUMAN

Tujuan penelitian - Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dasar mengenai kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut, khusus terumbu karang. Dalam tujuan lebih spesifik adalah memberikan gambaran umum tentang lokasi COREMAP, kondisi sumber daya manusia, kesejahteraan dan tingkat pendapatan masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Lokasi penelitian - Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sikka. Di kabupaten ini diambil dua lokasi, yaitu di Kawasan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Daratan. Untuk kawasan pulau-pulau kecil dilakukan di Kecamatan Maumere, yakni di Pulau Besar dan Pulau Pemana. Desa yang diteliti adalah *Desa Kojadoi* dan *Kojagete* yang terletak di Pulau Besar dan *Desa Pemana* di Pulau Pemana. Untuk kawasan daratan dilakukan di kecamatan pantai Kecamatan Kewapante. Di kecamatan ini dipilih 2 desa pantai, yaitu *Desa Namangkewa* dan *Watumilok*.

Beberapa temuan - Wilayah Kabupaten Sikka memiliki bentangan terumbu yang cukup luas, yakni tersebar di perairan wilayah selatan dan di perairan wilayah utara (Teluk Maumere). Di wilayah utara sebagian besar bentangan terumbu karangnya telah mengalami kerusakan, terutama selama 10 tahun terakhir. Kerusakan terumbu karang tersebut disebabkan oleh pengaruh bencana alam dan ulah manusia. Bencana alam yang merusak terumbu karang adalah gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada tanggal 12 Desember 1992, sementara kerusakan karena ulah manusia antara lain : penangkapan sumber daya laut yang menggunakan bom dan racun, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (pukat harimau) dan pembabatan hutan.

Sebagian besar penduduk kawasan pulau-pulau kecil dan penduduk pesisir kawasan daratan adalah nelayan, yakni nelayan

tangkap dan nelayan budi daya. Untuk nelayan tangkap, hasil tangkapan selama 10 tahun terakhir sudah dirasakan makin menurun sebagai akibat rusaknya ekosistem terumbu karang. Akibat penurunan hasil tangkapan, sebagian nelayan di kawasan pulau-pulau kecil pada tahun 2000-an banyak sudah beralih usaha dari nelayan tangkap menjadi nelayan budi daya, utamanya usaha budi daya rumput laut. Sebagian yang lain beralih pada usaha non-kenelayanan, seperti ke sektor perdagangan, ke sektor jasa angkutan barang dan penumpang. Beralihnya para nelayan dari nelayan tangkap ke nelayan budi daya rumput laut di kawasan pulau-pulau kecil sebab secara geografis sebagian perairan di daerah tersebut cocok atau potensial untuk usaha budi daya rumput laut. Meskipun sebagian besar penduduk di kawasan pulau-pulau kecil hanya berpendidikan rendah (tamat SD ke ke bawah), namun banyak penduduk nelayan yang telah memiliki ketrampilan budi daya rumput laut. Kemudian kondisi tersebut ditunjang oleh akses transportasi cukup lancar dan pemasaran yang cukup menjanjikan, mengakibatkan budi daya rumput laut semakin berkembang

Di daerah penelitian kawasan daratan jumlah nelayan tangkap masih cukup besar dan sebagian dari para nelayan tersebut ada yang memiliki usaha di luar kenelayanan, seperti sebagai petani tanaman pangan, usaha di sektor bangunan, pengolahan/ industri rumah tangga dsb. Sementara untuk kawasan daratan potensi lahan untuk usaha pertanian pangan dan kebun kelapa masih memungkinkan.

Sebagian besar para penduduk nelayan adalah nelayan tradisional dengan armada sederhana (sampan tanpa motor) yang hasil tangkapannya kecil. Bagi nelayan budi daya untuk pengembangannya masih terbentur masalah permodalan untuk biaya produksi dan bibit, terbatasnya modal yang menyebabkan usaha budi daya rumput laut belum maksimal. Mengenai kesejahteraan rumah tangga - sebagian besar penduduk daerah penelitian telah memiliki rumah sendiri, namun sebagian luas bangunan rumah tinggalnya umumnya tidak begitu luas, sebagian besar rumah tinggal dengan dinding belum permanen. Penerangan rumah sebagian besar belum menggunakan listrik. Di desa penelitian pulau-pulau kecil, seperti

Kojagete meskipun sudah ada listrik, tapi hanya menyala 4 jam setiap hari. Rumah tangga daerah penelitian kebanyakan buang air besar sembarangan, hanya sebagian kecil rumah tangga yang telah menggunakan WC.

Pendapatan per kapita per bulan penduduk sampel di kawasan pulau-pulau kecil baru mencapai sekitar Rp 181.850, sementara di kawasan daratan mencapai sekitar Rp 246.316. Rata-rata pendapatan rumah tangga per bulan dari berbagai sumber pendapatan di daerah penelitian kawasan pulau-pulau kecil adalah sekitar Rp 756.503, sedangkan di kawasan daratan telah mencapai Rp 1.115.437. Rata-rata pendapatan rumah tangga dari kegiatan khusus nelayan tangkap di kawasan pulau-pulau kecil hanya mencapai Rp 494.375, karena kegiatan nelayan tangkap hanya sebagai pekerjaan tambahan saja. Sedangkan rata-rata pendapatan khusus dari usaha budi daya rumput laut ternyata lebih tinggi telah mencapai Rp 726.930. Namun rata-rata pendapatan tersebut masih berada di bawah rata-rata pendapatan rumah tangga dari berbagai sumber pendapatan.

Di kawasan daratan, rata-rata pendapatan rumah tangga dari perikanan tangkap masih cukup baik sebesar Rp 727.424 per bulan. Namun usaha perikanan tangkap tersebut ternyata masih lebih rendah dibandingkan dengan perikanan budi daya biota laut (rumpon) yang telah mencapai Rp 1.079.166. Dengan demikian apabila ingin meningkatkan pendapatan rumah tangga pada masyarakat nelayan nampaknya pengembangan usaha budi daya biota laut (rumpon) perlu dikembangkan dan ditingkatkan.

Pendapatan rumah tangga dari budi daya rumput di daerah penelitian kawasan pulau-pulau kecil belum optimal, karena masalah keterbatasan permodalan untuk biaya produksi. Modal untuk membeli bibit, tali, pelampung, pemberat dan upah tenaga kerja. Rendahnya pendapatan rumah tangga budi daya rumput laut juga karena jumlah lahan yang diusahakan masih terbatas satu dua lokasi saja. Dengan bantuan modal yang cukup, maka akan makin banyak lokasi usaha rumput laut, frekuensi memanen semakin meningkat dan total pendapatan dalam satu tahun atau bulan semakin meningkat. Rumah tangga di daerah penelitian kawasan daratan, meskipun pendapatan

lebih tinggi dari pada di kawasan pulau-pulau kecil namun masih perlu ditingkatkan. Penyebab masih rendahnya para nelayan tangkap di kawasan daratan maupun di kawasan pulau-pulau kecil, karena terbatasnya kemampuan modal, armada yang dimiliki sebagian besar masih tradisional, daerah tangkapannya terbatas hanya dekat pantai dan laut dangkal dan hasil tangkapannya sangat terbatas. Faktor musim juga menjadi kendala tentang frekuensi melaut dalam setiap bulan dan lokasi tangkapan sampai sejauh mana. Untuk membantu peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan tangkap adalah dengan memberikan bantuan modal untuk memiliki armada kapal motor dan alat tangkap untuk perairan laut dalam. Sementara untuk membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga usaha rumput laut, juga perlu permodalan untuk mengusahakan sarana produksi dan upah tenaga kerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
KATA PENGANTAR	iii
RANGKUMAN	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penelitian	4
1.3. Metodologi	5
1.3.1. Pemilihan lokasi	5
1.3.2. Pengumpulan data	6
1.3.3. Analisis data	7
1.4. Organisasi Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI COREMAP KABUPATEN SIKKA	9
2.1. Kondisi Geografis	9
2.1.1. Deskripsi kabupaten	9
2.1.2. Deskripsi umum lokasi COREMAP	14
2.1.3. Gambaran kawasan lokasi penelitian	16
2.2. Kondisi Sumber Daya Alam	21
2.3. Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi	27
2.3.1. Pendidikan	27
2.3.2. Kesehatan	33
2.3.3. Sarana ekonomi	37
2.3.4. Transportasi dan komunikasi	39
2.3.5. Kelembagaan lain yang terkait	41
2.4. Pengelolaan Sumber Daya Laut	43
2.4.1. Kebijakan	43

2.4.2. Pemanfaatan (produksi dan pemasaran)	45
2.4.3. Wilayah tangkap	48
2.4.4. Teknologi	49
2.4.5. Permasalahan dalam pengelolaan SDL	51
BAB III PROFIL SOSIO-DEMOGRAFI PENDUDUK	53
3.1. Jumlah dan Komposisi Penduduk	53
3.1.1. Tingkat kabupaten	53
3.1.2. Tingkat kawasan penelitian	58
3.2. Pendidikan dan Ketrampilan Penduduk	66
3.2.1. Pendidikan penduduk	66
3.2.2. Ketrampilan penduduk	71
3.3. Pekerjaan Penduduk	72
3.3.1. Tingkat kabupaten	72
3.3.2. Tingkat kawasan penelitian	75
3.4. Kesejahteraan Penduduk	81
3.4.1. Pemilikan dan penguasaan aset produksi	81
3.4.2. Kondisi tempat tinggal	93
BAB IV PENDAPATAN PENDUDUK	107
4.1. Pendapatan di Tingkat Kabupaten	107
4.2. Pendapatan Penduduk Tingkat Kawasan Penelitian	110
4.2.1. Kawasan Pulau-Pulau Kecil	110
4.2.2. Kawasan Daratan	125
4.3. Sintesa Pendapatan Penduduk	136
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	139
5.1. Kesimpulan	139
5.2. Rekomendasi	142
DAFTAR PUSTAKA	145
LAMPIRAN	147

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1:	Lokasi Daerah Penelitian di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Tahun 2006	5
Tabel 1.1.2:	Nama dan Jabatan Peneliti di Lapangan, Kabupaten Sikka, Tahun 2006	7
Tabel 2.1.1:	Letak Ketinggian Tempat dan Luas Area di Wilayah Kabupaten Sikka	12
Tabel 2.1.2:	Kemiringan Lereng dan Luas Area di Kabupaten Sikka	12
Tabel 2.1.3:	Tata Guna Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka, 2006	22
Tabel 2.3.1:	Jumlah Sarana Sekolah, Guru, Murid, Rasio Murid/Guru, Rasio Guru / Sekolah dan Murid /Sekolah, Kabupaten Sikka, 2003	28
Tabel 2.3.2:	Distribusi Sekolah Dasar Negeri dan Swasta, Guru, Murid dan Rasio Murid/ Guru di Kabupaten Sikka 2003	30
Tabel 2.3.3:	Distribusi Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta, Guru, Murid dan Rasio Murid/ Guru Menurut Kecamatan di Kabupaten Sikka, Tahun 2003.	31
Tabel 2.3.4:	Distribusi Sekolah Menengah Tingkat Atas, Guru, Murid, Rasio Murid/ Guru Menurut Kecamatan, di Kabupaten Sikka, Tahun 2003	32
Tabel 2.3.5:	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenisnya, Kabupaten Sikka, 2003	34
Tabel 2.3.6:	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan, di Kabupaten Sikka, 2003	35

Tabel 2.3.7:	Jumlah Posyandu Dirinci Per Puskesmas di Kabupaten Sikka, Tahun 2002	35
Tabel 2.3.8:	Distribusi Persentase Jenis Penyakit Di Kabupaten Sikka , Tahun 2002	36
Tabel 2.3.9:	Jumlah Koperasi Unit Desa dan Anggota Koperasi di Kabupaten Sikka, 2003	42
Tabel 2.4.1:	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut Menurut Jenis Biota Laut di Kabupaten Sikka, Tahun 2003 – 2005	46
Tabel 2.4.2:	Jenis Ikan/ SDL, Jumlah Produksi dan Daerah Pemasaran, Kabupaten Sikka, Tahun 2003	47
Tabel 2.4.3:	Jumlah Armada Kapal Nelayan dan Alat Tangkap di Kab. Sikka, 2005	50
Tabel 3.1.1:	Jumlah, Penyebaran dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk , di Kabupaten Sikka.	55
Tabel 3.1.2:	Luas Wilayah, Jumlah dan Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Sikka	56
Tabel 3.1.3:	Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sikka	58
Tabel 3.1.4:	Komposisi Penduduk Sampel Menurut Umur di Kawasan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Daratan, Kabupaten Sikka, 2006	61
Tabel 3.1.5:	Luas Wilayah, Jumlah dan Tingkat Kepadatan Penduduk serta Rata-rata Besarnya Anggota Keluarga Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Maumere, 2003	62
Tabel 3.1.6:	Luas Wilayah, Jumlah dan Tingkat Kepadatan Penduduk serta Rata-rata Besarnya Anggota Keluarga Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kewapante, 2003	65

Tabel 3.2.1:	Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2001-2003 (Persen)	66
Tabel 3.2.2:	Penduduk Berumur 7-24 Menurut Partisipasi Sekolah di Kabupaten Sikka, 2003 (Persen).	67
Tabel 3.2.3:	Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sikka, (2002-2003)	68
Tabel 3.2.4:	Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan, Di Kabupaten Sikka, 2004 (Persen)	70
Tabel 3.2.5:	Penyebaran Persentase Penduduk Buta Huruf Kabupaten Sikka, 2004 (Persen)	71
Tabel 3.3.1:	Distribusi Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Kabupaten Sikka, Tahun 2005	73
Tabel 3.3.2:	Jumlah Usaha penangkapan Ikan, Kabupaten Sikka, Tahun 2006	74
Tabel 3.3.3:	Distribusi Kepala Rumah Tangga Sampel Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Daerah Penelitian Kawasan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Daratan, di Kabupaten Sikka, Tahun 2006, (Persen)	75
Tabel 3.3.4:	Distribusi Penduduk Sampel Menurut Jenis Pekerjaan Utama, di Kawasan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Daratan, Kab. Sikka, Tahun 2006	76
Tabel 3.3.5:	Distribusi Penduduk Sampel Menurut Lapangan Pekerjaan Tambahan, di Kawasan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Daratan, Kab. Sikka, Tahun 2006	77

Tabel 3.3.6:	Distribusi Penduduk Sampel Menurut Jenis Pekerjaan Tambahan, Di Kawasan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Daratan, Kab. Sikka, Tahun 2006	78
Tabel 3.4.1:	Jumlah Armada Penangkapan Ikan di Kabupaten Sikka, Tahun 2001 – 2003	82
Tabel 3.4.2:	Jumlah Armada Penangkapan Ikan di Kawasan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Daratan di Kabupaten Sikka Tahun 2001-2003	83
Tabel 3.4.3:	Jenis Alat Tangkap di Kawasan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Daratan di Kabupaten Sikka, Tahun 2001-2003	84
Tabel 3.4.4:	Jumlah Alat Tangkap Ikan di Kabupaten Sikka, Tahun 2003	85
Tabel 3.4.5:	Jenis Armada Penangkapan Ikan di Kawasan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Daratan, di Kabupaten Sikka, Tahun 2006	86
Tabel 3.4.6:	Jenis Alat Tangkap di Kawasan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Daratan, di Kabupaten Sikka, Tahun 2006	87
Tabel 3.4.7:	Potensi Lahan Budi daya Sumberdaya Laut dan Pemanfaatannya di Kabupaten Sikka, Tahun 2001 – 2003	88
Tabel 3.4.8:	Distribusi Kepala Rumah Tangga Menurut Status Tempat Tinggal , Kab. Sikka	95
Tabel 3.4.9:	Distribusi Rumah Tangga Dan Menurut Luas Lantai Tempat Tinggal (Persen)	96
Tabel 3.4.10:	Distribusi Rumah Tangga Menurut Pemilikan Lahan (Persen)	97

Tabel 3.4.11: Distribusi Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Yang Digunakan, Kabupaten Sikka (Persen)	98
Tabel 3.4.12: Distribusi Rumah Tangga Menurut Luas lantai Tempat Tinggal, Kabupaten Sikka. (Persen)	100
Tabel 3.4.13: Distribusi Rumah Tangga Menurut Jenis lantai Rumah Tinggal, Kabupaten Sikka (Persen).	101
Tabel 3.4.14: Distribusi Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Rumah Tinggal Keluarga (Persen)	102
Tabel 3.4.15: Distribusi Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Sikka (Persen)	103
Tabel 3.4.16: Distribusi Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Sarana MCK di Kabupaten Sikka (Persen)	104
Tabel 3.4.17: Distribusi Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Air Besar di Kojadoi dan Pemanan, 2006	105
Tabel 4.1.1: Distribusi/Persentase PDRB Kabupaten Sikka Atas Dasar Harga Yang Berlaku Tahun 2005 (jutaan rupiah)	108
Tabel 4.1.2: Profil Rumah Tangga/Keluarga Kabupaten Sikka Berdasar Indikator Kemiskinan Menurut Kecamatan, Tahun 2004	109
Tabel 4.2.1: Statistik Pendapatan, Kawasan Pulau-Pulau Kecil, Kabupaten Sikka, 2006 (Rupiah)	111
Tabel 4.2.2: Distribusi Rumah Tangga Terpilih Menurut Kelompok/Kategori Pendapatan, Kawasan Pulau-Pulau Kecil, Kabupaten Sikka,2006 (Persen)	113

Tabel 4.2.3:	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga, Sampel Kawasan Pulau-Pulau Kecil, Kabupaten Sikka, 2006	118
Tabel 4.2.4:	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Terpilih Menurut Jenis Pekerjaan Kepala Rumah Tangga, Sampel Kawasan Pulau-Pulau Kecil, Kabupaten Sikka, 2006	120
Tabel 4.2.5:	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim, Sampel Kawasan Pulau-Pulau Kecil, Kabupaten Sikka, 2006 (Rupiah)	123
Tabel 4.2.6:	Distribusi Rumah Tangga Sampel Menurut Kelompok Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan dan Musim, di Kawasan Pulau-Pulau Kecil, Kabupaten Sikka, 2006 (Persen)	124
Tabel 4.2.6a:	Distribusi Rumah Tangga Sampel Menurut Kelompok Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan dan Musim, di Kawasan Pulau-Pulau Kecil, Kabupaten Sikka, 2006 (Persen)	125
Tabel 4.2.7 :	Statistik Pendapatan Penduduk dan Rumah Tangga Sampel, di Kawasan Daratan, Kabupaten Sikka, 2006 (Rupiah)	126
Tabel 4.2.8:	Distribusi Rumah Tangga Terpilih Menurut Kelompok/Kategori Pendapatan, Sampel Kawasan Daratan, Kabupaten Sikka, 2006 (Persen)	127
Tabel 4.2.9:	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Menurut Lapangan Pekerjaan Kepala Rumah Tangga, Sampel Kawasan Daratan, Kabupaten Sikka, 2006	130

Tabel 4.2.10: Statistik Pendapatan Rumah Tangga Sampel Menurut Jenis Pekerjaan Kepala Rumah Tangga, di Kawasan Daratan, Kabupaten Sikka, 2006	131
Tabel 4.2.11: Statistik Pendapatan Rumah Tangga Sampel Dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim, di Kawasan Daratan, Kabupaten Sikka, 2006 (Rupiah)	132
Tabel 4.2.12: Distribusi Rumah Tangga Sampel Menurut Kelompok Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan dan Musim, Sampel Kawasan Daratan, Kabupaten Sikka, 2006 (Persen) VERSI I	134
Tabel 4.2.12a: Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan dan Musim, Sampel Kawasan Daratan, Kabupaten Sikka, 2006 (Persen) VERSI II	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Peta Administrasi Kabupaten Sikka	10
Gambar 2	: Peta Lokasi Ekosistem Terumbu Karang di Kabupaten Sikka	15
Gambar 3	: Peta Lokasi Penelitian Wilayah Kecamatan Maumere, Kab. Sikka.	17
Gambar 4	: Peta Lokasi Penelitian Wilayah Kecamatan Kewapante, Kab. Sikka	19
Gambar 5	: Pemukiman Nelayan Desa Kojadoi, Kecamatan Maumere	57
Gambar 6	: Distribusi Penduduk Menurut Umur di Kabupaten Sikka, 2003	59
Gambar 7	: Distribusi Penduduk Menurut Umur di Daerah Penelitian Kawasan Pulau-Pulau Kecil, Kecamatan Maumere, Tahun 2006	60
Gambar 8	: Distribusi Penduduk Menurut Umur di Daerah Penelitian Kawasan Daratan, Kecamatan Maumere, Tahun 2006	64
Gambar 9	: Penjemuran hasil rumput laut di Desa Kojadoi, Kec. Maumere	89
Gambar 10	: Partisipasi ibu-ibu menyiapkan sarana budi daya rumput laut di Desa Kojadoi, Kec. Maumere, 2006	91
Gambar 11	: Anak-anak memasang pelampung untuk tanaman rumput laut di Desa Kojadoi, Kecamatan Maumere	92

Gambar 4.1.: Diagram Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan Kawasan Pulau-Pulau Kecil, Kabupaten Sikka, tahun 2006	112
Gambar 4.2.: Diagram Rata-Rata Pendapatan Rumah Tangga/bulan Menurut Lapangan Pekerjaan, Di Kawasan Pulau-Pulau Kecil, 2006	115
Gambar 4.3.: Diagram Rata-Rata Pendapatan Rumah Tangga/bulan Kenelayanan Menurut Musim, 20006	121
Gambar 4.4.: Diagram Rata-Rata Pendapatan Rumah Tangga/bulan Menurut Lapangan Pekerjaan, Di Kawasan Pulau-Pulau Kecil, 2006	129

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam dasawarsa terakhir kondisi terumbu karang di Indonesia telah mengalami penurunan pada tingkat yang mengkhawatirkan karena oleh berbagai hal, baik oleh karena bencana alam maupun oleh ulah manusia. Studi yang dilakukan LIPI (2006) di 686 stasiun penelitian menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang di Indonesia hanya 5,8 persen dalam kondisi sangat baik, sekitar 25,7 persen dalam status baik, sekitar 30,8 persen dalam status cukup dan ternyata telah mencapai sekitar 31,9 persen yang sudah dalam kondisi kurang baik. Khusus terumbu karang di wilayah Indonesia timur kondisinya berbeda. Kondisi terumbu karang di wilayah tersebut memperlihatkan ada sekitar 6,1 persen dalam kondisi sangat baik, sekitar 21 persen dalam kondisi baik, 30,8 persen kondisi cukup dan terumbu karang yang kondisinya kurang baik ternyata persentasenya jauh di atas baik rata-rata nasional, di wilayah Indonesia barat (36,3 persen) maupun wilayah Indonesia tengah (16,3 persen). Persentase terumbu karang yang kurang baik atau rusak di wilayah Indonesia timur tersebut telah mencapai 42,0 persen (Suharsono, 2005).

Rusaknya terumbu karang di wilayah-wilayah tersebut disebabkan oleh ulah manusia, yang antara lain adanya penangkapan ikan dan biota terumbu karang lain secara terus-menerus dan dalam kuantitas yang berlebihan (*over fishing*). Di samping itu, penggunaan bom dan racun untuk menangkap sumber daya di terumbu karang. Kerusakan ekosistem terumbu karang juga disebabkan pembangunan di daerah pesisir, penebangan hutan bakau, penebangan hutan di sepanjang sungai yang menyebabkan terjadinya endapan sedimentasi

di daerah terumbu karang dan mematikan terumbu karang (Widayatun dkk, 2002 dan Hidayati dkk, 2002).

Untuk mengatasi masalah kerusakan terumbu karang tersebut pada awal tahun 2000-an pemerintah Indonesia telah mencanangkan suatu program pengelolaan yang dinamakan COREMAP (*Coral Reef Rehabilitation and Managemet Program*). Program pada fase I tersebut bermaksud untuk menggerakkan dan meningkatkan usaha pengelolaan serta rehabilitasi terumbu karang agar sumber daya laut dapat dimanfaatkan secara lestari bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir Indonesia. Program COREMAP pada prinsipnya mendasarkan pada partisipasi masyarakat atau dapat dikatakan '*pengelolaan berbasis masyarakat*'. Pengelolaan tersebut menggunakan sistem terpadu yang perencanaannya dilaksanakan dengan pendekatan dari bawah berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat sendiri. Kemudian tujuan COREMAP pada fase II lebih menekankan pada terciptanya pengelolaan ekosistem terumbu karang secara berkelanjutan agar sumber daya laut dapat direhabilitasi, diproteksi dan dikelola. Dalam hal ini gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Dalam pelaksanaan pengelolaan ekosistem terumbu karang telah didesentralisasi kepada pemerintah kabupaten dengan sistem pendanaan yang berkelanjutan, namun tetap dikoordinir secara nasional. Desentralisasi pengelolaan ini dilakukan untuk mendukung dan memberdayakan masyarakat pantai, melakukan *co-manajemen* secara berkelanjutan agar kerusakan terumbu karang dapat dicegah dan dampak positif selanjutnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat tercapainya tujuan COREMAP antara lain adalah melihat aspek biofisik dan sosial-ekonomi. Dari aspek biofisik diharapkan tercapai peningkatan tutupan karang paling sedikit 5 persen per tahun sampai tercapai taraf yang sama dengan daerah yang telah dikelola secara baik atau *pristine area* (daerah terumbu karang yang masih asli/ belum dimanfaatkan). Selanjutnya indikator keberhasilan COREMAP dari aspek sosial-

ekonomi adalah : (1) adanya pendapatan penduduk dan jumlah penduduk yang menerima pendapatan dari kegiatan ekonomi yang berbasis terumbu karang dan kegiatan ekonomi alternatif lainnya, mengalami kenaikan sebesar 10 persen pada akhir program (tahun 2009); dan (2) paling sedikit 70 persen dari masyarakat nelayan (*beneficiary*) di kabupaten program merasakan dampak positif COREMAP. Dalam hal ini dampak pada tingkat kesejahteraannya dan status sosial ekonominya (World Bank, Project Appraisal Document, 2004).

Kabupaten Sikka merupakan salah satu daerah COREMAP di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi daerah penelitian. Bentangan seluruh terumbu karang di Kabupaten Sikka mencapai sekitar 14.500,4 hektar. Dari seluruh bentangan tersebut ada sekitar 60 persen terumbu karang masih dalam kondisi baik. Hanya sebagian besar dari bentangan tersebut terletak di kawasan pesisir selatan wilayah Kabupaten Sikka. Menurut informasi bentangan terumbu karang yang paling banyak mengalami kerusakan terletak di kawasan utara atau di Teluk Maumere. Terumbu karang di kawasan utara ini diperkirakan hanya sekitar 10 persen yang masih dianggap baik. Sekitar 90 persen ternyata telah dinyatakan mengalami kerusakan (PMU-COREMAP Kab. Sikka, 2005). Oleh karena itu, lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dasar sosial, ekonomi dan kependudukan di Kabupaten Sikka ini perlu dilakukan di kawasan utara.

Keberhasilan COREMAP salah satunya dipengaruhi oleh kesesuaian desain program dengan permasalahan, potensi dan aspirasi masyarakat. Untuk merancang program yang sesuai dengan permasalahan dan potensi daerah serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat diperlukan data dasar sosial-ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan terumbu karang. Di samping dapat digunakan sebagai masukan dalam merancang program, data dasar aspek sosial - ekonomi terumbu karang juga penting untuk melakukan evaluasi keberhasilan program. Data dasar sosial-ekonomi dari hasil *baseline* ini merupakan titik awal (T0) yang menggambarkan kondisi sosial

ekonomi masyarakat sebelum program/ intervensi COREMAP dilakukan.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian adalah untuk mengumpulkan data dasar mengenai kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut, khusus terumbu karang. Adapun tujuan khusus penelitian adalah :

1. Memberikan gambaran umum tentang lokasi COREMAP yang meliputi kondisi geografi, sarana dan prasarana, potensi sumber daya alam, khususnya sumber daya laut dan pola pemanfaatannya.
2. Menggambarkan kondisi sumber daya manusia dilihat dari aspek pendidikan dan kegiatan ekonominya, khususnya kegiatan ekonomi yang berbasis terumbu karang.
3. Memotret tingkat kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan antara lain : pemilikan aset rumah tangga (produksi dan non produksi) dan kondisi perumahan dan sanitasi lingkungan.
4. Mendeskripsikan tingkat pendapatan masyarakat, khususnya pendapatan dari kegiatan ekonomi yang berbasis terumbu karang.
5. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat.

Sasaran

1. Tersedianya data dasar tentang aspek sosial-ekonomi terumbu karang, yang dapat dipakai oleh para perencana, pengelola dan pelaksana untuk merancang, melaksanakan dan memantau program COREMAP.

2. Tersedianya data pendapatan dan jumlah penduduk yang menerima pendapatan dari kegiatan ekonomi berbasis terumbu karang dan kegiatan alternatif lainnya pada awal program (TO) yang dapat dipakai untuk memantau dampak COREMAP terhadap kesejahteraan penduduk.

1.3. Metodologi

1.3.1. Pemilihan lokasi

Penelitian di Kabupaten Sikka ini dilakukan di dua lokasi, yaitu di Masyarakat Kawasan Pulau-Pulau Kecil dan Masyarakat Kawasan Daratan. Untuk kawasan pulau-pulau kecil dilakukan di Kecamatan Maumere, yakni di Pulau Besar dan Pulau Pemana. Desa yang diteliti adalah *Desa Kojadoi* dan *Kojagete* yang terletak di Pulau Besar dan *Desa Pemana* di Pulau Pemana. Untuk kawasan daratan dilakukan di kecamatan pantai Kecamatan Kewapante. Di kecamatan ini dipilih 2 desa pantai, yaitu *Desa Namangkewa* dan *Watumilok*. Untuk kegiatan survei dalam penelitian ini dilakukan di desa yang banyak rumah tangganya menggantungkan hidup dari pemanfaatan sumber daya laut. Di kawasan pulau-pulau kecil dari 3 desa yang diteliti untuk kegiatan survei (pengumpulan data dengan kuesioner) hanya dilakukan di *Desa Kojadoi*, sebab di desa tersebut yang paling banyak proporsi penduduknya memanfaatkan sumber daya laut. Di kawasan daratan kegiatan survei dilakukan di dua desa, yaitu *Namangkewa* dan *Watumilok*.

Tabel 1.1.1 :
Lokasi Daerah Penelitian di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Tahun 2006

Daerah Penelitian	Kecamatan	Desa
(1)	(2)	(3)
Kawasan Pulau-Pulau Kecil	Maumere	1. Kojadoi 2. Kojagete 3. Pemana
Kawasan Daratan (Pulau Flores)	Kewapante	1. Namangkewa 2. Watumilok

1.3.2. Pengumpulan data

Ada dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yakni data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif dikumpulkan melalui survei. Sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data, yakni wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD – *Focus Group Discussion*), observasi lapangan dan dokumentasi foto.

Survei dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan/kuesioner untuk mewawancarai responden. Responden adalah kepala rumah tangga dan apabila kepala rumah tangga berhalangan dapat digantikan anggota rumah tangga yang dapat mewakilinya. Jumlah responden yang dipilih di masing-masing lokasi/ kecamatan sebanyak 100 kepala rumah tangga. Karena penelitian dilakukan di desa pantai dan kepulauan, diperkirakan masing-masing lokasi tersebut penduduknya cukup homogen. Oleh karena itu, pemilihan responden dilakukan secara acak atau random. Wawancara dengan responden dilakukan untuk mengumpulkan data sosial, ekonomi dan demografi dalam rumah tangga, kegiatan dan pendapatan dari berbagai sumber. Sumber tersebut meliputi dari kegiatan penangkapan ikan di laut menurut musim, usaha budi daya di laut, usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha pengolahan dan usaha jasa.

Dalam pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, wawancara dilakukan terhadap beberapa informan, seperti tokoh masyarakat, nelayan, pedagang, pengumpul hasil laut, para pejabat Dinas Perikanan Kelautan dan Bappeda. Diskusi kelompok terfokus dilakukan terhadap para nelayan untuk mendapatkan informasi umum tentang kegiatan mereka, pemanfaatan, pengelolaan sumber daya laut dan persepsi mereka tentang sumber daya laut. Observasi lapangan dilakukan untuk membuktikan kegiatan dan kondisi kehidupan para nelayan dan anggota rumah tangganya, perumahan dan lingkungan sanitasinya. Dalam observasi tersebut juga didokumentasikan dalam bentuk foto-foto.

1.3.3. Analisis data

Analisis yang digunakan dalam tulisan ini adalah *description analysis* dan *content analysis*. Data yang dikumpulkan dengan daftar pertanyaan/ kuesioner dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan tabulasi frekuensi untuk melihat persebaran kategori atau variasi jawaban. Juga tabulasi silang untuk melihat hubungan antar variabel yang diteliti. Kemudian data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus dianalisis dengan teknik *content analysis*. Dari berbagai informasi yang dikumpulkan dari berbagai informan dideskripsikan sesuai dengan isu-isu yang ada. Informasi tersebut juga untuk menjelaskan atau memberikan temuan-temuan yang dianggap cukup penting.

1.4. Organisasi Penulisan

Buku ini dibagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan tentang apa yang melatarbelakangi penelitian ini perlu dilakukan, tujuan dilakukannya penelitian dan metodologi yang digunakan untuk pengumpulan data. Dalam metodologi memuat tentang pemilihan lokasi, pengumpulan data dan analisis data. Bagian kedua, menyajikan tentang gambaran umum lokasi dari tingkat kabupaten sampai tingkat daerah sampel penelitian yang meliputi kondisi geografis, kondisi sumber daya alam, sarana dan prasarana sosial ekonomi dan pengelolaan sumber daya laut. Bagian ketiga membahas tentang profil sosio-demografi penduduk pada tingkat Kabupaten Sikka dan tingkat kawasan/daerah sampel penelitian. Dalam bahasan bagian ketiga ini meliputi jumlah dan komposisi penduduk, tingkat pendidikan penduduk, pekerjaan penduduk dan kesejahteraan penduduk. Dalam pembahasan pekerjaan penduduk juga menfokuskan pada kegiatan yang berbasis terumbu karang dan alternatif kegiatan lainnya.

Bagian keempat, sebagai inti tulisan ini adalah membahas tentang pendapatan penduduk yang berisi tentang pendapatan penduduk tingkat kabupaten dan pendapatan tingkat kawasan/ daerah

sampel penelitian. Dalam pendapatan tingkat kabupaten adalah gambaran tentang PDRB daerah dan pendapatan penduduk di sektor pertanian khususnya perikanan. Pendapatan di tingkat kawasan meliputi pendapatan per kapita dan pendapatan rumah tangga, pendapatan menurut lapangan pekerjaan dan pendapatan nelayan per musim. Kemudian bagian akhir bagian ini membuat suatu sintesa tentang pendapatan tersebut. Sebagai penutup dari tulisan ini adalah kesimpulan dan beberapa rekomendasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI COREMAP KABUPATEN SIKKA

Bagian ini mendeskripsikan tentang gambaran umum lokasi daerah penelitian, antara lain tentang kondisi geografis, kondisi sumber daya alam, sarana dan prasarana sosial-ekonomi dan pengelolaan sumber daya laut. Dalam deskripsi geografis menyajikan kondisi pada tingkat makro kabupaten, lokasi COREMAP dan kawasan lokasi penelitian. Kondisi sumber daya alam menyajikan baik potensi wilayah laut dan pesisir maupun potensi wilayah daratan. Sementara deskripsi sarana dan prasarana sosial-ekonomi meliputi sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi dan komunikasi serta kelembagaan yang ada. Bagian ini ditutup dengan gambaran tentang pengelolaan sumber daya laut yang menguraikan tentang kebijakan, pemanfaatan sumber daya laut, wilayah tangkap, teknologi yang dimiliki dan dikuasai serta permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya laut.

2.1. Kondisi Geografis

2.1.1. Deskripsi kabupaten

Luas Kabupaten Sikka meliputi wilayah sekitar 7.436 km². Wilayah tersebut terdiri dari areal daratan di Pulau Flores sekitar 1.614,8 km² (21,7 persen) dan wilayah daratan kepulauan (di 17 buah pulau) 117,1 km² (1,6 persen) dan wilayah laut/ perairan sekitar 5.704,2 km² (76,7 persen) dengan garis pantai sepanjang 379,3 kilometer (Profil Kabupaten Sikka, 2005). Jadi sebagian besar luas wilayah Kabupaten Sikka merupakan wilayah laut. Ini berarti potensi atau sumber daya laut di kabupaten ini perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan penduduknya. Oleh

karena itu, transportasi laut dan sektor perikanan laut pantas untuk menjadi sektor perekonomian yang diunggulkan di samping sektor-sektor lainnya. Di samping sektor perikanan laut, letak kondisi geografis kabupaten ini juga cukup strategis. Kabupaten ini terletak di Teluk Flores/ Teluk Maumere yang memungkinkan telah memiliki pelabuhan alam yang cukup aman. Letaknya yang cukup sentral di antara wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia timur, telah menjadi tempat persinggahan kapal-kapal penumpang (reguler) maupun kapal barang yang mengarungi wilayah dari Jawa/ Indonesia barat dan tengah ke wilayah Indonesia timur atau sebaliknya. Juga sebagai persinggahan kapal-kapal dari wilayah utara (Kalimantan dan Sulawesi dari Makasar dan Buton) ke wilayah selatan.

Luas daratan Kabupaten Sikka dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya sebesar 3,7 persen dari luas wilayah NTT sebesar 47.349,91 km². Provinsi ini merupakan kepulauan yang sebagian besar wilayahnya perairan. Kabupaten Sikka merupakan salah satu bagian dari pulau besar di provinsi ini, Pulau Flores, kepulauan dan perairannya.

Gambar 1 :
Peta Administrasi Kabupaten Sikka



Kondisi topografi

Kondisi topografi wilayah daratan sebagian besar merupakan perbukitan. Dari kemiringan yang agak landai sampai kemiringan yang cukup terjal, sebagian besar wilayah (82,8 persen) merupakan wilayah yang kemiringannya cukup terjal (di atas 15 derajat). Dengan kemiringan terjal tersebut mengakibatkan lahan tersebut secara geografis tidak bisa ditanami tanaman pangan tanpa melalui sistem *sengkedan (terrace)* yang benar (Tabel 2.1.2). Tabel 2.1.1 menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen wilayah di Kabupaten Sikka berada pada ketinggian di atas 100 meter dari permukaan laut dan sekitar 40 persen di atas 500 meter dari permukaan laut. Wilayah yang landai dan merupakan dataran rendah hanya sebagian kecil dan kebanyakan terletak di wilayah pantai. Di lokasi-lokasi tersebut yang umumnya digunakan untuk pemukiman penduduk dan dijadikan lahan tanaman pangan. Di wilayah perbukitan sebagian ditanami tanaman keras/ perkebunan dan sebagian yang lain telah gundul.

Topografi di daratan kepulauan tidak jauh berbeda kondisinya dengan wilayah pulau besar. Sebagian besar juga merupakan wilayah perbukitan dengan kemiringan yang cukup curam. Hanya sebagian kecil lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pemukiman. Kasus di Desa Pemana (Pulau Pemana) dengan sempitnya wilayah dataran, perumahan penduduk di pulau tersebut cukup rapat. Menurut para informan lantaran sempitnya lahan untuk pemukiman sering terjadi konflik perebutan lahan pekarangan di antara anggota masyarakat. Bahkan sering terjadi konflik antar anggota keluarga sendiri karena masalah warisan tanah. Kasus di Desa Kojadoi karena sempitnya lahan untuk permukiman, sebagian penduduk terpaksa harus menimbun pantai dan laut dangkal di sekitar pemukiman untuk mendirikan rumah tinggal yang baru. Sayangnya bahan batuan untuk penimbunannya menggunakan batu karang, meskipun menurut pengakuan penduduk hanya menggunakan batu karang yang sudah mati. Juga jalan-jalan penghubung antar dusun juga masih menggunakan batu karang. Penggunaan batu karang untuk membuat pemukiman, badan jalan, bangunan desa dan bangunan rumah juga

masih biasa dilakukan di desa-desa kepulauan, seperti Pemanan, Kojadoi dan Kojagete. Pembangunan yang memanfaatkan batu karang tersebut yang berkontribusi merusak dan mengurangi batu karang di laut yang akibatnya mengganggu ekosistem lingkungan terumbu karang.

Tabel 2.1.1 :
Letak Ketinggian Tempat dan Luas Area di Wilayah Kabupaten Sikka

No	Ketinggian (M dpl)	Luas Wilayah (Ha)	
		Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0 < 7	11.803	6,8
2	7 < 25	18.060	10,4
3	25 < 100	20.843	12,0
4	100 < 500	48.169	27,9
5	500 < 1.000	70.216	40,5
6	> 1.000	4.100	2,4
Jumlah		173.191	100,0

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Sikka Tahun 2004, dikutip dari Profil Perekonomian Daerah Kab.Sikka oleh Bappeda Kab. Sikka, 2004

Tabel 2.1.2 :
Kemiringan Lereng dan Luas Area di Kabupaten Sikka

No	Kemiringan (Derajat)	Luas Wilayah (Ha)	
		Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0 – 2	9 295,84	5,4
2	2 – 15	20 039,76	11,7
3	15 – 40	58 592,91	34,2
4	40 lebih	83 192,49	48,6
Jumlah		173.191	100,0

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Sikka Tahun 2004, dikutip dari Profil Perekonomian Daerah Kab.Sikka oleh Bappeda Kab. Sikka, 2004

Kondisi iklim

Wilayah Kabupaten Sikka secara astronomis terletak antara 8° 22' Lintang Selatan - 8° 50' Lintang Selatan dan antara 121° 55' Bujur Timur - 122° 41' Bujur Timur. Dengan demikian wilayah kabupaten ini masih termasuk dalam iklim tropis. Suhu udara adalah berkisar antara 27°C - 29°C. Pada musim kemarau suhu maksimum mencapai sebesar 29,7°C dan pada musim penghujan suhu minimum 23,8°C. Rata-rata suhu udara tiap tahun adalah berkisar 27,2°C.

Kelembaban udara rata-rata 85,5 persen per tahun dan kelembaban nisbi antara 74 persen - 86 persen. Rata-rata kecepatan angin pada musim kemarau adalah 12 - 13 knots dan pada musim penghujan antara 17 - 20 knots. Kondisi angin ini berpengaruh terhadap besarnya gelombang laut dan musim kegiatan para nelayan untuk melaut.

Musim kemarau berlangsung antara 7 - 8 bulan, yakni pada April/ Mei sampai dengan Oktober/ Nopember. Pada bulan-bulan ini gelombang laut umumnya tenang atau dapat disebut musim gelombang tenang/ lemah dan musim peralihan (*pancaroba*). Pada bulan-bulan tersebut para nelayan biasanya melaut, meskipun kadang-kadang muncul gelombang besar. Seperti kasus pada minggu pertama bulan Juli 2006, ketika itu di perairan Flores mendadak terjadi gelombang besar telah menenggelamkan kapal kayu nelayan dan menewaskan 3 orang awak kapalnya dan yang selamat hanya nakodanya yang terdampar di dekat Pulau Babi (*Kupang Pos, Selasa, 8 Juli 2006*). Sedangkan musim penghujan hanya berlangsung sekitar 4 bulan, yaitu antara bulan Nopember/Desember sampai dengan bulan Maret / April. Pada bulan-bulan tersebut biasanya gelombang laut besar/ kuat dan para nelayan sama sekali tidak berani melaut. Oleh karena itu, jumlah curah hujan per tahun di wilayah ini hanya berkisar antara 60 sampai dengan 120 hari. Akibatnya jumlah curah hujan per tahun tidak tinggi hanya mencapai antara 1.000 mm sampai 1.500 mm. Kondisi curah hujan ini jelas berpengaruh terhadap lamanya masa usaha cocok tanam yang terbatas dan sebagian kondisi vegetasi di daerah ini yang tidak dapat menghijau sepanjang tahun.

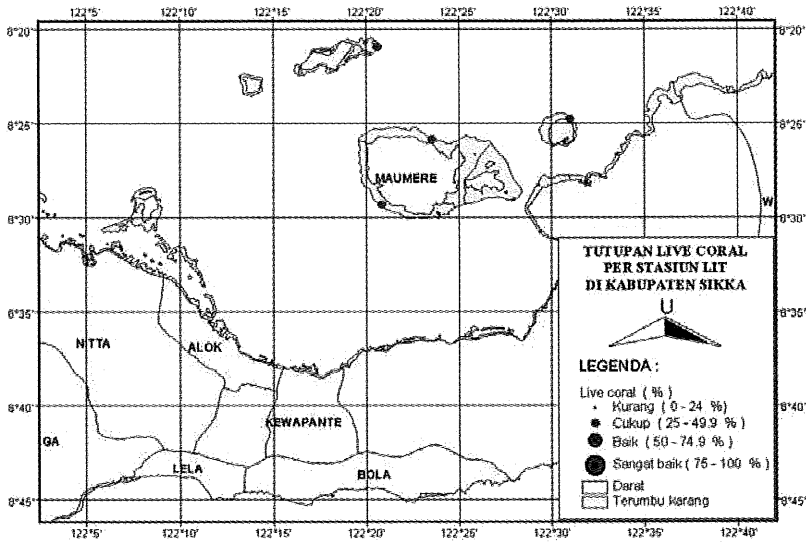
Wilayah Administrasi

Secara administratif wilayah Kabupaten Sikka terbagi menjadi 11 kecamatan. Dari 11 kecamatan terbagi menjadi 160 desa / kelurahan, tepatnya 147 desa dan 13 kelurahan. Dari 11 kecamatan tersebut telah dipilih 2 kecamatan sebagai daerah penelitian, yaitu Kecamatan Maumere dan Kecamatan Kewapante.

2.1.2. Deskripsi umum lokasi COREMAP

Berdasarkan pantauan satelit melalui *Geographical Information System* (GIS) wilayah perairan Kabupaten Sikka memiliki terumbu karang seluas 105,25 km². Bagaimana kondisi terumbu karang di perairan tersebut? Menurut hasil RRA yang dilakukan terhadap 41 site di 20 desa/kelurahan lokasi Program COREMAP II di Kabupaten Sikka (Wolowiro, Paga, Korobhera, Lela, Watutedang, Ipir, Lewomada, Nangahale, Hoder, Nawangkewa, Wolomarang, Hewuli, Wuring, Kolosia, Rereraja, Reruwairere, Maluriwu, Perumaan, Kojadoi dan Kojagete) menunjukkan bahwa secara umum hanya terdapat 28,6 persen tutupan karang hidup (PMU-COREMAP Kab. Sikka, 2005). Karang tersebut terdiri dari 17,1 persen tutupan karang keras dan 11,5 persen tutupan karang lunak. Jadi kerusakan terumbu karang di kawasan tersebut sudah cukup besar, sebab sebagian besar terumbu karang yang lain sudah mengalami kerusakan.

Gambar 2 :
Peta Lokasi Tutupan Karang Hidup di Kabupaten Sikka



Adapun yang menyebabkan terjadinya kerusakan terumbu karang di perairan Kabupaten Sikka tidak jauh berbeda dengan penyebab kerusakan terumbu karang di daerah-daerah lain. Kebanyakan kerusakan terumbu karang di perairan ini disebabkan ulah manusia. Ulah tersebut adalah menangkap ikan dengan menggunakan bom, penggunaan sianida/ potas dan bahan-bahan kimia lainnya. Penyebab lain yang berbeda dengan perairan di daerah lain adalah kerusakan terumbu karang karena bencana alam. Bencana gempa bumi dan tsunami serta El Nino yang terjadi pada tahun 1992 telah berkontribusi terhadap kerusakan terumbu karang di kawasan ini. Dari berbagai sumber informasi termasuk masyarakat nelayan mengatakan bahwa setelah gempa bumi dan tsunami tahun 1992, banyak terumbu karang yang rusak dan diikuti makin menurunnya jumlah hasil tangkapan ikan para nelayan. Rusaknya terumbu karang

dan hasil tangkapan yang makin menurun tersebut antara lain yang mendorong para nelayan terutama di Desa Kojadoi beralih usaha dari nelayan tangkap menjadi nelayan budi daya *rumput laut*

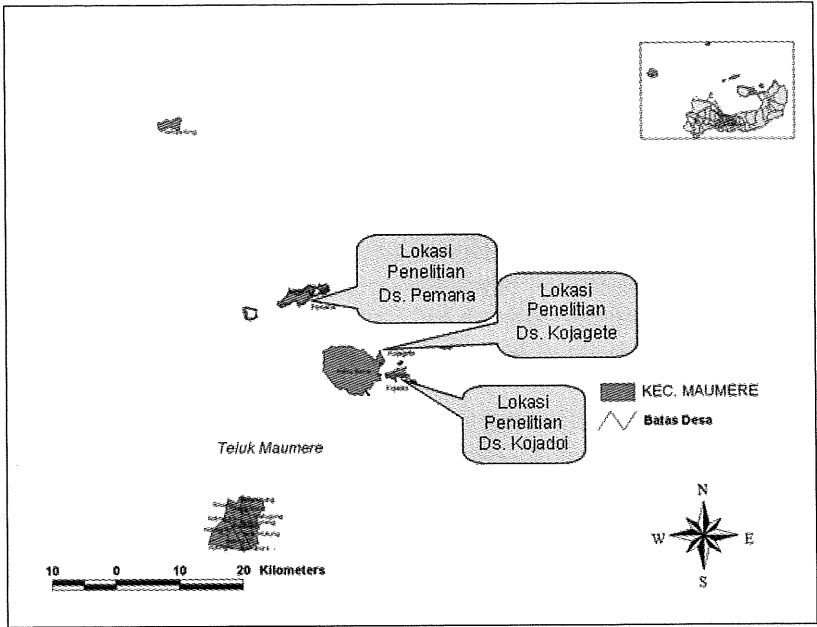
2.1.3. *Gambaran kawasan lokasi penelitian*

Lokasi penelitian dilakukan di kawasan utara wilayah Kabupaten Sikka. Di kawasan utara ini secara geografis dapat dibedakan menjadi dua kawasan, yaitu : (1) Kawasan Pulau-Pulau Kecil; (2). Kawasan Daratan (kawasan pantai pulau besar). Sebagaimana telah dikemukakan dalam subbab metodologi di atas Kawasan Pulau-Pulau Kecil diwakili oleh Kecamatan Maumere, sebab kecamatan ini memiliki wilayah (desa-desa) yang merupakan kawasan pulau-pulau kecil. Untuk Kawasan Daratan diwakili oleh Kecamatan Kewapante, kecamatan ini memiliki wilayah (desa-desa) pantai. Berikut ini akan diuraikan tentang gambaran kondisi fisik dua kawasan tersebut.

- ***Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Kecamatan Maumere)***

Letak - Wilayah Kecamatan Maumere adalah seluas 131,55 km². Wilayah kecamatan ini terdiri dari 19 desa/ kelurahan. Dari seluruh desa/kelurahan tersebut terdiri dari wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Wilayah daratan terdiri dari 13 desa/ kelurahan dan wilayah kepulauan terdiri dari 6 desa. Desa-desa di kepulauan tersebut adalah Desa Kojadoi, Kojagete, Pemanan, Gunungsari, Perumaan dll. Dari desa-desa pulau tersebut yang telah menerima Program COREMAP II (tahun 2001-2003) adalah Desa Kojagete dan Desa Kojadoi. Program-program yang telah diberikan di desa tersebut adalah pengembangan usaha budi daya rumput laut, motorisasi, pengembangan rumpon dan pemberian alat tangkap (*Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sikka, 2004*).

Gambar 3 :
Peta Lokasi Penelitian Wilayah Kecamatan Maumere, Kab. Sikka.



Sumber : Peta Wilayah Kecamatan Maumere, Kab. Sikka.

Topografi - Kondisi topografi wilayah Kecamatan Maumere tidak jauh berbeda dengan kondisi tingkat kabupaten. Sebagian wilayahnya merupakan laut dan sebagian besar di wilayah darat merupakan perbukitan yang terjal. Hanya sebagian kecil wilayahnya yang merupakan dataran yang dapat digunakan untuk pemukiman penduduk. Kondisi tersebut terutama terjadi di wilayah desa-desa pulau. Sehingga pemukiman yang ada di pulau-pulau tersebut saat ini cukup padat penduduk. Desa/pulau-pulau tersebut umumnya dikelilingi oleh terumbu karang (*barier reef*) yang sebagian besar telah rusak. Kerusakan terumbu karang tersebut seperti telah diungkapkan pada tingkat kabupaten di atas, diakibatkan oleh

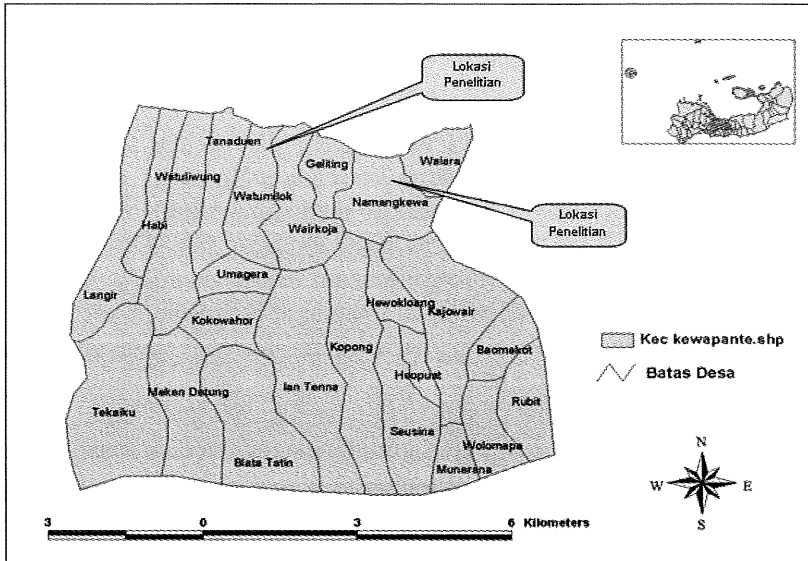
pemanfaatan bom, penggunaan potasium/sianida untuk menangkap sumber daya laut (ikan). Kerusakan tersebut juga diakibatkan dampak bencana gempa bumi dan tsunami tahun 1992 yang lalu.

Tata guna lahan - Di daratan wilayah pulau-pulau sebagian merupakan perbukitan yang telah gundul karena perambahan hutan. Sebagian kecil masih dapat ditanami jagung, ubi kayu, kelapa dan pisang. Di wilayah perbukitan tersebut tidak ada permukiman, sebab fasilitas air bersih dan jalan tidak ada. Di dataran-dataran rendah yang sempit dimanfaatkan untuk permukiman dan fasilitas umum, seperti air bersih, kantor desa, sekolah, dermaga dan Puskesmas Pembantu. Di wilayah pantai sampai kedalaman 30 m telah dimanfaatkan untuk budi daya rumput laut, seperti yang terjadi di Desa Kojadoi, sebagian Desa Kojagete, sebagian Desa Pemana dan desa lainnya. Budi daya rumput laut tersebut yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, ternyata berfungsi untuk menjaga kelestarian terumbu karang, memberikan lapangan kerja baru bagi nelayan dan anggota rumah tangganya. Usaha pengembangan budi daya rumput laut memberikan penghasilan rumah tangga yang cukup baik dan tidak terlalu tergantung pada musim. Sebagian besar nelayan di Desa Kojadoi dan Kojagete sudah tidak menjadikan nelayan tangkap sebagai pekerjaan utama. Mereka menangkap ikan sebagai pekerjaan tambahan dan hasil tangkapannya umumnya sekedar hanya untuk konsumsi sendiri.

- *Kawasan Daratan (Kecamatan Kewapante)*

Letak - Wilayah kecamatan Kewapante seluruhnya berada di daratan pulau besar (Pulau Flores). Letak kecamatan ini sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores/ Teluk Maumere, sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bola, sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Waigete dan sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Maumere dan Alok. Jadi kecamatan ini berbatasan dengan ibukota Kabupaten Sikka. Jarak dari ibukota hanya sekitar 7 km, jarak tempuh ke ibukota hanya sekitar 30 menit dengan kendaraan umum (minibus/angkot) dengan ongkos transport hanya Rp 3 000,-.

Gambar 4 :
Peta Lokasi Penelitian Wilayah Kecamatan Kewapante, Kab. Sikka



Sumber : Peta Wilayah Tiap Desa di Kecamatan Kewapante, Kab. Sikka

Luas wilayah - Luas wilayah Kecamatan Kewapante adalah 80,15 km². Kecamatan ini terdiri dari 24 desa dan ada beberapa desa yang memiliki wilayah pantai. Desa-desa tersebut antara lain Namangkewa, Watumilok, Watuliwung, Waiara, Langir dan Geliting. Penduduk dusun-dusun di desa yang memiliki wilayah pantai tersebut yang sebagian penduduknya memanfaatkan sumber daya laut. Dari desa-desa yang memiliki wilayah pantai tersebut hanya Desa Namangkewa yang mendapatkan Program COREMAP II. Program COREMAP pada fase II (tahun 2001-2003) adalah motorisasi, alat tangkap dan pengembangan rumpon (*Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sikka, 2004*).

Topografi - Sebagian besar wilayah Kecamatan Kewapante merupakan wilayah perbukitan dan sebagian dengan kemiringan cukup terjal. Sebagian kecil wilayah merupakan dataran rendah sampai pantai. Di wilayah ini yang merupakan lokasi pemukiman penduduk yang cukup padat. Sebagian dari penduduk wilayah tersebut yang banyak memanfaatkan sumber daya laut.

Wilayah kecamatan ini memanjang dari pantai ke wilayah perbukitan dan membujur dari utara ke selatan. Untuk kasus di Desa Namangkewa pada waktu pemekaran menjadi 3 desa tahun 2003, yaitu menjadi Desa Geliting, Desa Waiara dan Desa Induk Namangkewa semua desa menginginkan untuk memiliki wilayah pantai, sehingga pembagian wilayah memanjang dari utara ke selatan atau dari pantai ke wilayah perbukitan. Karena wilayah desa memanjang dari perbukitan sampai pantai, maka wilayah pantai tidak begitu luas dan hanya dua dusun yang memiliki wilayah pantai. Oleh karena itu, secara umum proporsi jumlah nelayannya dalam satu desa tidak begitu banyak. Kondisi topografi Desa Watumilok juga tidak begitu berbeda dengan Desa Namangkewa. Bentuk desanya memanjang dari perbukitan sampai wilayah pantai. Hanya ada 2 dusun yang wilayahnya dekat pantai dan dua dusun tersebut sebagian besar penduduknya adalah para nelayan.

Tata guna lahan - Hampir semua wilayah merupakan lahan kering yang digunakan untuk perladangan dan perkebunan rakyat. Lahan ladang dimanfaatkan untuk tanaman padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau dan sayur-sayuran. Padi di sini ditanam di lahan kering dalam satu tahun hanya satu kali tanam dan sekali panen. Rata-rata sekali panen hanya menghasilkan 7,32 kwintal/ hektar. Sedangkan untuk jagung mampu menghasilkan 14,25 kwintal/ hektar serta ubi kayu lebih tinggi lagi 27,07 kwintal/ hektar. Sedangkan untuk perkebunan rakyat menghasilkan cokelat, kelapa, jambu mete, cengkeh dan kopi. Di lahan pekarangan umumnya digunakan untuk perumahan dan di sekeliling perumahan tersebut ada tanaman pisang, kelapa, sukun dan buah-buahan (mangga, durian, nangka dsb).

2.2. Kondisi Sumber Daya Alam

Potensi wilayah daratan

Sebagian besar daratan (sekitar 112.835 hektar) di wilayah Kabupaten Sikka merupakan lahan pertanian dalam arti luas (termasuk lahan untuk hutan). Sekitar 73 persen merupakan lahan pertanian yang terdiri dari persawahan dan lahan kering. Sebagian besar (79.605 hektar atau 70,5 persen) dari lahan tersebut merupakan lahan kering. Lahan kering tersebut merupakan perladangan/ tegalan (38 952 hektar atau 34,6 persen) dan perkebunan (40.653 hektar atau 36 persen). Perladangan biasanya ditanami tanaman pangan, antara lain jagung, ubi kayu, ubi jalar, pisang, kacang tanah, kacang hijau dan sayur-sayuran. Lahan perkebunan ditanami kelapa, cokelat, jamu mete, cengkeh dan kopi. Lahan persawahan di kabupaten ini hanya sedikit (2 744 hektar atau 2,4 persen). Sawah irigasi teknis hanya 1,7 persen dan lainnya merupakan persawahan irigasi sederhana dan tadah hujan (Tabel 2.1.3). Di lahan persawahan umumnya ditanami padi sekali dalam setahun dan tanaman jagung.

Di luar lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan tersebut 38.442,43 hektar atau 22,2 persen merupakan kawasan hutan. Sebagian kawasan hutan tersebut sudah mengalami penggundulan. Hal tersebut sebagai akibat curah hujan di daerah ini yang rendah dan karena adanya perambahan hutan yang dilakukan untuk penduduk untuk diambil kayunya sebagai bahan bakar rumah tangga dan untuk usaha pertanian tanaman pangan. Ada sebagian kecil 12.450 hektar atau 11 persen merupakan semak belukar yang belum dimanfaatkan untuk usaha pertanian.

Tabel 2.1.3 :
Tata Guna Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka, 2006

No	Pergunaan Tanah	Luas (Ha)	
		Absolut	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Lahan persawahan :	2.744	2,4
	a. Sawah irigasi :	2.561	2,3
	o Irigasi teknis	578	0,5
	o Irigasi ½ teknis	1.285	1,2
	o Irigasi sederhana	698	0,6
	b. Sawah tadah hujan	183	0,1
2	Lahan kering :	79.605	70,5
	a. Tegalan/ladang	38.952	34,6
	b. Perkebunan	40.653	36,0
3	Lahan hutan :	18.036	16,0
	a. Hutan rakyat	6.349	5,6
	b. Hutan negara	11.687	10,4
4	Lahan belum diusahakan	12.450	11,0
	Jumlah	112.835	100,0

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Sikka Tahun 2004, dikutip dari Profil Perekonomian Daerah Kab.Sikka oleh Bappeda Kab. Sikka, 2004

Sebagian besar lahan kering di kabupaten ini masih berupa lahan tidur. Lahan tersebut apabila dikelola dengan baik dan mendapat air irigasi sangat cocok untuk pengembangan tanaman pangan. Lahan basah yang mempunyai potensi dapat dikembangkan adalah seluas 3.593 hektar, terdiri dari lahan yang sudah berfungsi/diolah seluas 2.032 hektar dan selebihnya (1.561 hektar) berupa lahan basah tetapi belum diolah. Sedangkan lahan kering yang mempunyai potensi untuk dikembangkan seluas 86.545 hektar, dari luas tersebut yang sudah berfungsi baru 29.870 hektar, selebihnya masih belum diolah dengan luas 57.135 hektar (Dinas Tanaman Pangan, Kab. Sikka, 2005).

Dalam perkebunan, potensi komoditas yang dapat dikembangkan adalah kelapa dengan luas area 22.752,8 hektar dan

produksi sebesar 4.379,2 ton. Luas area komoditas cokelat 20.421,8 hektar, dapat mencapai produksi 7.886,4 ton. Luas area jambu mete adalah 20.144,6 hektar dengan produksi 2.096,2 ton. Luas area perkebunan kopi adalah 1.636,5 hektar dengan produksi yang bisa dicapai 158 ton, luas area perkebunan cengkeh 1.497,6 hektar dengan produksi 220,2 ton, luas areal perkebunan kapuk 175,9 hektar produksi yang dapat dicapai 20.008 ton. Pada saat krisis minyak, maka pohon jarak dapat dijadikan bahan baku biodisel. Luas areal pohon jarak adalah 501,8 hektar dan produksi yang bisa dicapai 49.321 ton, luas areal perkebunan tembakau adalah 464,3 hektar dengan produksi 73.719 ton, luas areal perkebunan vanili 360,5 hektar dengan produksi yang dapat dicapai 49.685 ton, luas areal perkebunan lada 263 hektar dengan produksi 94.304 ton dan luas areal perkebunan pala 427,1 hektar dengan produksi 31.083 ton.

Subsektor peternakan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sikka antara lain kuda, pada saat ini terdapat 16.509 ekor kuda. Demikian pula dengan ternak sapi sebanyak 8.640 ekor, ternak kerbau sebanyak 565 ekor, ternak kambing sebanyak 75.952 ekor, ternak babi sebanyak 224.821 ekor, ternak ayam sebanyak 536.734 ekor dan ternak itik sebanyak 45.234 ekor. Jumlah pohon dan produksi tanaman kehutanan tahun 2003, yaitu kemiri sebanyak 110.286 pohon dengan produksi 1.671,6 ton, dan asam sebanyak 26.170 pohon dengan produksi 1.297,4 ton. Dari data tersebut menunjukkan bahwa potensi perkebunan dan peternakan di Kabupaten Sikka bisa diharapkan untuk dapat lebih dikembangkan, mengingat produktivitasnya masih rendah.

Potensi laut dan wilayah pesisir

Sudah dikemukakan dalam subbab sebelumnya bahwa luas perairan laut Kabupaten Sikka (Laut Flores dan Laut Sawu) adalah 5.821,3 km² atau 77 persen dari luas wilayah Kabupaten Sikka. Ada tiga jenis potensi utama untuk wilayah pesisir/ perairan di Kabupaten Sikka, yakni : (1). Potensi terumbu karang; (2). Hutan *mangrove*; dan (3). Hutan lamun (PMU-COREMAP Kab. Sikka, 2005). Luas

seluruh hamparan terumbu karang di Kabupaten Sikka mencapai 14.500,4 hektar. Di kawasan terumbu karang ini hidup dan berkembang berbagai biota laut.

Potensi lestari perairan Kabupaten Sikka mencapai sebesar 21.175 ton per tahun. Potensi tersebut terdiri dari potensi penangkapan lestari untuk jenis pelagis 13.764 ton per tahun dan jenis *demersal* 7.411 ton per tahun (jumlah = 21.175 ton/tahun) atau 60 persen dari *standing stock*. *Standing stock* jenis pelagis 22.940 ton dan jenis *demersal* 12.352 ton. Potensi perikanan laut masih terus dapat dikembangkan mengingat potensi produksi perikanan tahun 1998 adalah sebanyak 6.784,2 ton dan produksi tahun 2003 dapat mencapai 8.475,2 ton. Tingkat pemanfaatan potensi perikanan laut sampai dengan tahun 2003 baru sebesar 34,5 persen, berupa : (a). *Pelagis* besar antara lain ikan tuna, cakalang, tongkol, cucut/ hiu, tenggiri dan tebang; (b). *Pelagis* kecil antara lain berupa ikan kembung, lemuru, teri, layang, selar dan baronang; (c). *Demarsal* atau ikan – ikan dasar seperti kerapu, kakap, bawal, lencam, ekor kuning; (d). *Non fish (bukan ikan)* berupa lobster, cumi-cumi, teripang dan gurita. Sedangkan nener mempunyai potensi lestari 65 juta ekor/tahun, hingga tahun 2003 dapat mencapai produksi sebanyak 1.510.000 ekor/tahun atau kurang lebih baru mencapai sekitar 2,3 persen dari potensi yang tersedia.

Dengan garis pantai 379,30 km tersebut, maka peluang pengembangan usaha budi daya terutama komoditas mutiara, rumput laut, teripang, baronang, bandeng dan udang di Kabupaten Sikka masih cukup besar. Sampai dengan tahun 2003 yang sudah banyak diusahakan adalah rumput laut dan mutiara. Di Kecamatan Maumere tepatnya di Desa Kojadoi budi daya rumput laut sudah dikelola oleh penduduk sejak tahun 2002 dan baru berkembang efektif dengan mendapat binaan dari COREMAP serta pemerintah daerah setempat pada tahun 2003 hingga sekarang.

Hamparan hutan *mangrove* di Kabupaten Sikka mencapai seluas 219,74 hektar. Dari hamparan tersebut sebagian besar (66,4 persen atau 145,76 hektar) telah mengalami kerusakan. Sampai saat ini hanya sekitar 33,6 persen (73,9 hektar) yang masih dianggap baik.

Tidak begitu banyak berbeda hasil penelitian PMU-COREMAP Kab. Sikka di 20 desa, di mana sekitar 63,9 persen hamparan hutan *mangrove* telah mengalami kerusakan dan hanya sekitar 36,2 persen yang masih cukup baik (PMU- COREMAP Kab. Sikka, 2005). Penyebab kerusakan hutan *mangrove* adalah bencana tsunami tanggal 12 Desember 1992 yang lalu, adanya abrasi pantai dan adanya penebangan liar oleh penduduk untuk bahan bakar rumah tangga.

Hamparan padang lamun di wilayah Kabupaten Sikka mencapai 351,74 hektar. Dari luas hamparan tersebut 63,1 persen (221,94 hektar) telah mengalami kerusakan. Sebaliknya hanya sekitar 36,9 persen (129,8 hektar) masih dianggap baik. Hasil penelitian PMU-COREMAP Kab. Sikka (2005) menunjukkan 67,9 persen hamparan padang lamun di wilayah Sikka telah rusak. Hanya sekitar 32,1 persen hamparan tersebut yang masih dianggap baik. Penyebab kerusakan hampir sama dengan kerusakan pada terumbu karang, yaitu pengaruh gelombang tsunami tanggal 12 Desember 1992, erosi dan sedimentasi serta ulah manusia memanfaatkan bahan peledak untuk menangkap biota laut.

Potensi pertambangan dan energi

Potensi bahan galian/tambang/mineral dan energi, terdiri dari mineral industri berupa : gips yang terdapat di Desa Dobo dan Kecamatan Mego; kaolin terdapat di Desa Bhera dan Kecamatan Mego; porselin/ batu tokesi di Desa Paga dan Kecamatan Paga; pasir besi terdapat di Desa Lela, Kecamatan Lela dan Desa Bola, Kecamatan Bola; *clay* terdapat di Hikong, Kringa, Ojang, Wailamun, Nebe, Talibura dan Kecamatan Talibura; *phosphat* terdapat di Pemana, Kecamatan Maumere; belerang seluas 2000 hektar terletak di Desa Egon dan Kecamatan Waigete. Di samping itu, terdapat mineral yang vital berupa *aurum* (Au) dan emas di Desa Tanarawa dan Kecamatan Talibura. Pada tahun 1987 dua jenis tambang di Desa Tanarawa tersebut telah diadakan pengeboran oleh PT. Nusa Lontar Mining.

Potensi sumber energi yang telah dimanfaatkan adalah energi tenaga surya. Tahun 1999 Kecamatan PaluE mulai digerakan energi surya untuk penerangan/listrik bagi 100 rumah tangga, namun sampai dengan tahun 2003 sudah mencapai 1.543 rumah tangga.

Potensi industri pariwisata

Potensi obyek wisata Kabupaten Sikka dapat dikategorikan menjadi 5 jenis potensi, yaitu :

1. Potensi wisata pantai/bahari

Obyek wisata yang sudah dikelola adalah Pantai Waiara, Pantai Patiahu, Wairterang dan Pantai Wodong. Sedangkan obyek wisata yang belum dikelola antara lain Pantai Doreng, Pantai Koka, Pantai Waturia dan Pantai Sikka. Wilayah kepulauan kecil wilayah Kecamatan Maumere mempunyai potensi untuk dikembangkan, karena keindahan panorama laut dikelilingi oleh gunung – gunung serta keindahan terumbu karang yang relatif masih terjaga dengan baik.

2. Potensi wisata alam/panorama alam

Obyek wisata yang sudah dikelola Taman Laut Teluk Maumere. Sedangkan potensi wisata yang belum dikelola antara lain : gua alam Keytimu dan Wairbao di Bola, air panas di PaluE, Gunung Egon di Waigete, batu meteor di Desa Kloangpopot, pemandangan alam puncak Blira Sina Watublapi dan Taman Satwa di Pulau Dambila.

3. Potensi wisata rohani

Salah satu pusat agama Katholik, Kabupaten Sikka memiliki beberapa obyek wisata rohani, yaitu : Gereja Tua Sikka, Patung Santa

Maria (Mageria, Wisung Fatima Lela, Watusoking /Watubala dan Hokor) dan patung Kristus Raja di Kota Uneng.

4. Potensi wisata budaya

Kabupaten Sikka dengan beragam suku memiliki kekayaan budaya yang beragam. Potensi wisata yang sudah dikelola antara lain: Museum Blikon Blewut (Ledalero), Perahu Tembaga / Jong Dobo (Desa Lantena) Kecamatan Kewapante. Kampung Tradisional (Nuabari, Hewokloang, Wuring / Bugis) dan Sanggar Budaya : (Gait Gu di Tebuk, Cogo, Canda di Nangahale, Tarian Bobu di Sikka, Bliran Sina di Watublapi, Wuat Puan di Watublapi, Puger Mudeng di Ohe, Pesalintuna di Bola, Penin di Dokar, Tarian Bebing di Hokor). Sedangkan potensi yang belum dikelola yaitu Kuburan Batu / Kampung Tua Desa Lenan Dearate Kec. Paga, Ritual Watu Mahe, Gading Gajah Purba (Watublapi). Wisata budaya belum mendapat sentuhan sarana dan prasarana yang memadai, seperti fasilitas jalan dan gedung museum agar menarik minat wisatawan.

5. Potensi wisata minat khusus

Obyek wisata minat khusus antar lain taman berburu di Pulau Besar, Pusat Kerajinan Rumah Tangga dan pasar tradisional dan keanekaragaman budaya suku PaluE di Kecamatan PaluE.

2.3. Sarana dan Prasarana Sosial-Ekonomi

2.3.1. Pendidikan

a. Tingkat kabupaten

Pendidikan menjadi faktor penting dalam usaha mencerdaskan rakyat atau masyarakat untuk mencapai terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Selain aspek

pendidikan faktor kesehatan dan kesejahteraan ekonomi menjadi penentu dalam melihat apakah sumber daya manusia itu mempunyai kualitas. Tingkat pendidikan penduduk (masyarakat) dapat dicapai tidak hanya dipengaruhi oleh faktor motivasi warga, tetapi bagaimana sarana prasarana pendidikan tersedia di suatu wilayah.

Di Kabupaten Sikka, pada tahun 2003 jumlah Sekolah Dasar tercatat 295 buah yang tersebar ke seluruh wilayah desa, sementara Sekolah Menengah Tingkat Pertama ada sebanyak 48 buah, Sekolah Menengah Tingkat Atas Umum sebanyak 13 buah dan Sekolah Menengah Tingkat Atas Kejuruan sebanyak 7 orang (Tabel 2.3.1). Masing-masing kecamatan di Kabupaten Sikka telah ada SLTP dan SLTA Umum, sementara SMTA Kejuruan belum semua kecamatan ada. Rasio guru/ sekolah dari tingkat SD sampai SMTA nampaknya sudah cukup memadai. Rasio murid/ guru dari tingkat SD sampai SLTA nampaknya secara kuantitas cukup memadai.

Tabel 2.3.1
Jumlah Sarana Sekolah, Guru, Murid, Rasio Murid/Guru, Rasio Guru/ Sekolah dan Murid/Sekolah, Kabupaten Sikka, 2003

Tingkat Pendidikan	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid/ Guru	Rasio Guru/ Sekolah	Rasio Murid/ Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. TK	58	233	2.130	9	4	37
2. SD	295	2364	41.394	17	8	140
3. SMTP Umum	48	694	10250	15	14	214
4. SMTA Umum	13	315	4111	13	24	316
5. SMTA Kejuruan	7	216	2914	13	27	78

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2003

Untuk Kecamatan Maumere jumlah sarana Sekolah Dasar Negeri ada sebanyak 20 buah, Sekolah Dasar Swasta sebanyak 15 buah (Tabel 2.3.2). Apabila dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan (19) yang ada di Kecamatan Maumere, masing-masing desa/ kelurahan minimal ada satu SD. Bagaimana jumlah pengajar dibandingkan dengan murid ? Tabel 2.2 menunjukkan bahwa rasio murid/guru cukup baik, yaitu tiap 14 murid/guru untuk

SD Negeri atau 15 murid/guru untuk SD Swasta. Dengan melihat rasio tersebut perbandingannya sudah sangat ideal atau memadai untuk tingkat SD.

Sarana pendidikan di Kewapante memiliki 15 SD Negeri dan 23 SD Swasta (Tabel 2.3.2). SD Swasta tersebut diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kristen Katholik dan Yayasan Pendidikan Muhammadiyah. Jumlah tenaga pengajar baik SD Negeri maupun Swasta sudah cukup memadai. Rasio murid/ guru untuk SD Negeri adalah sebesar 14 murid/ guru, sementara untuk SD Swasta sedikit lebih banyak 18 murid/ guru.

Di Kabupaten Sikka SMTA Kejuruan cukup menonjol dibandingkan dengan SMTA Umum, meskipun SMTA Umum lebih banyak. SMTA Kejuruan berjumlah 7 buah dengan tenaga guru 216 orang. SMTA Kejuruan yang ada di Kabupaten Sikka meliputi Sekolah Menengah Pariwisata, Sekolah Menengah Ekonomi, Sekolah Menengah Perikanan, dan Sekolah Menengah Kelautan. Di samping itu, juga ada Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (*Public Senior Socio-worker High School*). Di Kabupaten Sikka juga terdapat sekolah tinggi untuk pendidikan pastor yang terkenal dengan Sekolah Seminari Tinggi.

Mengenai kuantitas tenaga pengajar, rata-rata jumlah guru SD tiap sekolah baru mencapai 8 orang. Sedang jumlah guru SMP per sekolah telah mencapai 14 orang. SMTA Umum nampaknya lebih baik, yakni setiap sekolah ada 24 orang dan untuk SMTA Kejuruan adalah 31 orang guru per sekolah. Dilihat dari rata-rata murid per sekolah tampaknya yang paling banyak adalah SMTA Kejuruan, sekolah yang terbanyak adalah 416 orang murid. Sedangkan untuk SD hanya mencapai 140 orang murid per sekolah. Kondisi ini dapat ditafsirkan bahwa minat anak muda memasuki SMTA Kejuruan masih cukup baik.

Tabel 2.3.2 :
Distribusi Sekolah Dasar Negeri dan Swasta, Guru, Murid
dan Rasio Murid/Guru di Kabupaten Sikka, 2003

Kecamatan	SD Negeri & Inpres				SD Swasta			
	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Guru/Murid	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid/Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Paga	20	137	2473	18	15	109	1886	17
2. Mego	11	73	1285	17	6	45	949	21
3. Lela	6	46	570	12	9	63	892	14
4. Bola	17	128	1910	15	18	146	2363	16
5. Talibura	12	83	1657	20	16	107	2093	19
6. Waigeta	7	61	1112	18	11	88	1982	22
7. Kewapante	15	137	1989	14	23	187	3334	18
8. Maumere	20	139	2109	15	15	94	1283	14
9. PaluE	2	15	248	16	8	49	961	20
10. Nita	18	137	2040	15	15	133	2280	17
11. Alok	21	289	5301	18	10	103	2677	26
Jumlah	149	1245	20694	16	146	1124	20700	18

Sumber : Badan Pusat Statistik kab. Sikka, Sikka Dalam Angka 2003

Tabel 2.3.2. menunjukkan bahwa secara umum keberadaan SD Negeri dan SD Swasta di Kabupaten Sikka telah menyebar ke semua kecamatan. Alok, Maumere dan Paga adalah kecamatan-kecamatan yang memiliki jumlah SD Negeri terbanyak. Kebetulan Maumere dan Alok merupakan kecamatan yang berada di wilayah Ibukota Kabupaten Sikka. Kewapante ternyata juga merupakan kecamatan agak banyak jumlah sekolahnya, yakni 15 SD Negeri atau SD Inpres. Bahkan di kecamatan ini jumlah fasilitas SD Swasta paling banyak (23 buah) dibandingkan di kecamatan lain. Jumlah SD paling sedikit adalah Kecamatan PaluE, SD Negeri hanya ada 2 buah, sedang SD swastanya hanya 8 buah.

Gambaran di atas selain menunjukkan bahwa jumlah SD Swasta cukup seimbang dengan jumlah SD Negeri, juga memperlihatkan bahwa SD Swasta di Kewapante ternyata paling

banyak. Di Kecamatan Kewapante juga menunjukkan sekolah swasta dan siswa terbanyak di Kabupaten Sikka. Hal ini kemungkinan disebabkan Kecamatan Kewapante secara geografis letaknya berbatasan dengan ibukota kabupaten dan memiliki lahan yang memungkinkan untuk pembangunan sekolah. Besarnya persediaan sarana sekolah juga dapat dilihat dari rasio jumlah guru dan murid. Makin kecil rasio murid dan guru secara teoritis makin baik, sebab makin sedikit jumlah murid per guru proses pengajaran menjadi lebih baik. Tabel 2.3.3 menunjukkan bahwa rasio murid/guru di semua SD Negeri/ SD Swasta di tiap kecamatan ternyata rasionya masih sangat ideal, tidak satupun yang sampai mencapai di atas angka 30 orang murid/guru. Semuanya masih berada di bawah 30 orang murid/guru bahkan di beberapa kecamatan masih di bawah 20 orang murid/guru.

Tabel 2.3.3 :
Distribusi Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta, Guru, Murid dan Rasio Murid/ Guru Menurut Kecamatan di Kabupaten Sikka, Tahun 2003.

Kecamatan	SMP Negeri & Inpres				SMP Swasta			
	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid/Guru	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid/Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Paga	2	25	306	12	3	36	464	13
2. Mego	1	12	122	10	1	27	301	11
3. Lela	1	18	194	11	2	19	173	9
4. Bola	2	26	274	11	3	29	482	17
5. Talibura	2	29	268	9	1	21	344	16
6. Waigeta	0	0	0	-	3	29	406	14
7. Kewapante	1	22	411	19	4	49	843	17
8. Maumere	2	32	345	11	4	38	463	12
9. PaluE	0	0	0	-	1	7	116	17
10. Nita	2	33	529	16	3	28	378	14
11. Alok	2	69	919	13	8	145	2912	20
Jumlah	15	266	3368	13	33	428	6882	16

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Sikka, Sikka Dalam Angka 2003

Tabel 2.3.3 menunjukkan bahwa jumlah SMP Negeri di Kabupaten Sikka baru sebanyak 15 buah. Dengan jumlah tersebut ternyata tidak setiap kecamatan memiliki SMP Negeri, namun ada 6 kecamatan yang memiliki 2 SMP Negeri. Kecamatan Waigete dan

PaluE belum mempunyai SMP Negeri. Meskipun demikian semua kecamatan telah memiliki SMP Swasta, bahkan beberapa kecamatan memiliki lebih dari 2 SMP Swasta. Kecamatan Waigete memiliki 3 SMP Swasta, sementara Kecamatan PaluE memiliki satu SMP Swasta. Di Kecamatan Maumere memiliki 2 SMP Negeri dan 4 SMP Swasta, sementara di Kecamatan Kewapante memiliki satu SMP Negeri dan 4 SMP Swasta. Rasio jumlah guru dan jumlah murid dapat juga dilihat dalam Tabel 2.3.3. Dari rasio jumlah murid terhadap guru di semua kecamatan (termasuk di Kecamatan Maumere dan Kewapante) masih sangat ideal. Hampir di semua kecamatan, rasio jumlah murid terhadap guru masih di bawah 20 orang murid/guru. Rasio murid/ guru untuk Kecamatan Maumere sebesar 11 orang murid/guru untuk SMP Negeri dan 12 orang murid/ guru. Sementara di Kewapante rasio murid/guru sebesar 19 orang murid/ guru SMP Negeri dan 17 orang murid/ guru untuk SMP Swasta.

Tabel 2.3.4
Distribusi Sekolah Menengah Tingkat Atas, Guru, Murid, Rasio Murid/ Guru Menurut Kecamatan, di Kabupaten Sikka, Tahun 2003

Kecamatan	SMA Negeri & Inpres				SMA Swasta			
	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid/ Guru	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid/ Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Paga	-	-	93	-	1	11	453	41
2. Mego	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Lela	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Bola	1	12	54	5	-	-	-	-
5. Talibura	1	13	63	5	-	-	-	-
6. Waigeta	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Kewapante	-	-	-	-	3	68	384	6
8. Maumere	-	-	-	-	-	-	-	-
9. PaluE	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Nita	1	1	63	?	-	-	-	-
11. Alok	3	156	2015	13	10	262	4353	17
Jumlah	6	198	2288	12	14	333	5190	16

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Sikka, Sikka Dalam Angka 2003

Tabel 2.3.4 menunjukkan bahwa di Kabupaten Sikka tidak semua kecamatan memiliki SMTA Negeri ataupun SMTA Swasta.

Kecamatan yang mempunyai SMTA Negeri hanya Kecamatan Lela (1 buah), Talibura (1 buah), Nita (1 buah) dan Alok (3 Buah). Sementara SMA Swasta yang banyak di Kecamatan Alok (10 buah) dan Kecamatan Kewapante ada 3 buah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan SMTA di Kabupaten Sikka belum terdistribusi merata, masih terkonsentrasi di ibukota kabupaten dan sekitarnya (Kecamatan Alok dan Kewapante). Sayang beberapa wilayah kecamatan utamanya kawasan pulau-pulau ada SMTA.

b. Tingkat kawasan penelitian

Bagaimana gambaran fasilitas sekolah di daerah penelitian? Di daerah penelitian kawasan pulau-pulau kecil (Kecamatan Maumere) khususnya di Desa Kojadoi terdapat dua SD Negeri/Inpres. Sementara di Desa Kojagete juga terdapat dua SD Negeri/ Inpres. Sementara di Desa Pemana terdapat tiga SD Negeri dan dua SD Inpres serta satu MI (Madrasah Ibtidaiyah). Di kawasan pulau-pulau kecil ini ada satu SMP Negeri, lokasinya di Desa Kojadoi. Sekolah ini baru 5 tahun berdiri dan baru meluluskan tiga kali.

Di daerah penelitian kawasan daratan (Kecamatan Kewapante) seperti telah dikemukakan di atas cukup tersedia fasilitas pendidikan, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, baik Yayasan Kristen Katholik maupun Muhammadiyah telah mendirikan fasilitas pendidikan di Kecamatan Kewapante. Yayasan Pendidikan Kristen Katholik memiliki sekolah dari SD hingga SMTA Kejuruan. Letak sekolah ini ada yang di Desa Watumilok, wilayah Kecamatan Kewapante. Fasilitas SD dan SMP juga ada di Desa Namangkewa.

2.3.2. Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang tersedia di Kabupaten Sikka pada tahun 2003 terdiri dari 2 Rumah Sakit Umum, 14 Puskesmas, 60 Puskesmas Pembantu (Pustu) dan 4 Balai Pengobatan (Tabel 2.3.5). Dengan 14 Puskesmas di Kabupaten Sikka tersebut berarti masing-

masing kecamatan sudah ada satu Puskesmas. Sementara Puskesmas Pembantu merupakan Puskesmas cabang yang biasanya melayani untuk tiap desa/kelurahan. Namun dengan jumlah Puskesmas Pembantu yang baru sebanyak 60 buah, berarti hanya sekitar sepertiga dari 160 desa/kelurahan. Dengan demikian masih banyak desa/ kelurahan yang dilayani Puskesmas Pembantu.

Tabel 2.3.5
Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenisnya, Kabupaten Sikka, 2003

Keterangan	Jumlah Tahun 2002	Jumlah Tahun 2003
(1)	(2)	(3)
Rumah sakit Umum	2	2
Rumah sakit Khusus	0	0
Puskesmas	13	14
Peskesmas Pembantu	60	60
Balai Pengobatan	4	4

Sumber: Indikator Kesra Kab, Sikka 2003

Fasilitas kesehatan tentu saja tidak hanya dilihat dari jumlah dan penyebaran Rumah Sakit atau Puskesmas, tetapi jumlah dan penyebaran tenaga medis yang melayani di masing-masing fasilitas kesehatan tersebut. Tabel 2.3.6 menunjukkan bahwa jumlah tenaga dokter di Kabupaten Sikka ada sebanyak 30 orang dokter, 126 orang perawat, 79 orang bidan, 215 orang paramedis dan 401 orang dukun terlatih. Dari tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa ternyata penyebaran tenaga medis tersebut tidak merata. Para tenaga medis tersebut penyebarannya lebih terkonsentrasi di Kecamatan Alok yang lokasinya di wilayah ibukota kabupaten, utamanya di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Para tenaga medis yang lain (perawat, bidan dan paramedis) juga paling banyak dipekerjakan di ibukota kabupaten. Di Kecamatan Maumere ada 2 orang tenaga dokter, 15 orang perawat, 9 orang bidan dan 9 orang paramedis. Namun sebagian besar tenaga medis tersebut dipekerjakan di wilayah Maumere daratan, sementara di wilayah pulau-pulau kecil hanya sebagian kecil jumlah tenaga

medisnya. Di Kecamatan Kewapante dipekerjakan 2 orang dokter, 12 orang perawat, 8 orang bidan dan 9 orang paramedis. Untuk tenaga dukun terlatih, di Kecamatan Maumere ada 49 orang dukun terlatih, sementara Kecamatan Kewapante ada 41 orang dukun terlatih.

Tabel 2.3.6 :
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan, Di Kabupaten Sikka, 2003

Kecamatan	Dokter	Perawat	Bidan	Dukun terlatih	Paramedis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paga	2	19	10	93	12
Mego	0	0	0	0	0
Lela	1	9	4	22	10
Bola	1	14	5	46	7
Talibura	1	12	5	63	11
Waigete	0	0	0	0	0
Kewapante	2	12	8	41	9
Maumere	3	15	9	49	9
PaluE	0	0	0	0	0
Nita	2	15	11	55	12
Alok	18	32	27	32	145
Jumlah	30	128	79	401	215

Sumber : Indikator Kesra Kab, Sikka 2003

Tabel 2.3.7 :
Jumlah Posyandu Dirinci Per Puskesmas di Kabupaten Sikka, Tahun 2002

Puskesmas	Posyandu	Pratama	Madya	Purnama	Mandiri	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Paga	14	35	14	-	-	49
2. Lekebai	7	26	3	-	-	29
3. Nangsa	7	2	-	-	-	2
4. Nita	11	-	40	-	-	40
5. Mega panda	3	20	-	-	-	20
6. Kopeta	8	50	-	-	-	50
7. Nelle	18	42	-	-	-	42
8. PaluE	8	6	20	-	-	26
9. Waipare	19	59	3	3	-	65
10. Bola	15	43	-	-	-	43
11. Waigete	9	35	-	-	-	35
12. Watibaing	14	2	59	-	1	62
13. Beru	5	23	-	-	-	23
Jumlah	138	343	139	3	1	486

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sikka, Sikka Dalam Angka 2003

Sarana kesehatan lainnya yang setiap desa/ kelurahan perlu tersedia adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Posyandu berfungsi untuk membantu Puskesmas dalam pelayanan kesehatan dan keluarga berencana. Meskipun secara umum hampir semua kecamatan memiliki Puskesmas, namun untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Posyandu sangat diperlukan di setiap desa/ kelurahan. Di Kecamatan PaluE telah ada Posyandu yang statusnya tingkat madya, artinya di Posyandu tersebut sudah ada tenaga medis setingkat tenaga perawat.

Kemudian bagaimana bagi penduduk di kawasan pulau-pulau kecil (seperti di Desa Kojadoi) memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk kasus penyakit biasa cukup berobat sendiri dengan membeli obat dari warung. Di setiap desa memang mempunyai Posyandu untuk pelayanan ibu dan anak serta pengobatan umum. Di Desa Pemana Posyandu belum dimanfaatkan secara maksimal dan status masih tingkat pratama. Di kawasan daratan (Desa Namangkewa dan Watumilok) lokasi desa dekat dan mudah dijangkau dengan kendaraan darat untuk mencapai Rumah Sakit maupun Puskesmas. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat tidak mengalami kesulitan.

Tabel 2.3.8 :
Distribusi Penderita Menurut Jenis Penyakit Di Kabupaten Sikka, Tahun 2002

Jenis Penyakit	Persen
(1)	(2)
1. Infeksi saluran pernapasan	30,18
2. Malaria Klinis	18,94
3. Penyakit jaringan Otot	5,37
4. Penyakit saluran pernapasan Atas	9,52
5. Penyakit kulit infeksi	4,74
6. Diare	1,58
7. Penyakit cacangan	2,17
8. Bronkitis	1,80
9. Anemia	2,26
10. Gastritis	2,54
11. Lain-lain	20,64
Jumlah	100,00

Sumber: Badan Pusat Stataistik Kab. Sikka, Sikka Dalam Angka 2003.

Untuk melihat bagaimana sebetulnya jenis penyakit yang diderita penduduk di Kabupaten Sikka telah terkumpul data kunjungan dari Puskesmas. Pada tahun 2002 ternyata penyakit yang diderita oleh penduduk Kabupaten Sikka persentase terbesar adalah penyakit infeksi saluran pernapasan atas/ISPA (30,2 persen). Kemudian setelah ISPA disusul oleh malaria klinis. Keberadaan jenis penyakit tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Sikka masih ada pandemi malaria, artinya potensi penyakit malaria yang disebabkan oleh nyamuk masih ada. Keadaan ini disebabkan di beberapa lokasi masih dijumpai genangan air, baik di sungai, pantai maupun di cekungan-cekungan sebagai sarang nyamuk.

Di wilayah kawasan pulau-pulau kecil penyakit batuk dan kulit masih sering diderita oleh penduduk. Hal ini sering diakui oleh beberapa informan melalui wawancara mendalam di Desa Kojadoi, Pemana dan Kojagete. Keadaan ini dapat dipahami karena pemukiman nelayan cukup kumuh dan mereka umumnya bekerja dan hidup berhari-hari tidak lepas dari lingkungan pantai dan laut. Sedangkan penyakit batuk yang termasuk penyakit saluran pernapasan atas juga sering dialami oleh penduduk setempat. Hal ini karena kondisi pemukimannya di daerah penelitian terdiri tanah pasir yang sering berdebu, apa lagi pada musim kering.

2.3.3. *Sarana ekonomi*

Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Di Kabupaten Sikka hampir setiap kecamatan umumnya mempunyai pasar desa/ tradisional. Sebagai contoh di Kecamatan Kewapante mempunyai pasar desa yang cukup ramai dikunjungi oleh pembeli dan penjual. Pasar desa tersebut adalah Pasar Geliting. Pasar Geliting merupakan tempat penjualan berbagai macam kebutuhan rumah tangga, dari kebutuhan bahan makanan sampai kebutuhan bukan bahan makanan, dari hasil/ produksi pabrik sampai produksi pertanian. Hal yang lebih penting lagi pasar tersebut juga sebagai tempat pemasaran hasil laut, seperti penjualan ikan segar dan ikan kering. Penduduk desa pulau-pulau kecil (Desa Kojadoi dan

Kojagete) biasanya menjual hasil tangkapan ikan dan berbelanja berbagai kebutuhan rumah tangga juga ke Pasar Geliting. Ada angkutan kapal penumpang yang rutin seminggu sekali dari Desa Kojadoi dan Kojagete ke Pasar Geliting.

Pasar di Kota Maumere juga menjual berbagai macam kebutuhan masyarakat. Di wilayah Kecamatan Maumere lainnya seperti di kawasan pulau-pulau kecil terutama di lokasi Desa Kojadoi, Kojagete dan Pemana belum memiliki pasar desa. Namun di desa-desa tersebut telah ada beberapa warung/kedai yang menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Kebutuhan bahan makanan antara lain beras, gula, telur, supermie, kue, teh, kopi, *soft drink* dan susu. Barang-barang kebutuhan bukan bahan makanan yang dijual adalah minyak solar, minyak tanah, sabun mandi/ sabun cuci, rokok dan obat-obatan ringan. Para pedagang/pemilik warung/ kedai di Desa Kojadoi dan Kojagete biasanya belanja seminggu sekali tiap hari kamis ke Kota Maumere dan Pasar Geliting dengan kapal penumpang reguler. Biaya per penumpang dari Kojadoi dan Kojagete ke Maumere PP adalah Rp 20.000,00, jarak tempuh sekitar 1 – 1,5 jam. Sementara bagi pedagang warung/ kedai dari Desa Pemana bisa berbelanja kapan saja ke Kota Maumere, sebab ada kapal reguler setiap hari. Kapal motor penumpang yang melayani rute Pemana – Maumere PP adalah KM Arung Samodra, Citrawati, Nur Arafah dan Wismawati. Kapal-kapal tersebut beroperasi bergantian, tiap hari hanya satu kapal yang melayani penumpang. Biaya rute Pemana – Kota Maumere PP adalah Rp 30.000,00, jarak tempuh selama 2 jam.

Di daerah penelitian kawasan daratan, di Desa Namangkewa dan Watumilok ada beberapa toko dan warung yang menjual berbagai kebutuhan barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Bahkan karena letaknya dekat dengan Pasar Geliting untuk belanja kebutuhan rumah tangga sehari-hari maupun menjual berbagai hasil pertanian, perikanan maupun industri kecil tidak mengalami kesulitan. Di samping itu, wilayah desa tersebut letaknya berbatasan dengan Kota Maumere, sehingga berbagai pelayanan ekonomi tidak mengalami kesulitan.

Baik di daerah penelitian kawasan pulau-pulau kecil maupun kawasan daratan belum memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang resmi. Selama ini tempat pendaratan ikan dan pelelangan/penjualan ikan segar dilakukan di Pasar Geliting. Di pasar ini merupakan tempat penjualan/ pelelangan ikan bagi nelayan baik dari Kecamatan Kewapante maupun dari luar (seperti kawasan pulau-pulau kecil). Karena belum ada TPI resmi, bagi para nelayan yang mendaratkan ikan pada siang dan sore hari langsung dijual oleh para penjaja (*papalele*) untuk diujakan di pinggir jalan raya Kecamatan Kewapante. Mereka menjajakan ikan basah tersebut dari siang sampai malam hari.

2.3.4. *Transportasi dan komunikasi*

Masih menjadi suatu perdebatan penyebab belum terbukanya atau masih terisolasinya wilayah NTT apakah disebabkan jauh dari pusat pemerintahan Jakarta ataukah karena wilayahnya merupakan kepulauan, sehingga agak tertinggal pembangunan ekonominya dibandingkan dengan wilayah-wilayah seperti di Jawa (Jones dan Rahardjo, 1997). Oleh karena itu, bahasan tentang sarana transportasi menjadi perlu karena transportasi menjadi sarana utama untuk berinteraksi dan saling keterbukaan bagi penduduk setempat atau antar wilayah. Sarana dan prasarana transportasi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu perhubungan darat, perhubungan laut dan perhubungan udara. Pada tahun 2003, untuk prasarana perhubungan darat di Kabupaten Sikka tercatat ada jalan raya sepanjang 980,32 km. Jalan raya tersebut terdiri dari jalan negara sepanjang 121,68 km; jalan provinsi 109,90 km dan jalan kabupaten 748,74 km. Sementara menurut kondisinya adalah jalan beraspal 550,58 km, jalan kerikil 31,50 km dan jalan tanah 398,24 km.

Untuk fasilitas transportasi udara, Kabupaten Sikka telah memiliki Bandar Udara (Bandara) yang diberi nama *Bandara Wai Oti Maumere*. Bandara ini mampu didarati oleh pesawat udara jenis Fokker 28. Perusahaan Penerbangan yang hingga kini melayani penumpang ke Maumere adalah Merpati Nusantara Air Lines dengan

jadwal empat kali penerbangan per minggu rute Maumere - Kupang, Maumere - Denpasar dan Jakarta. Perusahaan penerbangan lain adalah Pelita Air. Rute penerbangan yang dijalani adalah Maumere - Kupang dan Waingapu, Maumere - Surabaya, Jakarta dan Bandung tiga kali dalam seminggu.

Sektor perhubungan laut dengan pusat pelabuhannya di Maumere cukup memadai, sejumlah armada baik armada milik pemerintah maupun pelayaran rakyat dan swasta singgah ke pelabuhan tersebut. Jaringan perhubungan laut di daerah ini dilayani oleh tiga buah dermaga berkonstruksi beton dan berkapasitas 5.000 GT. Di pelabuhan tersebut dapat melakukan bongkar muat barang maupun penumpang dari pelayaran antar pulau. Jaringan transportasi laut tersebut adalah dari Maumere menuju ke Kupang, Ujung Pandang, Denpasar, Surabaya dan Jakarta.

Kemudian bagaimana kondisi fasilitas perhubungan/transportasi di wilayah penelitian? Seperti telah diungkapkan di atas bahwa di daerah penelitian kawasan pulau-pulau kecil, Desa Pemana telah memiliki dermaga untuk berlabuh kapal feri. Dermaga tersebut setiap hari disinggahi kapal feri. Dermaga ini merupakan sarana transportasi laut untuk Desa Pemana dan Desa Gunungsari. Setiap hari kapal penumpang feri berangkat dari dermaga Pemana sekitar pukul 8.00 pagi menuju Maumere. Kemudian kembali dari dermaga Maumere menuju Pemana sekitar pukul 3.00 sore. Kapal Feri tersebut merupakan milik perorangan. Dari dermaga Pemana ke pemukiman Desa Pemana dan Desa Gunungsari dilayani kendaraan ojek sepeda motor. Berbeda dengan Desa Kojadoi dan Kojagete, dua desa tersebut dilayani kapal motor reguler setiap seminggu sekali. Kapal motor reguler tersebut melayani rute Desa Kojadoi dan Kojagete menuju Maumere PP. Transportasi dari dermaga ke pemukiman di Desa Kojadoi dan Kojagete belum bisa dilayani oleh ojek.

Di daerah penelitian kawasan daratan, di Desa Namangkewa dan Watumilok transportasi laut harus melalui pelabuhan dermaga Maumere. Sedangkan untuk transportasi darat ke ibukota kabupaten dan kecamatan lain dapat menggunakan angkutan umum (minibus).

Transportasi umum ke pemukiman dapat dilayani ojek kendaraan roda dua.

Sarana komunikasi yang tersedia di Kabupaten Sikka adalah telepon kabel dan telepon seluler. Telepon kabel dan telepon seluler dapat melayani di daerah penelitian kawasan daratan melalui jaringan Mentari dan Simpati. Sementara untuk di daerah penelitian kawasan pulau-pulau kecil jaringan telepon kabel belum ada. Satu-satunya komunikasi dengan menggunakan telepon seluler. Sayangnya hanya pada tempat-tempat tertentu saja penduduk dapat memanfaatkan telepon seluler.

Sarana informasi elektronik yang ada di kabupaten ini adalah radio dan televisi. Hampir setiap penduduk memiliki radio dan juga sebagian penduduk umumnya juga memiliki pesawat TV. Namun demikian untuk pesawat TV umumnya sangat tergantung dengan persediaan listrik. Di Kecamatan Kewapante energi listrik tidak masalah karena ada listrik sebagai energi dan penerangan rumah. Namun di wilayah pedesaan dan kawasan pulau-pulau kecil seperti di Kojadoi listrik hanya kurang lebih 4 jam dari pukul 6.00 sore hingga pukul 10.00 malam. Sehingga ada keterbatasan untuk menonton TV. Demikian halnya di Desa Pemana setiap harinya juga tidak penuh, kadang sehari nyala sehari tidak. Listrik di kepulauan umumnya digerakkan oleh generator yang dibiayai bersama-sama penduduk desa itu. Sedangkan informasi melalui surat kabar tampaknya belum masuk ke daerah pulau ini, Berbeda dengan di Maumere daratan seperti Kupang Pos dan Kompas sudah sampai di kota ini. Desa-desa di Kecamatan Kewapante masyarakat dengan mudah untuk mendapatkan akses surat kabar dengan lebih mudah dibandingkan dengan desa-desa yang jauh dengan Kota Maumere.

2.3.5. Kelembagaan lain yang terkait.

Kelembagaan yang terkait langsung dengan kegiatan budi daya laut di Kabupaten Sikka adalah lembaga-lembaga keuangan, seperti bank dan koperasi. Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) dan koperasi non KUD di Kabupaten Sikka tahun 2003 ada sebanyak 107

buah. Namun KUD yang dinyatakan aktif hanya sebanyak 7 buah. Sementara koperasi non KUD yang masih aktif hanya 78 buah (Tabel 2.3.9).

Tabel 2.3.9:
Jumlah Koperasi Unit Desa dan Anggota Koperasi
di Kabupaten Sikka, 2003

Kecamatan	KUD Aktif	Non KUD Aktif	Jumlah KUD	Jumlah Anggota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Paga	1	3	4	2819
2. Mego	-	1	1	1229
3. Nita	-	5	5	2171
4. Lela	-	2	2	3217
5. Alok	1	40	41	2226
6. Maumere	1	10	11	1397
7. Kewa Pantai	1	7	8	3168
8. Talibura	1	3	4	1888
9. Waigete	1	4	5	1319
10. Bola	1	3	4	2296
11. PaluE	-	-	-	-
Sikka	7	78	85	21730

Sumber : Bappeda Kabupaten Sikka, Profil Perekonomian Daerah Kabupaten Sikka, 2004

Dalam Tabel 2.3.9 juga memperlihatkan bahwa jumlah anggota koperasi seluruhnya ada sekitar 21 730 orang. Mereka adalah para petani dan nelayan yang bergabung sebagai anggota KUD atau koperasi non KUD. Jumlah koperasi yang terbanyak adalah Kecamatan Alok dan urutan kedua adalah Kecamatan Maumere. Koperasi di Kojagete dan Kojadoi merupakan koperasi yang anggotanya termasuk nelayan budi daya rumput laut. Kelembagaan lain yang terkait dengan sarana keuangan dalam budi daya laut adalah lembaga perbankan. Kelembagaan tersebut di Kabupaten Sikka yang

menonjol adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kantor Cabang BRI Kabupaten Sikka ada di Kota Maumere.

Di daerah penelitian kawasan pulau-pulau kecil, di Desa Kojadoi terdapat sebuah koperasi simpan pinjam dan juga ada Badan Kredit Desa (BKD). Saat penelitian ini berlangsung dua lembaga tersebut masih aktif. Kelembagaan tersebut berperan membantu penduduk termasuk para nelayan dalam peminjaman modal dengan bunga yang ringan. Sementara di Kojagete juga memiliki sarana usaha ekonomi desa yang kemudian disebut “ *Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam* (UED-SP) dan juga Koperasi Simpan Pinjam. Namun koperasi tersebut kurang berjalan dengan baik, karena tidak dikelola dengan profesional. Di Desa Pemana para nelayan banyak melakukan pinjaman melalui pemilik modal, seperti pengusaha perdagangan rumput laut, pedagang ikan atau pemilik kapal (bos) yang ada di desa tersebut. Cara peminjaman uang tersebut sudah lama menjadi sesuatu kebiasaan bagi penduduk. Jadi model hubungan patron dan klien sudah lama terjadi di Desa Pemana, sehingga banyak nelayan yang hidupnya sangat tergantung pemilik modal (bos).

Di daerah penelitian kawasan daratan, di Desa Namangkewa ada lima buah Kelompok Simpan Pinjam dan Koperasi Kredit (Kopdit). Pada tahun 2004 lembaga keuangan tersebut memberikan permodalan khususnya kepada pedagang kecil dengan bunga sekitar 2,5 persen per bulan

2.4. Pengelolaan Sumber Daya Laut

2.4.1. Kebijakan

Kebijakan tentang pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di Kabupaten Sikka akan diwujudkan dalam bentuk Perda yang akan disahkan oleh DPRD. Draf tentang Perda Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut sudah ada, namun sampai penelitian dilakukan belum disahkan. Dalam Perda tersebut antara lain berisi tentang :

1. Wilayah pengelolaan sumber daya pesisir dan laut
2. Potensi sumber daya pesisir dan laut.
3. Zona pengelolaan sumber daya pesisir dan laut
4. Badan pengelola sumber daya pesisir dan laut
5. Perizinan
6. Pendanaan
7. Penyelesaian sengketa
8. Penyidikan
9. Ketentuan sanksi.

Meskipun Perda tentang pengelolaan sumber daya pesisir dan laut belum disahkan, namun Dinas Perikanan dan Kelautan dalam kegiatannya tidak harus menunggu Perda selesai disahkan. Dinas telah memiliki perencanaan-perencanaan dan program-program yang harus dilaksanakan. Dalam rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Sikka Tahun 2004-2008, Dinas Kelautan dan Perikanan menentukan 4 program, yaitu : (1). Peningkatan Sumber Daya Manusia dan pengembangan kelembagaan nelayan; (2). Peningkatan konservasi, rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan; (3). Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, pulau-pulau kecil dan pengembangan usaha perikanan; dan (4). Pengembangan sarana dan prasarana. Kegiatan program yang pertama meliputi antara lain : pelatihan nelayan di bidang penangkapan dan budi daya laut, magang kegiatan penanganan dan pengolahan hasil rumput laut, pembentukan koperasi/ kelompok/ kelembagaan nelayan. Kegiatan program kedua meliputi penyuluhan terpadu pengamanan sumber daya perikanan (DKP, Kepolisian, Kejaksaan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama), penanaman *mangrove* dan pengadaan kapal pengawasan multi fungsi. Kegiatan program ketiga antara lain pengadaan motorisasi perikanan, alat tangkap dan armada perikanan, pengadaan sarana budi daya rumput laut, pembuatan keramba jaring apung, bantuan kegiatan ekonomi produktif kepada nelayan dan *papalele* ikan dan pengembangan kemitraan usaha perikanan. Kegiatan program terakhir (ke empat) antara lain pembangunan PPI (Kecamatan Alok dan Paga), pembangunan pabrik hasil perikanan, pembangunan fasilitas

pendidikan SUPM Daerah Maumere dan pembangunan jetty di pulau-pulau – Pulau Kojadoi dan Perumaan.

Seperti yang dilakukan di daerah penelitian di wilayah Maumere, sejak tahun 2000 Dinas Perikanan dan Kelautan telah mempunyai program pengembangan rumput laut dengan memberikan penyuluhan dan peminjaman modal. Pada tahun 2002 mempunyai program bantuan alat tangkap kepada nelayan dan pengembangan budi daya rumput laut. Pada tahun 2003 mengembangkan budi daya rumput laut, pengembangan rumput, memberi bantuan alat tangkap dan pengembangan budi daya kerapu.

Di daerah penelitian wilayah Kecamatan Kewapante, pada tahun 2000 program Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sikka adalah memberikan motivasi peningkatan produksi, memberi bantuan alat tangkap. Tahun 2001 program lanjutan tahun sebelumnya, yaitu memberikan bantuan alat tangkap. Pada tahun 2003 program adalah memotivasi para nelayan, pengembangan rumput dan pemberian alat tangkap.

2.4.2. Pemanfaatan (produksi dan pemasaran)

Produksi Sumber Daya Laut

Jenis sumber daya laut yang dihasilkan dari Kabupaten Sikka dikelompokkan menjadi empat, yakni jenis ikan, jenis bukan ikan, rumput laut dan nener. Jenis ikan meliputi cakalang, tuna, layang, selar, merah, tongkol, teri, kembung, terbang dan kerapu. Jenis bukan ikan meliputi udang, cumi, gurita dan penyu. Tabel 2.4.1 menggambarkan tentang jenis-jenis sumber daya laut, jumlah produksi selama 3 tahun (2003-2005) dan nilai produksi (dalam rupiah) selama 3 tahun. Jumlah produksi ikan yang terbanyak tahun 2005 di Kabupaten Sikka adalah cakalang (3.551,5 ton) dan nilai produksi yang tertinggi juga cakalang (Rp 10.651.500.000,00). Urutan berikutnya ikan tuna produksinya mencapai 1.162,5 ton dan nilai produksinya mencapai Rp 4.068.750.000,00. Jenis ikan yang produksinya terendah adalah kerapu (125,3 ton), namun nilai

produksinya mencapai Rp 939.750.000,00. Sebaliknya ikan terbang yang produksinya lebih tinggi, yakni 275,8 ton, namun nilai produksinya hanya Rp 744.606.000,00. Ini disebabkan harga per kg ikan kerapu lebih mahal dari pada ikan terbang. Jumlah produksi hampir semua jenis ikan mengalami peningkatan selama 4 tahun, hanya cakalang yang mengalami penurunan. Penurunan produksi cakalang apakah disebabkan adanya penurunan populasi atau frekuensi nelayan melaut menurun tidak ada penjelasan.

Untuk SDL bukan ikan, produksi yang tertinggi pada tahun 2005 adalah cumi (53,3 ton) dan nilai produksinya juga tertinggi, yakni Rp 186.550.000,00. Udang jumlah produksinya terendah hanya 3,1 ton, namun nilai produksinya berada di atas gurita dan penyu yang jumlah produksinya lebih banyak. Kecenderungan produksi selama 4 tahun semua jenis SDL bukan ikan relatif tetap, sedangkan udang malah cenderung menurun.

Rumput laut jumlah produksi tahun 2005 sebesar 32 ton dan nilai produksinya mencapai Rp 166.400.000,00. Selama 3 tahun produksi rumput laut dari Kabupaten Sikka ini mengalami penurunan yang cukup berarti. Penurunan produksi mungkin terserang hama atau gangguan alam. Produksi nener data yang masuk hanya tahun 2003 sebanyak 600.000 ton dan nilai produksinya mencapai Rp 18.000.000.000,00.

Tabel 2.4.1 :
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut Menurut Jenis Biota Laut di Kabupaten Sikka, Tahun 2003 – 2005

Jenis Hasil Biota Laut	Jumlah Produksi (ton)			Nilai Produksi (Rp. 000)		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>I. Jenis ikan *</i>						
1. Cakalang	3 750,5	3.100,5	3.550,5	11.251.500	9.301.500	10.651.500
2. Tuna	859,6	1.150,5	1.162,5	3.438.360	4.026.750	4.068.750
3. Layang	789,1	825,8	825,8	2.564.575	1.651.600	1.651.600
4. Selar	756,5	878,4	878,4	1.513.000	1.756.800	1.756.800
5. Merah	150,5	275,2	275,2	1.128.750	1.376.000	1.376.000
6. Tongkol	330,4	750,4	750,4	1.073.800	1.876.000	1.876.000
7. Teri	375,5	400,5	400,5	938.750	1.001.250	1.001.250
8. Kembang	335,5	345,3	345,3	889.075	915.045	915.045
9. Terbang	205,5	275,8	275,8	554.850	744.606	744.606
10. Kerapu	53,5	125,3	125,3	428.000	939.750	939.750

Tabel lanjutan

<i>II. Bukan ikan</i>						
1. Udang	6,7	3,1	3,1	335.500	153.500	153.500
2. Cumi	53,3	53,3	53,3	186.550	186.550	186.550
3. Gurita	8,6	8,6	8,6	25.800	25.800	25.800
4. Penyu	5,4	5,4	5,4	16.200	16.200	16.200
<i>III. Rumpul laut</i>	41,8	32	32	125.340	166.400	166.400
<i>IV. Nener (ekor)</i>	600 000	-	-	18.000.000	-	-

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sikka, 2006

Pemasaran Sumber Daya Laut

Pemasaran hasil sumber daya laut di Kabupaten Sikka dijual dalam bentuk ikan hidup, ikan segar dan ikan kering. Sayangnya tidak semua jenis ikan/ SDL seperti yang dikemukakan di subbab di atas mendapatkan data tentang pemasarannya. Di sini hanya beberapa SDL yang datanya tersedia. Pemasaran ikan segar antara lain ikan tuna dikirim ke Jakarta dan Banyuwangi, ikan tenggiri dan ikan kerapu dikirim ke Denpasar. Pemasaran ikan hidup, ikan kerapu, ikan napoleon dan lobster dikirim ke Denpasar dan ikan kering biasanya ikan teri dikirim ke Kupang (Tabel 2.4.2).

Tabel 2.4.2 :

Jenis Ikan/SDL, Jumlah Produksi dan Daerah Pemasaran, Kabupaten Sikka, Tahun 2003

Jenis Ikan/SDL	Jumlah Produksi (Kg)	Tujuan Pemasaran
(1)	(2)	(3)
1. Ikan tuna (segar)	1.492.000	Jakarta dan Banyuwangi
2. Ikan tenggiri (segar)	1.581	Denpasar
3. Ikan kerapu (segar)	3.500	Denpasar
4. Ikan kerapu (hidup)	425	Denpasar
5. Ikan teri (kering)	15.000	Kupang
6. Ikan kayu	80.000	Makasar
7. Ikan napoleon (hidup)	873	Denpasar
8. Lobster (hidup)	3.619	Denpasar
9. Nener	1.510.000	Makasar
10. Anakan kering mutiara (hidup)	1.510.000	Mataram

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Sikka, 2003

2.4.3. Wilayah tangkap

- *Kawasan pulau-pulau kecil*

Bagi nelayan armada tradisional di kawasan pulau-pulau kecil, para nelayan hanya menggunakan sampan tanpa motor, biasanya wilayah tangkapannya tidak jauh dari pantai/ di sekitar pulau-pulau kecil. Mereka juga menangkap ikan di perairan terumbu karang yang tidak jauh dari pantai. Para nelayan tradisional ini kebanyakan berasal dari Desa Kojadoi dan Kojagete. Para nelayan tersebut setelah usaha budi daya rumput laut berkembang, dalam beberapa tahun terakhir telah banyak yang beralih ke usaha tersebut sebagai pekerjaan utamanya. Sementara kegiatan melaut mencari ikan hanya sebagai pekerjaan tambahan yang hasilnya tidak lagi dijual ke pasar. Hasil dari melaut hanya untuk konsumsi sendiri dan apabila berlebih dijual ke tetangga.

Nelayan armada kapal motor kebanyakan dilakukan oleh para nelayan Desa Pemanan. Mereka biasanya melaut di laut dalam dan memerlukan waktu sampai beberapa hari sampai satu minggu lebih. Hasil tangkapan antara lain ikan tuna, ikan cakalang dan ikan layang-layang, biasanya di jual di tengah laut kepada pengumpul/ pedagang, kadang juga dibawa ke Pasar Gelinting. Wilayah tangkapannya cukup jauh mulai dari perairan di Teluk Flores, perairan Larantuka, perairan Lombok dan perairan Maluku Tenggara. Karena kapalnya besar jumlah anak buah kapalnya juga banyak lebih dari 5 orang.

- *Kawasan daratan*

Bagi nelayan armada tradisional kawasan daratan (di Desa Namangkewa dan Watumilok - Kecamatan Kewapante), wilayah perairan tangkap seperti di kawasan pulau-pulau kecil juga di laut dangkal, terutama di dekat pesisir atau tidak jauh dari pantai. Armada yang digunakan juga sama hanya menggunakan sampan tanpa motor. Wilayah tangkapan mereka hanya di Teluk Flores, tidak berani jauh di luar teluk. Bagi nelayan armada kapal motor, wilayah

tangkapannya cukup jauh hampir sama dengan para nelayan dari Desa Pemana. Menurut para informan di Desa Namangkewa dan Watumilok wilayah tangkapan para nelayan armada kapal motor ini adalah sekitar Pulau PaluE, perairan Lanrantuka, dan perairan di Maluku Tenggara.

2.4.4. Teknologi

Armada kapal nelayan

Armada yang digunakan para nelayan di Kabupaten Sikka meliputi perahu motor tempel, perahu papan kecil (sampan) dan jukung. Perahu papan kecil biasanya digunakan oleh nelayan-nelayan di laut dangkal atau nelayan tradisional. Jumlah perahu papan kecil/sampan di kabupaten ini mencapai sebanyak 2.906. Dengan jumlah rumah tangga nelayan di Kabupaten Sikka tahun 2005 sebanyak 3.995, berarti hampir tiap rumah tangga nelayan memiliki satu sampan. Tabel 2.4.3 menunjukkan bahwa jumlah sampan yang dikuasai dan jumlah sampan yang dimiliki sekaligus juga dikuasai jumlahnya sama. Ini berarti tidak ada nelayan yang menyewa atau meminjam sampan orang lain, jadi sampan yang mereka miliki juga dikuasai sendiri.

Jumlah perahu motor tempel di Kabupaten Sikka ada sebanyak 636 unit. Jenis kapal ini yang mampu digunakan untuk menangkap ikan di laut dalam. Jumlah perahu motor tempel tersebut apabila dibandingkan dengan jumlah rumah tangga nelayan, berarti setiap 6 rumah tangga nelayan ada satu kapal motor tempel. Karena harga kapal motor tempel cukup mahal tidak semua rumah tangga nelayan mampu membeli kapal tersebut. Dengan melihat jumlah kapal motor yang dikuasai sama dengan yang dimiliki sekaligus menguasai, berarti juga tidak ada rumah tangga nelayan yang menyewa atau meminjam kapal nelayan lain.

Alat tangkap

Alat tangkap yang dimiliki dan dikuasai oleh para nelayan di Kabupaten Sikka meliputi antara lain pukat tarik, pukat kantong, jaring insang dan pancing. Di antara alat tangkap tersebut yang terbanyak dimiliki dan dikuasai adalah pancing (Tabel 2.4.3). Pancing di seluruh kabupaten ini tercatat sebanyak 3.680 unit. Dengan jumlah tersebut berarti setiap rumah tangga nelayan memiliki dan menguasai satu unit pancing. Jumlah jaring insang adalah 837 unit atau setiap 5 rumah tangga memiliki dan menguasai satu unit jaring insang. Jumlah pukat kantong ada sebanyak 424 unit atau setiap 9 rumah tangga nelayan memiliki dan menguasai satu unit pukat kantong. Khusus untuk pukat tarik yang dapat dikuasai para nelayan di Kabupaten Sikka hanya 381 unit. Sementara jumlah pukat tarik yang dimiliki dan dikuasai hanya 328 unit. Ini berarti ada 53 unit pukat tarik yang harus disewa dari para pemilik. Nampaknya mereka harus menyewa atau meminjam pukat tarik kepada orang lain sebab jenis alat tangkap ini harganya lebih mahal dibandingkan alat tangkap lainnya.

Tabel 2.4.3 :
Jumlah Armada Kapal Nelayan dan Alat Tangkap
di Kab. Sikka, 2005

No	Jenis Armada Kapal & Alat Tangkap	Jumlah dikuasai	Jumlah dimiliki & dikuasai
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Armada Kapal Nelayan :		
	1. Perahu motor tempel	636	636
	2. Perahu papan kecil	2.906	2.906
	3. Jukung	180	180
B.	Alat Tangkap :		
	1. Pukat tarik	381	328
	2. Pukat kantong	424	424
	3. Jaring insang	837	837
	4. Pancing	3.680	3.680
	5. Lainnya	265	265

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sikka, 2005

Teknologi pengolahan

Di Kabupaten Sikka hasil tangkapan sumber daya laut, khususnya ikan umumnya dijual dalam bentuk ikan segar, ada sebagian yang dijual dalam bentuk ikan hidup dan hanya jenis ikan teri yang memerlukan proses perebusan, penggaraman dan pengeringan. Selama ini tidak ada pengolahan ikan pasca penangkapan. Hasil tangkapan di laut langsung dimasukkan peti es atau ditaburi es agar lebih bertahan lama. Kemudian langsung dijual ke pedagang pengumpul yang mendatangi atau dibawa ke pasar ikan di Pasar Geliting atau ke pedagang pengumpul. Di Maumere pengumpul ikan yang cukup besar adalah PT Mitramas. Sementara bagi para nelayan tradisional hasil tangkapan ikan biasanya langsung di pasarkan kepada konsumen. Di Desa Nawangkewa dan Watumilok, Kecamatan Kewapante para nelayan tradisional biasanya begitu ikan didaratkan langsung diserbu para penjual eceran (*papalele*). Para penjual eceran tersebut yang selanjutnya menjajakan langsung di pinggir-pinggir jalan kepada para konsumen. Setiap sore sampai malam hari biasanya para penjaja ikan segar ada yang berkeliaran dan ada yang menggelar dagangannya di atas meja di pinggir jalan raya Kewapante .

2.4.5. Permasalahan dalam pengelolaan sumber daya laut

Dengan belum disahkannya Perda pengelolaan sumber daya pesisir dan laut menjadi kendala bagi Dinas Perikanan dan Kelautan untuk mengadakan pembinaan kepada masyarakat pesisir atau kepulauan sebab belum ada undang-undang yang melindunginya. Kendala tersebut juga dialami oleh instansi-instansi terkait, seperti kepolisian dan keamanan laut serta pengadilan, apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat belum ada payung hukum bagaimana cara pengusutannya, penindakannya dan pengadilannya.



BAB III

PROFIL SOSIO-DEMOGRAFI PENDUDUK

Dalam bab ini membahas tentang profil sosio-demografi penduduk daerah penelitian dari tingkat makro kabupaten sampai tingkat kawasan yang menjadi fokus penelitian. Dalam aspek demografi menyajikan tentang kuantitas penduduk yang meliputi jumlah dan struktur penduduk daerah penelitian. Sedangkan dalam kualitas penduduk menyajikan tentang uraian pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki penduduk daerah penelitian. Dalam aspek sosial membahas tentang lapangan dan jenis pekerjaan penduduk serta kesejahteraan penduduk di daerah penelitian.

3.1. Jumlah dan Komposisi Penduduk

3.1.1. Tingkat kabupaten

Jumlah penduduk Kabupaten Sikka pada tahun 1980 adalah sebanyak 219.656 orang. Dalam dasa warsa berikutnya (1990) menjadi 246.771 orang dan selanjutnya mencapai 262.656 orang pada tahun 2000. Menurut data terakhir yang tersedia di Bappeda maupun BPS Kabupaten Sikka pada tahun 2005 jumlah penduduk kabupaten tersebut menjadi 282 795 orang. Dengan melihat penyebarannya ternyata yang paling banyak penduduknya di Kecamatan Alok. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Maumere (daratan) yang merupakan ibukota kabupaten. Jumlah penduduk di Kecamatan Maumere lebih rendah dibandingkan dengan Alok, sebab sebagian penduduk Kecamatan Maumere merupakan kepulauan dan penduduknya tidak banyak.

Kemudian tingkat pertumbuhan penduduk selama kurun hampir 25 tahun, pada periode 1980-1990 pertumbuhan penduduk Kabupaten Sikka sebesar 1,62 persen. Pada periode tahun 90an ternyata pertumbuhannya menurun menjadi 1,17 persen. Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu sebagai dampak dari hasil program penurunan kelahiran melalui program keluarga berencana yang telah mampu menurunkan angka kelahiran. Sebab kedua terjadinya arus migrasi penduduk ke luar kabupaten, mengingat daerah ini kebanyakan merupakan daerah-daerah miskin. Diperkirakan kaum mudanya banyak yang ke luar daerah untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi. Pada periode berikutnya awal tahun 2000an, ternyata telah terjadi peningkatan tingkat pertumbuhan dari 1,17 persen menjadi 1,5 persen. Penyebabnya kemungkinan karena pelaksanaan program penurunan kelahiran melalui program keluarga berencana mengalami kemunduran. Seiring dengan adanya era otonomi daerah, dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kabupaten Sikka tahun 2004-2008, memang termasuk salah satu program prioritas yang masuk dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana. Namun program keluarga berencana tersebut masih kurang mendapatkan perhatian dana yang memadai dibandingkan pada era sebelum krisis ekonomi. Dilihat dari tingkat pertumbuhan penduduk tiap kecamatan, ternyata yang paling tinggi tingkat pertumbuhannya adalah Kecamatan Alok. Kecamatan yang pertumbuhannya rendah adalah Paga (0,7 persen), Talibura (0,9 persen) dan Nita (0,9 persen), Nampaknya di 3 kecamatan tersebut banyak penduduk mudanya yang melakukan mobilitas ke luar.

Tabel 3.1.1 :
Jumlah, Penyebaran dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk
Di Kabupaten Sikka.

Kecamatan	Jumlah Penduduk				Tingkat Pertumbuhan		
	1980	1990	2000	2005	'80-'90	'90-'00	'00-'05
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Paga	33 014	35 260	35 696	37 244	0,73	0,12	0,7
2. Lela	11 305	11 550	11 139	12 325	0,24	-0,36	2,6
3. Bola	25 257	27 088	27 357	29 292	0,81	0,10	1,5
4. Talibura	32 233	37 380	42 344	44 483	2,08	1,25	0,9
5. Kewapante	31 761	33 877	34 185	36 428	0,72	0,09	1,4
6. Maumere	35 662	34 613	32 825	35 661	-0,33	-0,53	2,0
7. Nita	23 718	26 752	29 152	30 617	1,90	0,86	0,9
8. Alok	26 706	40 251	49 958	56 745	5,26	2,16	3,5
Kab. Sikka	219 656	246 771	262 656	282 795	1,62	1,17	1,5

Sumber : BPS Kab. Sikka, Penduduk Kabupaten Sikka 2006.

Luas wilayah Kabupaten Sikka adalah 1.731,91 km² dan tingkat kepadatan penduduk di kabupaten tersebut sebesar 152 orang/km² pada tahun 2000 dan kemudian meningkat menjadi 163 orang/km² pada tahun 2005. Penyebaran menurut wilayah kecamatan luas wilayah kecamatan yang paling sempit adalah Kecamatan Alok hanya 76,39 km². Namun karena penduduknya terbanyak, maka tingkat kepadatan penduduknya menjadi paling tinggi, yaitu 746 orang/km² pada tahun 2005. Pada tahun yang sama bandingkan dengan Kecamatan Talibura (71 orang/km²) dan Kecamatan Nita (99 orang/km²). Maumere sebagai kecamatan di ibukota kabupaten tidak begitu padat (207 orang/km²) karena seperti telah diungkap di atas memiliki wilayah kepulauan yang penduduknya hanya sedikit-sedikit.

Tabel 3.1. 2 :
Luas Wilayah, Jumlah dan Tingkat Kepadatan Penduduk
Di Kabupaten Sikka

Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk		Tingkat Kepadatan Penduduk	
		2000	2005	2000	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1. Paga	273,89	35 696	37 244	130	136
2. Lela	31,33	11 139	12 325	356	397
3. Bola	168,26	27 357	29 292	163	174
4. Talibura	622,12	42 344	44 483	68	71
5. Kewapante	80,15	34 185	36 428	427	455
6. Maumere	172,55	32 825	35 661	190	207
7. Nita	307,22	29 152	30 617	95	99
8. Alok	76,39	49 958	56 745	654	746
Kab. Sikka	1 731,91	262 656	282 795	152	163

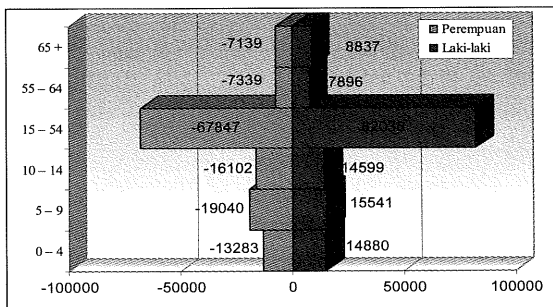
Sumber : BPS Kab. Sikka, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab.Sikka 2006.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Sikka tahun 2005 dapat dilihat dari Tabel 3.1.3. Tabel tersebut menunjukkan bahwa proporsi penduduk kelompok umur muda di kabupaten ini masih cukup tinggi. Sekitar 34 persen penduduk di kabupaten ini berada kelompok umur muda. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa struktur penduduk di kabupaten ini masih dalam penduduk muda. Sehingga pertumbuhan penduduk di masa mendatang masih akan tinggi. Jumlah penduduk usia produktif penuh (15 – 64 tahun) sebesar 60,1 persen. Tingkat beban ketergantungan yang merupakan jumlah penduduk yang masih menjadi beban terhadap penduduk usia produktif sebesar 66,4 persen. Ini berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif penuh harus menanggung sekitar 66 orang yang tidak/ kurang produktif, di samping

menanggung dirinya. Dengan melihat angka beban ketergantungan masih di atas 60, berarti masih dianggap cukup tinggi.

Menurut jenis kelamin, membandingkan komposisi umur antara penduduk laki-laki dan perempuan menunjukkan gambaran yang menarik. Tabel 3.1.3 memperlihatkan bahwa ternyata kelompok penduduk pada usia 15-54 tahun atau pada penduduk usia kerja pada laki-laki jumlah absolut maupun angka persentasenya jauh di bawah penduduk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak penduduk laki-laki usia kerja bermobilitas ke luar atau meninggalkan daerahnya. Mereka mencari kehidupan ke daerah lain, kabupaten lain atau bahkan ke propinsi lain. Dari berbagai informasi dari para informan juga menyebutkan bahwa banyak kaum muda di daerah ini yang meninggalkan desanya merantau ke lain kabupaten, provinsi bahkan ke negara lain. Ke provinsi lain antara lain mereka merantau ke Pulau Jawa, Bali, Sulawesi dan Kalimantan. Ke negara lain sebagai TKI ke Malaysia, Singapore dan Brunei. Sedangkan penduduk yang di pulau-pulau kecil juga banyak yang merantau dan sebagian dari mereka ada yang hanya beberapa minggu atau bulan berlayar dari pulau ke pulau. Mereka berdagang dari pulau ke pulau dan di antara mereka pulang membawa barang dagangan berupa pakaian bekas dan barang-barang elektronik. Biasanya mereka membeli barang dagangan tersebut dari Singapore atau Malaysia.

Gambar 5 :
Diagram Distribusi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin, di Kabupaten Sikka, Tahun 2005



Sumber: BPS Kab. Sikka, Indikator KesejahteraanRakyat Kab. Sikka 2006.

Tabel 3.1.3 :
Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Sikka Tahun 2005

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Absolut	Persen	Absolut	Persen	Absolut	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 – 4	13 283	10,2	14 880	10,3	29 010	10,3
5 – 9	19 040	14,6	15 541	10,8	35 621	12,6
10 – 14	16 102	12,3	14 599	10,1	31 624	11,2
15 – 54	67 847	51,9	82 036	57,0	154 391	54,6
55 – 64	7 339	5,6	7 896	5,5	15 693	5,5
65 +	7 139	5,5	8 837	6,1	16 456	5,8
Jumlah	134 682	100,0	148 113	100,0	282 795	100,0

Sumber : BPS Kab. Sikka, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab. Sikka 2006.

3.1.2. Tingkat kawasan penelitian

- *Tingkat kawasan pulau-pulau kecil (Kecamatan Maumere)*

Luas Kecamatan Maumere mencapai sekitar 172,5 km², sedangkan jumlah penduduknya dari data terakhir yang tersedia pada tahun 2005 sebanyak 35.661 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Maumere mencapai 207 orang/ km². Rata-rata jumlah anggota rumah tangga sudah tidak begitu tinggi sebesar 3,9 orang. Apabila diasumsikan satu rumah tangga ada suami dan isteri, maka rata-rata anggota keluarganya lainnya hanya 2 orang saja.

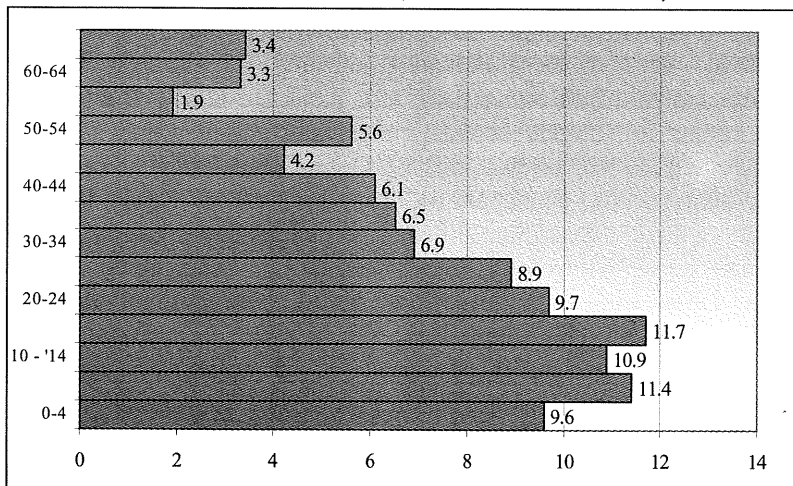
Gambar 6 :
Pemukiman Nelayan Desa Kojadoi, Kecamatan Maumere



Di 3 desa lokasi penelitian di Kecamatan Maumere wilayah yang terluas adalah Desa Kojagete sekitar 32 km², Desa Kojadoi sekitar 26 km² dan yang tersempit adalah Desa Pemana hanya 2,5 km². Mengenai jumlah penduduknya pada tahun 2003 yang terbanyak justru di Desa Pemana mencapai 3.556 orang, di Desa Kojadoi hanya 1.290 orang dan Desa Kojagete hanya 1.085 orang. Oleh karena itu, tingkat kepadatannya yang paling tinggi adalah di Desa Pemana (1.422 orang/km²). Di Desa Kojadoi tingkat kepadatan penduduknya hanya mencapai 48 orang/km² dan di Kojagete hanya 32 orang/km². Meskipun tingkat kepadatannya rendah namun sebagian besar wilayahnya hanya perbukitan yang tandus, hanya sedikit lahan yang dapat digunakan untuk permukiman dan lahan pertanian. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa di Desa Pemana yang sering terjadi konflik permasalahan lahan untuk permukiman. Hal ini juga terlihat dari paling tingginya rata-rata jumlah anggota rumah tangga dibandingkan di desa sampel lainnya. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Desa Pemana telah mencapai 4,4 orang, di desa ini paling banyak dibandingkan 2 desa sampel yang lain.

Dari hasil penelitian di dua daerah kawasan menunjukkan bahwa ternyata struktur penduduk menurut umur tidak begitu berbeda (Tabel 3.1.4). Di daerah penelitian Kecamatan Maumere proporsi penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) sebesar 31,9 persen. Dengan melihat proporsi penduduk kelompok usia muda tersebut menunjukkan bahwa di daerah penelitian masih termasuk struktur penduduk muda. Ini berarti bahwa tingkat fertilitas penduduk di daerah penelitian selama 15 tahun terakhir masih termasuk tinggi. Namun dalam lima belas tahun terakhir tersebut nampaknya ada kecenderungan penurunan (Gambar 7). Di daerah penelitian Kecamatan Maumere kelompok umur 10-14 tahun mencapai sebesar 10,9 persen, pada kelompok umur 5-9 tahun masih sebesar 11,4 persen. Sementara kelompok umur 0-4 tahun telah menurun menjadi 9,6 persen. Namun pada kelompok umur usia kerja di Maumere sebesar 64,7 persen. Kelompok lansia (lanjut usia) (65 tahun ke atas) di Maumere sedikit lebih rendah 3,4 persen. Tingkat beban ketergantungan di Maumere telah menunjukkan sedikit lebih rendah 54,6 persen.

Gambar 7 :
Diagram Distribusi Penduduk Menurut Umur di Daerah Penelitian
Kawasan Pulau-Pulau Kecil, Kecamatan Maumere, 2006



Sumber: Data Primer : Survei Data Dasar Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006

Tabel 3.1.4 :
**Komposisi Penduduk Sampel Menurut Umur di Kawasan Pulau-Pulau
 Kecil dan Kawasan Daratan, Kabupaten Sikka, 2006**

Umur	Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Kec. Maumere)		Kawasan Daratan (Kec.Kewapante)		Jumlah	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-4	41	9,6	46	9,2	87	9,3
5-9	49	11,4	54	10,8	103	11,0
10-14	47	10,9	60	12,0	107	11,5
15-19	50	11,7	67	13,4	117	12,5
20-24	42	9,7	48	9,6	90	9,6
25-29	38	8,9	28	5,6	66	7,1
30-34	30	6,9	33	6,6	63	6,7
35-39	28	6,5	34	6,8	62	6,6
40-44	26	6,1	32	6,4	58	6,2
45-49	18	4,2	34	6,8	52	5,6
50-54	24	5,6	18	3,6	42	4,5
55-59	8	1,9	12	2,4	20	2,1
60-64	14	3,3	16	3,2	30	3,2
65 +	15	3,4	22	4,4	37	4,0
JUMLAH	430	100,0	504	100,0	934	100,0

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer

Suku dan mobilitas penduduk – Sebagian besar penduduk di daerah penelitian Kecamatan Maumere adalah suku Buton dan Bugis. Indikasi suku tersebut masih nampak pada nama-nama mereka. Di mana nama warga laki-laki diawali dengan *La* dan nama warga perempuan diawali dengan *Wa*. Umumnya mereka memeluk agama Islam. Nenek moyang atau orang tua mereka adalah migran/pendatang dari Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Penduduk yang ada sekarang adalah anak keturunan migran asal dari dua provinsi tersebut. Bahasa pengantar antar mereka adalah bahasa

Buton atau bahasa Bugis. Sebagian kecil penduduk yang lain adalah suku Sikka. Mereka pada mulanya juga pendatang dari Flores daratan. Agama yang dipeluk umumnya Kristen dan bahasa yang digunakan sehari-hari bahasa Sikka.

Tabel 3.1.5 :
Luas Wilayah, Jumlah dan Tingkat Kepadatan Penduduk serta Rata-rata Besarnya Anggota Rumah Tangga Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Maumere, 2003

Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk	Tingkat Kepadatan Penduduk	Rata- rata Anggota RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Koting C	3,87	1 092	282	3,6
2. Koting D	8,36	1 682	201	4,1
3. Nelle Wutung	3,42	1 433	419	3,7
4. Nelle Lorang	1,32	1 181	894	3,7
5. Manubura	3,28	1 094	333	4,0
6. Nelle Barat	3,23	714	221	3,6
7. Paubeker	3,25	703	216	4,0
8. Koting B	2,72	1 114	409	3,8
9. Koting A	2,89	1 332	461	3,4
10. Ribang	2,47	667	270	4,0
11. Nelle Urung	3,40	1 087	319	3,5
12. Watugong	10,27	2 261	220	3,7
13. Kojadoi	26,54	1 290	48	3,9
14. Kojagete	34,224	1 085	32	4,2
15. Pemana	2,50	3 556	1 422	4,4
16. Parumaan	12,0	1 718	143	3,8
17. Gunungsari	2,10	1 211	577	4,2
18. Samparong	3,63	801	220	4,5
19. Lepolima	2,06	964	468	4,2
Kec. Maumere	131,55	24 985	189	3,9

Sumber : BPS Kab. Sikka, Penduduk Kab. Sikka Tahun 2003 : Hasil Registrasi Penduduk Akhir Tahun.

- *Kawasan daratan (Kecamatan Kewapante)*

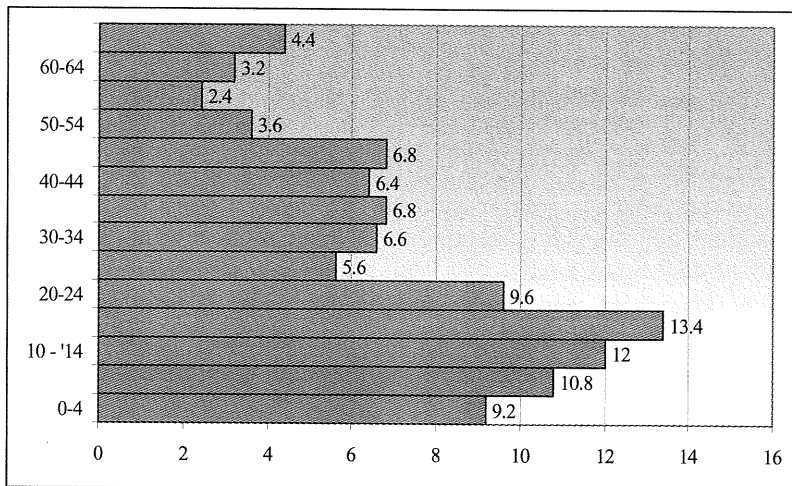
Di Kecamatan Kewapante luas wilayah mencapai sekitar 80 km², jumlah penduduk pada tahun 2005 mencapai 36 428 orang. Sehingga tingkat kepadatan penduduk sebesar 455 orang/km², angka tersebut jauh di atas Kecamatan Maumere (Tabel 3.1.5). Di wilayah kecamatan ini luas arealnya lebih sempit dari pada Kecamatan Maumere, namun jumlah penduduknya lebih banyak. Rata-rata jumlah anggota rumah tangganyapun juga masih cukup tinggi, yaitu 4,3 orang.

Luas wilayah di desa sampel, Namangkewa dan Watumilok masing-masing hanya 1,65 km² dan 2,04 km². Sedangkan jumlah penduduknya pada tahun 2003 di Desa Namangkewa telah mencapai 2.417 orang dan di Desa Watumilok sebanyak 1.874 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Namangkewa telah mencapai angka di atas 1000 (1.464 orang/km²) dan Watumilok sebesar 918 orang/ km². Akibat kepadatan penduduk yang tinggi rata-rata jumlah anggota rumah tangga di dua desa tersebut cukup tinggi, di Desa Namangkewa masih mencapai 4,8 orang dan Watumilok sebesar 4,4 orang.

Komposisi penduduk di daerah penelitian Kewapante tidak begitu berbeda dengan di Maumere. Kelompok penduduk usia muda (di bawah 15 tahun) masih menunjukkan angka yang cukup tinggi, yakni sebesar 32 persen (Tabel 3.1.4). Sebagaimana di Maumere penduduk daerah penelitian Kewapante masih termasuk kategori struktur penduduk muda, di mana angka kelahiran masih termasuk tinggi. Namun dilihat dari perubahan dari kelompok umur satu ke kelompok lainnya ada kecenderungan adanya penurunan tingkat fertilitas terutama selama 15 tahun terakhir. Pada kelompok umur 10-14 tahun pada tahun 2006 ini sebesar 12 persen. Kemudian cenderung menurun pada kelompok umur di bawahnya (5-9 tahun) sebesar 10,8 persen. Angka tersebut terus menurun menjadi hanya 9,2 persen pada kelompok umur 0-4 tahun (Gambar 8). Ini menunjukkan bahwa selama kurun 15 tahun terakhir ada penurunan angka fertilitas yang cukup nyata, meskipun masih juga tinggi. Jumlah penduduk usia kerja

di Kewapante telah mencapai 63,6 persen. Sedangkan besarnya penduduk lanjut usia (lansia) mencapai 4,4 persen, suatu angka yang belum tinggi. Tingkat beban ketergantungan di Kewapante masih mencapai 57,2 persen, jadi masih agak tinggi.

Gambar 8 :
Diagram Distribusi Penduduk Menurut Umur Daerah
Penelitian Kawasan Daratan, Kecamatan Kewapante, 2006



Sumber : Data Primer : Survei Data Dasar Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006

Suku dan mobilitas penduduk – Sebagian penduduk di daerah penelitian di Kecamatan Kewapante ada suku Bugis dan sebagian yang lain suku Sikka. Penduduk suku Bugis awal mulanya merupakan migran/ pendatang dari Sulawesi Selatan. Mereka masih memeluk agama Islam. Sedangkan suku Sikka merupakan penduduk asli daerah penelitian dan agama mereka adalah Kristen. Bahasa sehari-hari yang sering digunakan adalah bahasa Sikka.

Tabel 3.1.6 :
Luas Wilayah, Jumlah dan Tingkat Kepadatan Penduduk serta Rata-rata Besarnya Anggota Rumah Tangga Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Kewapante, 2003

Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (orang)	Tingkat Kepadatan Penduduk	Rata-rata Anggota RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Tekaiku	7,43	1 390	187	3,7
2. Mekendetung	5,27	1 742	330	4,2
3. Blatatatin	6,87	1 477	215	4,7
4. Kokowahor	2,19	1 410	644	3,7
5. Umagera	1,74	923	530	4,5
6. Iantena	8,33	1 843	221	4,5
7. Kopong	4,86	1 198	246	5,1
8. Seusina	2,05	1 061	517	4,5
9. Hewokloang	1,96	941	480	4,6
10. Heopuat	2,01	887	441	3,9
11. Wolomapa	1,08	1 014	939	4,7
12. Rubit	2,04	1 219	597	4,6
13. Kajowair	4,71	1 612	342	4,8
14. Namangkewa	1,65	2 417	1 464	4,8
15. Watumilok	2,04	1 874	918	4,4
16. Tanaduen	4,07	1 845	453	4,7
17. Watuliwung	2,71	1 864	687	4,3
18. Habi	3,92	1 746	445	4,0
19. Langir	3,93	2 036	518	3,6
20. Baomekot	1,07	1 162	1 085	4,1
21. Munerana	4,71	1 056	224	3,4
22. Waiara	1,78	1 968	1 105	4,5
23. Geliting	1,71	1 611	942	4,1
24. Wairkoja	2,02	1 322	654	4,1
Kec.Kewapante	80,15	35 618	444	4,3

Sumber : BPS Kab. Sikka, Penduduk Kab. Sikka Tahun 2003 : Hasil Registrasi Penduduk Akhir Tahun.

3.2. Pendidikan dan Ketrampilan Penduduk

3.2.1. Pendidikan penduduk

Tabel 3.2.1 menunjukkan bahwa tingkat capaian pendidikan di Kabupaten Sikka pada tahun 2001 persentase terbesar (44,8 persen) masih pada kelompok penduduk yang belum tamat SD. Data tahun 2003 masih menunjukkan mereka yang belum tamat SD tersebut persentasenya masih tertinggi (41,9 persen), namun sedikit mengalami penurunan. Selama 2 tahun mereka yang menamatkan SD juga mengalami penurunan dari sekitar 28,7 persen (tahun 2001) menjadi 27,4 persen (tahun 2003). Namun sebaliknya mereka yang tamat SLTP dan SMTA ternyata mengalami peningkatan, yakni SMTP dari 8,1 persen menjadi 10,1 persen dan SMTA dari 7,9 persen menjadi 9,0 persen. Demikian halnya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi juga menunjukkan adanya peningkatan. Perbaikan capaian pendidikan tersebut karena semakin membaiknya anggaran pendidikan dan dorongan program pemerintah.

Tabel 3.2.1
Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2001-2003
(Persen)

Pendidikan	Tahun 2001	Tahun 2003
(1)	(2)	(3)
1. Tidak/belum Sekolah	9,3	8,9
2. Belum Tamat SD	44,8	41,9
3. Tamat Sd	28,5	27,4
4. Tamat SMTP	8,1	10,1
5. Tamat SMTA	7,9	9,0
6. Diploma 1- III	0,6	1,4
7. DIV/Sarjana, S2/S3	0,8	1,2
Jumlah	100,0	100,00
(N)	(189 103)	(211 795)

Sumber : BPS Kabupaten Siika, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sikka 2003

Pada Tabel 3.2.2 menunjukkan tingkat partisipasi sekolah pada penduduk 7 tahun hingga 24 tahun. Mereka yang berada di usia 7 hingga 12 tahun diasumsikan mereka masuk sekolah dasar. Di Kabupaten Sikka kelompok usia SD tersebut ada sekitar 39 persen ternyata tidak atau belum sekolah. Sedangkan yang diprediksikan tidak akan sekolah lagi 2,4 persen. Angka persentase yang tidak sekolah lagi tersebut terus meningkat pada kelompok usia di atasnya. Logikanya adalah pada jenjang yang semakin tinggi tingkat pendidikan akan cenderung makin tidak bisa mengikuti lagi. Hal ini terkait dengan kemampuan untuk membiayai sekolah, tingkat kemampuan dan motivasi bersekolah. Mereka yang mestinya mengikuti perguruan tinggi (usia 19-24 tahun) ternyata yang dapat mengikuti hanya 2,3 persen.

Tabel 3.2.2 :
Penduduk Berumur 7-24 Menurut Partisipasi Sekolah
Di Kabupaten Sikka, 2003 (Persen).

Kelompok Umur	Belum /Tak Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
7-12	39,0	65,6	2,4
13-15	12,2	20,6	13,3
16-18	24,5	11,5	25,8
19-24	24,3	2,33	58,5
Jumlah	100,0	100,0	100,0
(N)	(3.847)	(57.852)	(34.638)

Sumber : Survei Sosial Ekonomi, 2003, Indikator Kesra 2003

Angka partisipasi kasar (APK) adalah angka partisipasi sekolah dari penduduk tanpa memperhitungkan usia sekolah siswa. Angka ini umumnya dihitung berdasarkan kepada jumlah penduduk yang sedang berstatus sekolah pada jenjang sekolah tertentu dibagi dengan penduduk pada usia sekolah juga pada jenjang tertentu. Oleh

karena itu, hasil perhitungannya ada yang melebihi dari 100 persen. Ini artinya adalah ada sejumlah penduduk usia muda yang masih duduk di bangku sekolah, namun usia mereka ada di luar kelompok usia sekolah. Gambaran ini menunjukkan bahwa pada tahun 2002 partisipasi sekolah di Kabupaten Sikka sebesar 111, kemudian menurun menjadi 102. (tahun 2003). Gambaran itu bukan berarti bahwa tingkat partisipasi penduduk bersekolah di SD menurun, tetapi lebih pada jumlah penduduk usia muda yang ada di luar usia 7-12 tahun mungkin semakin berkurang.

Sedangkan pada jenjang di SMP dan SLTA angka partisipasi sekolahnya menunjukkan peningkatan. Ini memperlihatkan bahwa secara kuantitatif pembangunan pendidikan di Kabupaten Sikka mengalami peningkatan yang berarti. Partisipasi sekolah pada jenjang SMP misalnya 60 persen telah memperoleh pendidikan, artinya bahwa ada sekitar 40 persen yang terpaksa tidak bersekolah. Demikian juga pada tingkat SMA ada penurunan dari tahun 2002 dan tahun 2003. Penurunan ini tampaknya dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi penduduk yang mengalami penurunan.

Di daerah penelitian kawasan pulau-pulau kecil, di Desa Kojadoi ada peningkatan mereka yang melanjutkan pendidikan di jenjang SMP. Peningkatan tersebut terkait dengan telah tersedianya fasilitas SMP di desa tersebut, karena telah dibangun gedung SMP Negeri di desa tersebut.

Tabel 3.2.3 :
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Sikka, (2002-2003)

Jenjang Pendidikan	Tahun 2002	Tahun 2003
(1)	(2)	(3)
Sekolah dasar (SD)	111,0	102,7
Sekolah Menengah Pertama	58,6	60,4
Sekolah Menengah Atas	61,4	43,7

Sumber : *Survei Sosial Ekonomi, 2003, Indikator Kesra, Kab Sikka, 2003*

Tabel 3.2.4. menggambarkan distribusi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan. Di Kecamatan Maumere penduduk yang mencapai tamat SD sekitar 75 persen. Di daerah penelitian kawasan pulau-pulau kecil, di Desa Kojadoi penduduk yang menamatkan tingkat SD tersebut sekitar 81 persen, di Pemana sekitar 78 persen dan di Kojagete 75,5 persen. Di Kecamatan Maumere penduduk yang tamat SMTA telah mencapai sekitar 11 persen dan perguruan tinggi 2,1 persen. Di Kojagete kondisinya cukup baik penduduk yang tamat SMTA juga sekitar 11 persen dan yang tamat perguruan tinggi sekitar 2 persen. Kondisi sedikit di bawahnya di Pemana penduduk tamat SMTA 10,8 persen dan tamat perguruan tinggi 1,3 persen, sementara di Kojadoi lebih rendah lagi penduduk yang tamat SMTA hanya 4,4 persen dan yang tamat perguruan tinggi hanya sekitar satu persen.

Pendidikan penduduk di Kecamatan Kewapante menunjukkan kondisi lebih baik. Penduduk yang tamat SD hanya mencapai 71 persen. Di daerah penelitian kawasan daratan, di Desa Namangkewa dan Watumilok lebih baik lagi penduduk yang tamat SD tersebut hanya 63,1 persen dan 67,1 persen. Penduduk yang berpendidikan SMTA dan perguruan tinggi di Desa Namangkewa dan Watumilok menunjukkan kondisi lebih baik dari pada di kawasan pulau-pulau kecil. Penduduk yang mencapai tamat SMTA di Namangkewa dan Watumilok masing-masing telah mencapai sekitar 25 persen dan yang tamat perguruan tinggi 7 persen. Perbedaan tingkat pendidikan yang dicapai di dua kawasan tersebut dipengaruhi oleh sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia dan akses terhadap fasilitas pendidikan tersebut.

Tabel 3.2.4 :
Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan,
Di Kabupaten Sikka, 2004
(Persen)

Keterangan	Tidak Sekolah	SD/SLTP	SMA	Perguruan Tinggi	Jumlah (N)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Kec.Maumere</i>	<i>11,4</i>	<i>75,5</i>	<i>10,9</i>	<i>2,1</i>	<i>100 (5.859)</i>
Ds. Kojadoi	13,6	81,1	4,4	0,9	100 (381)
Ds. Pemana	9,6	78,3	10,8	1,3	100 (861)
Ds. Kojagete	14,0	75,5	10,9	2,1	100 (250)
<i>Kec.Kewapante</i>	<i>13,9</i>	<i>71,2</i>	<i>12,1</i>	<i>2,7</i>	<i>100 (7216)</i>
Ds.Namangkewa	5,0	63,1	24,5	7,3	100 (179)
Ds. Watumilok	1,0	67,1	24,9	6,9	100 (389)
Kab. Sikka	13,8	69,5	13,2	3,7	100 (56709)

Sumber : Bappeda Kab, Sikka: Database Kabupaten Sikka, 2004

Catatan : () angka absolute.

Pembahasan lebih lanjut adalah gambaran penduduk yang dapat baca tulis atau tingkat literasi. Tabel 3.2.5 menunjukkan bahwa di Kecamatan Maumere penduduk yang bisa baca tulis atau tingkat literasi (96,1 persen) sedikit lebih baik daripada di Kecamatan Kewapante (94,3 persen). Dilihat di daerah penelitian kawasan pulau-pulau kecil (Desa Kojadoi, Kojagete dan Pemana) sedikit lebih rendah dibandingkan dengan di daerah penelitian kawasan daratan (Namangkewa dan Watumilok). Di Desa Kojadoi mencapai 92,9 persen, di Kojagete 96,6 persen dan Pemana 98,1 persen, sementara di Namangkewa telah mencapai 98,4 persen dan Watumilok 99,3 persen. Perbedaan tersebut seperti telah disinggung di atas adanya perbedaan lokasi, ketersediaan sarana dan prasarana, akses terhadap fasilitas tersebut dan kemampuan penduduk.

Tabel 3.2.5 :
Penyebaran Persentase Penduduk Buta Huruf
Kabupaten Sikka, 2004
(Persen)

Keterangan	Bisa Baca (Tingkat Literasi)	Tidak Bisa Baca	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Kec. Maumere</i>	96,1	3,9	6.070
Desa Kojadoi	92,9	7,1	381
Desa Pemana	98,1	1,9	861
Desa Kojagete	96,6	3,4	250
<i>Kec. Kewapante</i>	94,3	5,7	7.218
Desa Namangkewa	98,4	1,6	179
Desa Watumilok	99,3	0,7	389
Kab. Sikka	94,5	5,5	56.729

Sumber: Bappeda Kab, Sikka : Database Kabupaten Sikka, 2004

3.2.2. Ketrampilan penduduk

Berbicara tentang masalah sumber daya manusia (SDM) tidak hanya faktor pendidikan dan kesehatan yang harus dibahas. Namun yang juga lebih penting adalah kemampuan nyata manusia itu sendiri dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Ada asumsi jika seseorang berpengetahuan dan berpengalaman luas serta memiliki ketrampilan mungkin mereka secara kuantitas akan memproduksi lebih banyak dibandingkan mereka yang tidak berketrampilan dan pengetahuan. Bahkan secara kualitas mereka juga memiliki kemampuan yang lebih baik. Kemudian ada hubungannya antara mereka yang dapat baca tulis dan tingkat kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Secara umum jika memperhatikan tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Kabupaten Sikka masih rendah, maka masih perlu ditingkatkan. Dari dasar itu bisa diprediksikan bahwa tingkat ketrampilan sebagian besar penduduk masih terbatas.

Bagaimana ketrampilan yang dimiliki penduduk di daerah penelitian? Di daerah penelitian ketrampilan yang dimiliki penduduk menyatu dengan kondisi alam atau potensi alam. Untuk daerah penelitian kawasan pulau-pulau kecil, yakni Kojadoi, Kojagete dan Pemana ketrampilan yang dimiliki penduduk adalah yang berkaitan dengan kegiatan melaut. Ketrampilan tersebut adalah kemampuan untuk melaut mencari sumber daya laut, kemampuan membuat kapal kayu, kemampuan memperbaiki mesin kapal, kemampuan budi daya rumput laut, ikan dan lainnya. Sedangkan ketrampilan membudi dayakan rumput laut belajar dari PT Budindo pada awal tahun 90an yang mengusahakan budi daya rumput laut di Desa Kojadoi dan Kojagete. Kemudian ketrampilan tersebut dibangkitkan lagi oleh program COREMAP tahun 2003. Naluri ketrampilan sebagai pedagang dan perantau yang dimiliki penduduk Desa Pemana nampaknya tidak banyak dimiliki oleh penduduk desa lain di kawasan pulau-pulau kecil.

Di daerah penelitian kawasan daratan, Kewapante secara geografis dekat dengan perkotaan, maka jenis ketrampilan penduduk cenderung lebih beragam. Kondisi ini bisa dilihat dari variasi jenis pekerjaan yang dimiliki penduduk, dari ketrampilan yang berkaitan dengan perikanan dan pertanian sampai industri rumah tangga (pembuatan minyak kelapa) dan jasa. Hanya ketrampilan membudi dayakan rumput laut di daerah ini belum berkembang.

3.3. Pekerjaan Penduduk

3.3.1. *Tingkat kabupaten*

Kabupaten Sikka merupakan wilayah perekonomian agraris, di mana sebagian penduduknya hidup dari sektor pertanian. Sektor pertanian dalam hal ini dalam arti luas, yaitu meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan. Sehubungan dengan kabupaten ini juga memiliki kawasan perairan yang luas dan garis pantai yang panjang, maka kegiatan di subsektor perikanan mempunyai arti penting terutama bagi penduduk pesisir

pantai daratan dan kepulauan (pulau-pulau kecil). Dalam bagian ini disajikan distribusi penduduk menurut lapangan pekerjaan dan disajikan dalam Tabel 3.3.1. Data yang didapatkan dari Bappeda Kabupaten Sikka (Tabel 3.3.1) menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Sikka hidupnya tergantung pada sektor pertanian, termasuk di dalamnya perikanan laut. Lapangan pekerjaan pertanian sangat mendominasi perekonomian wilayah tersebut. Sekitar 74,3 persen penduduk Kabupaten Sikka bekerja di sektor pertanian. Lapangan pekerjaan lainnya adalah jasa (9,7 persen) merupakan lapangan yang diminati oleh penduduk setempat. Sektor ini berkaitan dengan kegiatan sektor informal yang sangat terkait dengan sektor tradisional baik di kota maupun di pedesaan. Selanjutnya lapangan pekerjaan di industri pengolahan yang hanya mencapai 6,4 persen. Kemudian baru diikuti lapangan pekerjaan perdagangan, hotel dan restoran, yaitu sebesar 4,6 persen. Sementara lapangan pekerjaan di sektor angkutan dan komunikasi sebesar 3 persen, yang kemungkinan lebih mendominasi wilayah perkotaan.

Tabel 3.3.1. :
Distribusi Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan
Kabupaten Sikka, Tahun 2005

Lapangan Pekerjaan	N	Persen
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian	95.222	74,3
2. Pertambangan dan Galian	97	0,2
3. Industri Pengolahan	6.178	6,4
4. Listrik, Gas dan Air Minum	288	0,3
5. Bangunan / Kontruksi	1.320	1,0
6. Perdagangan, Restoran dan Hotel	5.945	4,6
7. Angkutan dan Komunikasi	3.906	3,0
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Persh	677	0,5
9. Jasa	12.470	9,7
Jumlah	126.103	100,0

Sumber : Bappeda Kab. Sikka, 2005

Khusus untuk kegiatan usaha rumah tangga di perikanan laut di tingkat Kabupaten Sikka disajikan dalam Tabel 3.3.2. Dalam tabel tersebut kegiatan rumah tangga kenelayanan dibedakan menjadi usaha perikanan perorangan, usaha perikanan bersama (sebagai penanggung jawab) dan buruh perikanan tangkap. Tabel 3.3.2 tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar jumlah rumah tangga (85,2 persen) adalah yang memiliki usaha penangkapan ikan secara perseorangan. Mereka adalah rumah tangga nelayan yang bekerja mandiri tanpa bantuan orang lain atau buruh. Sementara jumlah rumah tangga yang memiliki usaha perikanan bersama (sebagai penanggung jawab) hanya 4,8 persen. Usaha perikanan ini yang biasanya menggunakan tenaga ABK (anak buah kapal) atau buruh nelayan. Jumlah rumah tangga sebagai buruh perikanan tangkap adalah sebesar 10 persen. Mereka ini yang bekerja sebagai ABK kapal nelayan atau bekerja bersama pemilik kapal dalam penangkapan ikan.

Tabel 3.3.2 :
Distribusi Rumah Tangga Kenelayanan Menurut Pekerjaan,
Kabupaten Sikka, Tahun 2006

Jenis Usaha	Jumlah Rumah Tangga	Persen
(1)	(2)	(3)
Usaha perikanan perorangan	4.733	85,2
Usaha perikanan bersama	265	4,8
Buruh penangkaan ikan	556	10,0
Jumlah	5.554	100,0

Sumber : BPS, Pengolahan Hasil Sensus Pertanian, 2006

3.3.2. Tingkat kawasan penelitian

- *Kawasan Pulau-Pulau Kecil*

Lapangan pekerjaan utama penduduk sampel di daerah penelitian kawasan pulau-pulau kecil paling dominan (92,9 persen) adalah perikanan budi daya (Tabel 3.3.3). Usaha budi daya yang sedang berkembang di daerah ini adalah budi daya rumput laut. Lapangan pekerjaan budi daya rumput laut sejak tahun 2003 telah menggantikan usaha perikanan tangkap. Sebab kegiatan budi daya tersebut banyak manfaat dan keuntungannya antara lain tidak tergantung musim, membuka lapangan pekerjaan bagi anggota rumah tangga, harganya masih cukup baik dan ikut melestarikan terumbu karang. Urutan kedua adalah lapangan pekerjaan perdagangan (2,5 persen). Lapangan pekerjaan di kawasan pulau-pulau kecil ini antara lain yang masih berkaitan dengan budi daya rumput laut. Mereka adalah para pedagang/ pengumpul rumput laut. Jadi bilamana usaha budi daya rumput berkembang, maka perdagangan rumput laut juga berkembang. Lapangan pekerjaan berikutnya adalah sektor jasa, yakni sebesar 2,1 persen. Mereka terdiri dari para PNS, termasuk guru dan karyawan serta tenaga jasa perbaikan perahu dan bengkel mesin perahu.

Tabel 3.3.3 :
Distribusi Penduduk Sampel Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Daerah Penelitian Kawasan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Daratan, di Kabupaten Sikka, Tahun 2006 (Persen)

Lapangan Pekerjaan Utama	Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Maumere)	Kawasan Daratan (Kewapante)
(1)	(2)	(3)
1. Perikanan Laut	1,7	39,5
2. Perikanan Budi daya	92,9	3,3
3. Pertanian Pangan/ Perkebunan	0,4	16,5
4. Perdagangan/ Pariwisata	2,5	19,7
5. Jasa (Guru/PNS/Staf Desa)	2,1	11,2
6. Industri Pengolahan	0,4	5,3
7. Transportasi	-	2,0
9. Jasa lainnya	-	2,6
Jumlah	(100,0) 241	(100,0) 152

Sumber : *Data Primer, Survei Data Dasar Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006*

Tabel 3.3.4 :
Distribusi Penduduk Sampel Menurut Jenis Pekerjaan Utama,
Di Kawasan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Daratan,
Kab. Sikka, Tahun 2006

Jenis Pekerjaan Utama	Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Maumere)	Kawasan Daratan (Kewapante)
(1)	(2)	(3)
1. Nelayan tangkap	2,1	42,1
2. Nelayan budi daya	92,9	-
3. Petani	-	13,8
4. Pedagang	2,5	19,8
5. Tenaga jasa (PNS/guru/karyawan)	2,1 0,4	9,9 9,2
6. Tenaga pengolahan/industri	-	5,3
7. Lainnya		
Jumlah (N)	100,0 (241)	100,0 (152)

Sumber : Data Primer : Survei Data Dasar Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006

Relevan dengan lapangan pekerjaan utamanya dominan adalah sektor budi daya rumput laut, maka jenis pekerjaan utama penduduk di daerah penelitian kawasan pulau-pulau kecil adalah nelayan budi daya rumput laut. Jenis pekerjaan dalam budi daya rumput laut ini memberikan pekerjaan kepada kepala rumah tangga, isteri, anak dan anggota rumah tangga lainnya. Jenis pekerjaannya meliputi menanam rumput laut, menyiapkan bahan-bahan penanaman rumput (seperti memasang pelampung, mengikat bibit dsb), merawat tanaman rumput laut dan menjemur hasil rumput laut). Pekerjaan-pekerjaan di usaha rumput laut tersebut dapat dilakukan tidak hanya kepala rumah tangga, tapi juga dapat dilakukan anggota rumah tangga lainnya. Variasi jenis pekerjaannya lainnya dalam proporsi jumlah

penduduk jauh lebih kecil adalah jenis pekerjaan sebagai pedagang, tenaga jasa dan tenaga pengolahan/industri kurang dari lima persen.

Di daerah penelitian kawasan pulau-pulau kecil penduduk sampel yang memiliki pekerjaan tambahan hanya sekitar 26,5 persen. Jenis pekerjaan tambahan di daerah ini cukup variatif. Proporsi penduduk yang terbanyak ternyata mereka memiliki jenis pekerjaan tambahan sebagai nelayan tangkap (46,9 persen) (Tabel 3.3.6). Fakta ini membuktikan bahwa ada pergeseran jenis pekerjaan nelayan tangkap yang semula sebagai pekerjaan utama berubah menjadi pekerjaan tambahan setelah masuknya usaha budi daya rumput laut. Urutan jenis pekerjaan tambahan yang kedua adalah nelayan budi daya rumput laut (26,6 persen). Di daerah penelitian kawasan pulau-pulau kecil ini, ternyata usaha pertanian tanaman pangan hanya 9,4 persen. Kemudian masing-masing sekitar 8 persen untuk mereka yang jenis pekerjaannya sebagai pedagang dan tenaga pengolahan/ industri rumah tangga.

Tabel 3.3.5 :
Distribusi Penduduk Sampel Menurut Lapangan Pekerjaan Tambahan,
Di Kawasan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Daratan,
Kab. Sikka, Tahun 2006

Lapangan Pekerjaan Tambahan	Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Maumere)	Kawasan Daratan (Kewapante)
(1)	(2)	(3)
1. Perikanan laut	46,9	16,3
2. Perikanan budi daya	26,6	9,3
3. Pertanian pangan/ perkebunan	9,4	37,3
4. Perdagangan	7,8	11,6
5. Jasa	1,6	9,3
6. Industri pengolahan	4,7	7,0
7. Transportasi/bangunan	3,1	2,3
8. Lainnya	-	7,0
Jumlah (N)	100,0 (64)	100,0 (43)

Sumber : Data Primer : Survei Data Dasar Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006

Tabel 3.3.6 :
Distribusi Penduduk Sampel Menurut Jenis Pekerjaan Tambahan,
Di Kawasan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Daratan,
Kab. Sikka, Tahun 2006

Jenis Pekerjaan Tambahan	Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Maumere)	Kawasan Daratan (Kewapante)
(1)	(2)	(3)
1. Nelayan tangkap	46,9	16,3
2. Nelayan budi daya	26,6	9,3
3. Petani pangan	9,4	37,3
4. Pedagang	7,8	11,6
5. Tenaga jasa (PNS/guru/karyawan)	1,6 7,9	9,3 9,3
6. Tenaga pengolahan/industri	-	6,9
7. Lainnya		
Jumlah (N)	100,0 (64)	100,0 (43)

Sumber : Data Primer : Survei Data Dasar Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006

- *Kawasan daratan*

Lapangan pekerjaan utama bagi penduduk sampel di daerah penelitian kawasan daratan berbeda dengan di kawasan pulau-pulau kecil. Tabel 3.3.3 menunjukkan bahwa sekitar 40 persen penduduk sampel bekerja di sektor perikanan laut/ perikanan tangkap. Sektor tersebut sebagian besar merupakan perikanan tangkap dan hanya sebagian kecil merupakan perikanan budi daya. Di samping perikanan laut, sektor yang masih cukup banyak memberikan kesempatan kerja adalah pertanian tanaman pangan (16,5 persen). Seperti telah diungkap dalam potensi daerah memang lahan pertanian di kawasan daratan ini masih tersedia, sehingga memungkinkan untuk usaha

pertanian tanaman pangan. Selanjutnya sektor perdagangan juga memberikan peluang kerja bagi kepala rumah tangga di kawasan daratan. Sekitar 19,7 persen penduduk sampel di kawasan daratan bekerja di sektor perdagangan. Kemudian di sektor jasa meliputi 11,2 persen penduduk dan industri pengolahan hanya sekitar 5 persen.

Tabel 3.3.4 menyajikan tentang jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk sampel di daerah penelitian kawasan daratan. Persentase penduduk sampel terbesar (42,1 persen) di daerah penelitian ini adalah sebagai nelayan tangkap. Urutan berikutnya adalah jumlah penduduk sebagai pedagang (19,8 persen). Sebagian dari mereka adalah usaha perdagangan yang terkait dengan nelayan, yaitu para penjual ikan yang tiap hari memasarkan hasil-hasil tangkapan ikan dari para nelayan dan sebagian yang lain pedagang kelontong dan warung makanan. Jumlah petani di kawasan daratan ini juga masih cukup banyak mencapai 13,8 persen, sebab potensi lahan pertanian juga tersedia. Jenis pekerjaan lainnya adalah tenaga jasa mereka para PNS/guru/karyawan dan tenaga jasa perbengkelan (9,9 persen). Dalam jumlah tidak banyak penduduk sampel yang bekerja dalam pengolahan/ industri (9,2 persen). Di daerah penelitian kawasan daratan ini yang cukup menonjol adalah usaha industri rumah tangga pembuatan minyak kelapa.

Dari 152 orang penduduk sampel 43 orang (28,3 persen) memiliki pekerjaan tambahan. Dari penduduk sampel yang memiliki pekerjaan tambahan tersebut proporsi yang tertinggi adalah sebagai petani tanaman pangan (37,3 persen) (Tabel 3.3.5). Hal yang wajar mengingat lahan pertanian pangan di daerah penelitian kawasan daratan ini memungkinkan. Ada sekitar 16,3 persen penduduk sampel yang menempatkan nelayan tangkap sebagai pekerjaan tambahan. Sekitar 11,6 persen sebagai pedagang, kemudian nelayan budi daya, tenaga jasa dan tenaga industri masing-masing 9 persen yang menempatkan sebagai pekerjaan tambahan.

Kegiatan alternatif

Kawasan pulau-pulau kecil - Kegiatan alternatif bagi daerah penelitian ini dan beberapa tahun terakhir sudah menjadi kegiatan utama penduduk di daerah ini adalah usaha budi daya rumput laut. Secara geografis potensi lahan untuk budi daya rumput laut di kawasan pulau-pulau kecil, seperti Desa Kojadoi dan Kojagete memang memungkinkan. Teknologi atau ketrampilan tentang budi daya rumput laut telah dikuasai banyak nelayan di dua desa tersebut. Kegiatan usaha budi daya tersebut tidak merusak kelestarian terumbu karang dan membuka kesempatan kerja bagi anggota rumah tangga yang lain selain kepala rumah tangga. Industri pembuatan dan jasa perbaikan perahu kayu di daerah ini masih terbuka lebar. Di Desa Kojadoi, Kojagete dan Pemana masing-masing memiliki satu unit usaha pembuatan dan jasa perbaikan bodi perahu kayu. Potensi SDM (Sumber Daya Manusia) di masing-masing desa ada, konsumennya ada, hanya bahan baku kayu harus mendatangkan dari luar daerah (seperti dari Sulawesi dan Maluku).

Kawasan daratan – Kegiatan usaha alternatif bagi daerah penelitian kawasan daratan lebih variatif dibandingkan dengan di kawasan pulau-pulau kecil. Usaha pertanian tanaman pangan dan kebun di daerah ini lebih memungkinkan. Hal tersebut mengingat potensi lahan pertanian di daerah ini lebih tersedia. Dari pekerjaan tambahan penduduk daerah ini ternyata proporsi jumlah penduduk yang tertinggi adalah sebagai petani tanaman pangan/kebun. Kegiatan usaha pertanian sebagai petani tersebut ternyata juga membuka usaha pembuatan/industri minyak kelapa. Potensi bahan baku buah kelapa sebagai wilayah pantai daerah ini cukup banyak pohon kelapa/nyiur.

3.4. Kesejahteraan Penduduk

Pemilikan dan penguasaan aset produksi

Sarana dan alat tangkap perikanan laut

a. Tingkat kabupaten

Data terakhir yang tersedia dari hasil Sensus Pertanian Tahun 2003 menunjukkan bahwa jenis armada tangkap ikan di Kabupaten Sikka berupa kapal/perahu motor, perahu motor tempel dan perahu tanpa motor/sampan. Dari tiga jenis armada tersebut yang terbanyak adalah perahu tanpa motor. Jumlah perahu tanpa motor pada tahun 2001 sebanyak 798 unit dan pada tahun 2003 menjadi 1.101 unit. Jadi terjadi peningkatan yang cukup besar yang mencapai 37,9 persen selama 2 tahun. Armada perahu tanpa motor ini biasanya dimiliki atau diusahakan oleh nelayan-nelayan kecil. Mereka menangkap biota laut di laut dangkal atau dekat pantai. Hasil tangkapan biasanya tidak besar dan pendapatannya kecil atau pas-pasan bahkan kurang untuk menghidupi keluarganya. Adanya perkembangan jumlah armada kemungkinan ada bantuan dari pemerintah dan lembaga lain yang peduli terhadap kehidupan nelayan.

Sementara jumlah perahu motor pada tahun 2001 sebanyak 652 unit telah meningkat menjadi 951 unit pada tahun 2003. Selama dua tahun terjadi peningkatan 45,8 persen. Perahu-perahu motor ini biasanya dimiliki dan diusahakan oleh nelayan-nelayan kaya. Armada-aramada tersebut biasanya digunakan untuk menangkap biota laut di laut dalam. Jenis ikannya antara lain tuna, cakalang, tongkol dsb. Jumlah perahu motor tempel di Kabupaten Sikka yang terkecil, pada tahun 2001 sebanyak 231 unit dan menjadi 590 unit pada tahun 2003. Kenaikannya cukup tajam 40,7 persen. Peningkatan jumlah perahu motor tempel yang cukup tajam tersebut merefleksikan bahwa telah terjadi peningkatan usaha perikanan tangkap.

Tabel 3.4.1 :
Jumlah Armada Penangkapan Ikan di Kabupaten Sikka,
Tahun 2001 – 2003

No	Jenis Armada	2001	2002	2003	Kenaikan (%) 2001-2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perahu tanpa motor	798	825	1 101	37,9
2.	Motor tempel	231	485	590	40,7
3.	Kapal motor	652	745	951	45,8
	Jumlah	1 681	2 059	2 642	57,1

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Sikka 2004.

Di Kawasan pulau-pulau kecil (Kecamatan Maumere) perahu tak bermotor cukup banyak dibandingkan di kawasan daratan (Kecamatan Kewapante). Pada tahun 2003 perahu jukung mencapai 438 buah, perahu papan kecil 128 buah dan perahu papan sedang hanya 8 buah. Sementara di kawasan daratan perahu jukung hanya 36 buah, perahu papan kecil 8 buah, perahu papan sedang satu buah dan perahu papan besar 6 buah. Perahu jukung, baik di kawasan pulau-pulau kecil maupun di kawasan daratan dari tahun 2001 sampai 2003 terjadi penurunan jumlah yang cukup drastis. Penurunan jumlah perahu jukung tersebut diperkirakan karena para nelayan telah beralih untuk menggunakan perahu motor. Sementara di kawasan daratan penurunan tersebut tidak ada informasi yang dapat disampaikan. Di kawasan pulau-pulau kecil telah terjadi peningkatan jumlah perahu motor dari 200 buah menjadi 619 buah. Sedangkan motor tempel telah bertambah dari 5 buah menjadi 196 buah. Jumlah perahu motor dan motor tempel ini di kawasan daratan praktis statis tidak ada penambahan.

Tabel 3.4.2 :
Jumlah Armada Penangkapan Ikan di Kawasan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Daratan di Kabupaten Sikka, Tahun 2001-2003

Jenis Armada Tangkap Ikan	Lokasi Sampel				Kab. Sikka	
	Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Maumere)		Kawasan Daratan (Kewapante)			
	2001	2003	2001	2003	2001	2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perahu Tidak Bermotor :						
1. Jukung	671	438	103	36	1.576	1.829
2. Perahu papan kecil	29	128	2	8	691	1.348
3. Perahu papan sedang	26	8	3	1	33	209
4. Perahu papan besar	1	-	6	-	7	97
Perahu Motor :						
o Kapal motor	200	619	8	8	524	1.088
o Motor tempel	5	196	36	34	270	443

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sikka, 2004.

Jumlah alat tangkap dari tahun 2001 – 2003 hanya jaring insang tetap dan jaring insang hanyut yang mengalami peningkatan yang berarti, dari semula (tahun 2001) tidak ada menjadi 334 buah dan 322 buah di kawasan pulau-pulau kecil, sementara di kawasan daratan dari tidak ada menjadi 14 buah dan 53 buah. Di kawasan pulau-pulau kecil pukat pantai, paning dan bubu telah terjadi penurunan yang drastis. Penurunan tersebut barangkali terkait dengan peralihan para nelayan tangkap ke kegiatan budi daya rumput laut. Di kawasan tersebut hanya pemilikan bagan yang sedikit bertambah dari 14 buah menjadi 21 buah.

Tabel 3.4.3 :
Jenis Alat Tangkap di Kawasan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Daratan di Kabupaten Sikka, Tahun 2001-2003

Jenis Alat Tangkap Ikan	Lokasi Sampel				Kab. Sikka	
	Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Maumere)		Kawasan Daratan (Kewapante)			
	2001	2003	2001	2003	2001	2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pukat pantai	45	8	-	1	64	532
2. Pukat cincin	-	3	4	-	111	96
3. Jaring insang tetap	-	334	-	14	-	2.100
4. Jaring insang hanyut	-	322	-	53	-	2.967
5. Bagan	14	21	34	15	169	102
6. Pancing	1.002	942	156	54	9.700	8.828
7. Bubu	843	22	-	-	860	62

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sikka, 2004.

Di kawasan daratan ternyata pemilikan bagan dan pancing juga mengalami penurunan, yakni pancing dari 34 buah (tahun 2001) menjadi hanya 15 buah. Sementara pancing menurun dari 156 buah menjadi hanya 54 buah. Di tingkat Kabupaten Sikka pemilikan alat tangkap yang meningkat tajam adalah pukat pantai, jaring insang tetap dan jaring insang hanyut. Sedangkan alat tangkap lainnya justru mengalami penurunan.

Tabel 3.4.4 :
Jumlah Alat Tangkap Ikan di Kabupaten Sikka, Tahun 2003

No	Jenis Alat Tangkap	Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pukat pantai	65	0,4
2.	Pukat cincin	111	0,7
3.	Jaring ingsang tetap	1 253	8,3
4.	Bagan	2 296	15,2
5.	Longline	169	1,1
6.	Huhate	78	0,5
7.	Pancing	58	0,4
8.	Pancing	9 700	64,0
9.	Bubu	860	5,7
10.	Lain-lain	559	3,7
	Jumlah	15 149	100,0

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Sikka 2004.

b. Tingkat kawasan penelitian

Jenis armada penangkapan ikan di kawasan pulau-pulau kecil (Kecamatan Maumere) dan di kawasan daratan (Kewapante) terdiri dari perahu motor dalam, perahu motor tempel dan perahu tanpa motor (sampan). Di desa sampel Kecamatan Maumere 68 rumah tangga masih memiliki perahu tanpa motor dan 56 rumah tangga memiliki perahu motor dalam. Sementara perahu motor tempel hanya ada di 3 rumah tangga. Perahu motor dalam yang dimiliki umumnya berkekuatan 8 PK dan perahu tanpa motor/ sampan kebanyakan yang berukuran 3m x 0,5 meter. Dengan adanya banyak rumah tangga yang usahanya beralih dari nelayan tangkap ke budi daya rumput laut banyak rumah tangga yang sudah tidak memiliki alat tangkap lagi. Pada saat penelitian hanya 15 rumah tangga (jumlah 53 unit) yang masih memiliki dan mengoperasikan bubu, ada 18 rumah tangga (jumlah 37 unit) yang masih memiliki jaring dan 19 rumah

tangga (29 unit) yang masih memiliki pancing. Jadi sebagian besar dari rumah tangga sudah tidak memiliki alat tangkap lagi.

Di desa sampel Kecamatan Kewapante hanya ada 10 rumah tangga sampel yang memiliki perahu motor dalam, tiga rumah tangga memiliki perahu motot tempal dan 36 rumah tangga masih memiliki perahu tanpa motor. Perahu motor dalam yang dimiliki di desa ini umumnya yang berkekukatan 8 PK dan perahu tanpa motor berukuran 3 m x 0,6 m. Sementara pemilikan alat tangga 35 rumah tangga (jumlah 100 unit) masih memiliki jaring/pukat, 24 rumah tangga (jumlah 80 unit) memiliki pancing rawai/ lintas, 8 rumah tangga masih mengusahakan bagan dan dua rumah tangga masih memiliki bubu. Di desa tersebut berarti sebagian besar rumah tangga tidak memiliki armada tangkap dan alat tangkap ikan. Jumlah nelayan di desa tersebut cukup banyak berarti sebagian dari mereka hanya sebagai buruh nelayan (ABK) yang tidak memiliki alat produksi.

Tabel 3.4.5 :

Jenis Armada Penangkapan Ikan di Kawasan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Daratan, di Kabupaten Sikka, Tahun 2006

Jenis Armada	Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Maumere)		Kawasan Daratan (Kewapante)	
	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Dalam Unit	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Dalam Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perahu motor dalam	56	59	10	10
Perahu motor tempel	3	3	3	3
Perahu tanpa motor	68	69	36	40

Sumber : Data Primer : Survei Data Dasar Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006

Catatan : Di Maumere dominan armada perahu motor dalam berukuran 8 PK, sedang perahu tanpa motor umumnya berukuran 3 m x 0,5 m. Di Kewapante dominan armada perahu motor dalam berukuran 8 PK, motor tempel 7 PK dan perahu tanpa motor 3 m x 0,6 m.

Tabel 3.4.6 :
Jenis Alat Tangkap di Kawasan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Daratan, di Kabupaten Sikka, Tahun 2006

Jenis Alat Tangkap	Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Maumere)		Kawasan Daratan (Kewapante)	
	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Dalam Unit	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Dalam Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bagan	-	-	8	8
Bubu	15	53	2	13
Jaring	18	37	35	100
Pancing rawai	19	29	24	80

Sumber : Data Prime, Survei Data Dasar Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006

Perikanan budi daya

a. Tingkat kabupaten

Wilayah perairan di Kabupaten Sikka sebagian besar ditumbuhi terumbu karang. Sebagian besar wilayah perairan masih cukup baik. Oleh karena itu, memungkinkan untuk usaha budi daya biota laut. Banyak teluk-teluk yang secara teknis sangat mendukung untuk budi daya rumput laut, kerapu, kerang mutiara dan teripang (*Bappeda Kab. Sikka, Profil Perekonomian Kab.Sikka, 2004*). Budi daya rumput laut dikembangkan di kepulauan Kecamatan Maumere, seperti Kojadoi, Kojagete, Damhila, Permaan, Kondo dan Pangbatang. Budi daya kerang mutiara dikembangkan di perairan pantai di Kecamatan Nita oleh PT. Kyokko Shinju Indonesia dan perairan pantai Kecamatan Talibura oleh PT. Mutiara Nusa Bunga. Budi daya ikan bandeng dilakukan di sepanjang pantai Laut Flores, namun masih dilakukan secara tradisional.

Untuk budi daya biota laut di tambak, di Kabupaten Sikka potensinya masih cukup besar. Dari Tabel 3.4.7 menunjukkan potensi untuk usaha pengembangan tambak masih seluas sekitar 179 hektar. Dari potensi tersebut sampai tahun 2003 baru dimanfaatkan 44,5 hektar atau 24,8 persen. Biota laut yang telah dibudi dayakan adalah ikan bandeng dan udang. Kepiting di hutan bakau belum banyak dikembangkan. Penyebaran potensi tambak terdapat di 9 kecamatan, yaitu Paga, Mego, Nita, Lela, Maumere, Alok, Kewapante, Talibura dan Waigete. Di Kecamatan Maumere berada wilayah kepulauan dan di Kecamatan Kewapante di Desa Geliting.

Budi daya ikan air tawar di Kabupaten Sikka, potensinya juga cukup bagus. Dari potensi 780 hektar, sampai tahun 2003 hanya 46 hektar atau sekitar 6 persen. Kendala yang dihadapi untuk pengembangan budi daya air tawar adalah kelangsungan air untuk sepanjang tahun, ketrampilan para petani dan permodalan. Budi daya ikan air tawar selama ini masih memprioritaskan di daerah-daerah yang mendapatkan irigasi dan dekat bendungan.

Tabel 3.4.7 :
Potensi Lahan Budi Daya Sumber daya Laut dan Pemanfaatannya
Di Kabupaten Sikka, Tahun 2001 - 2003

Jenis Budi Daya	Potensi Lahan (ha)	Pemanfaatan		
		2001	2002	2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Budi daya laut	6 000	1 500,0	1 600,0	1 650,0
2. Budi daya tambak	179	42,2	42,5	44,5
3. Budi daya air tawar	261	13,0	13,0	13,0
4. Mina padi	780	42,9	43,5	46,0

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Sikka 2004.

b. Tingkat kawasan penelitian

Di daerah penelitian kawasan pulau-pulau kecil (Kecamatan Maumere) utamanya di Desa Kojadoi penduduk nelayan yang pada mulanya sebagai nelayan tangkap. Namun selama 5 tahun terakhir kebanyakan telah beralih ke usaha budi daya rumput laut (*seaweed*). Ada sekitar 90 persen rumah tangga telah memiliki usaha budi daya laut. Usaha budi daya laut tersebut menurut sejarahnya diperkenalkan kepada penduduk pulau-pulau utamanya Desa Kojadoi dan Kojagete pada awal tahun 90-an. Pada waktu itu diperkenalkan oleh seorang pengusaha dan seorang tokoh yang berasal dari Flores. Mereka mengembangkan budi daya rumput laut secara besar-besar, sehingga banyak masyarakat nelayan di desa-desa tersebut mengenal bagaimana membudidayakan rumput laut. Namun karena terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda daerah tersebut pada tahun 1992, maka semua hasil produksi dan aset-aset perusahaan hancur. Usaha budi daya terhenti tidak dilanjutkan lagi.

Gambar 9 :
Penjemuran hasil rumput laut di Desa Kojadoi, Kec. Maumere



Pada tahun 2000 ada program COREMAP masuk ke desa-desa tersebut. Dalam rangka pelestarian terumbu karang yang sudah rusak karena gempa dan tsunami serta ulah manusia dengan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Program ini memperkenalkan kembali budi daya rumput laut. Dengan program tersebut disambut baik oleh masyarakat nelayan, karena sebelumnya mereka telah mengenal cara-cara budi daya rumput laut. Dengan bantuan bibit, permodalan dan pembinaan akhirnya program tersebut dapat dinikmati oleh sebagian masyarakat desa-desa tersebut. Dari hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa pada umumnya mereka sangat merasakan hasil dari budi daya rumput laut. Oleh karena itu, sebagian besar dari rumah tangga terutama di Desa Kojadoi ikut memiliki usaha budi daya rumput laut. Adapun manfaat yang sangat dirasakan adalah :

1. Budi daya rumput laut ikut melestarikan dan melindungi terumbu karang yang ada di perairan sekitar desa-desa tersebut. Sebab dengan adanya budi daya rumput laut mereka tidak mengganggu pertumbuhan terumbu karang maupun biota-biota yang hidup di dalamnya.
2. Dengan adanya budi daya laut sekaligus ikut mengamankan dari gangguan para nelayan dari luar yang menangkap ikan dengan cara yang tidak ramah lingkungan. Setiap ada kegiatan penangkapan ikan orang luar selalu terpantau, karena setiap saat para nelayan berada diperairan untuk mengurus kegiatan budi daya.
3. Dengan adanya budi daya rumput laut telah menciptakan kesempatan kerja yang banyak, baik untuk diri nelayan maupun bagi keluarganya. Dengan adanya budi daya rumput laut seluruh anggota keluarga ikut aktif membantu usaha tersebut. Bagi isteri dan nenek/ kakek dapat membantu menjemur hasil rumput yang telah dipanen. Isteri dan anak-anaknya dapat ikut menyiapkan tali pengikat bibit rumput laut dan mengikat bibit-bit rumput laut sebelum ditebarkan atau ditanam di perairan yang mereka kuasai. Masing-masing

rumah tangga memiliki lebih dari satu lokasi pengembangan rumput laut. Hal dilakukan agar panen dapat terus-menerus dengan lokasi yang berbeda, sehingga kegiatan dari persiapan sampai panen, pencemuran dan pemasaran dapat terus berlangsung/tak terputus.

Gambar 10 :
Partisipasi ibu-ibu menyiapkan sarana budi daya rumput laut di Desa Kojadoi, Kec. Maumere, 2006



Gambar 11 :
Anak-anak memasang pelampung untuk tanaman rumput laut di
Desa Kojadoi, Kecamatan Maumere



4. Dengan adanya usaha budi daya rumput laut para informan umumnya melaporkan bahwa penghasilannya sekarang lebih baik dan kontinyu serta tidak tergantung sekali dengan kondisi musim atau besarnya gelombang. Ada beberapa informan yang mengatakan dengan adanya penghasilan dari rumput laut mereka bisa membiayai anak-anaknya untuk sekolah.

Ilustrasi 3.1 :

Rumput laut atau seaweed – dalam dunia ilmu pengetahuan dikenal dengan alga. Rumput laut dapat diolah menjadi berbagai produk pangan, kosmetika dan produk untuk keperluan industri. Produk pangan antara lain agar-agar, puding, cendol, manisan, sirup, slada laut, dodol dll. Kosmetika antara lain krem, lotion, shampo, cat rambut, pasta gigi, salep dsb. Obat tradisional antara lain pembunuh sel kanker, pencegah penyakit kardiovaskuler, penguat sistem kekebalan tubuh, pencegah penyakit gondok, pencegah penuaan, penurunan kadar kalestrerol, antibakteri dsb. Kemudian produk lainnya adalah pakan ternak, pupuk dan zat warna.

(Sumber : 'Pohon Industri Rumput Laut', Proyek Jaringan Informasi Ilmiah Nasional, PDII-LIPI, Jakarta, 2004)

Budi daya rumput laut ini belum dikembangkan di daerah penelitian kawasan darat (Kecamatan Kewapante). Pengalaman dalam budi daya rumput laut pada tahun 90an tidak dialami oleh penduduk nelayan di desa sampel tersebut. Kegiatan ekonomi penduduk pantai masih tetap sebagai nelayan tangkap meskipun hasil tangkapannya sudah menurun akhir-akhir ini. Mereka terpaksa harus mencari hasil tangkapan ke luar daerah dan laut dalam, seperti di Larantuka, sekitar Pulau PaluE, dan perairan Maluku. Penangkapan di laut dalam memerlukan kapal tangkap yang lebih besar PK nya, biaya operasional yang lebih besar, waktu penangkapan yang lebih lama dan ABK yang lebih banyak.

3.4.2. Kondisi tempat tinggal

Status penguasaan tempat tinggal

Pada umumnya penduduk di daerah pedesaan menempati tempat tinggal milik sendiri atau milik keluarganya. Seperti juga di

Kabupaten Sikka sebagian besar penduduknya menempati tempat tinggal milik sendiri. Sedangkan yang sewa kurang dari 10 persen. Dari jumlah rumah tangga yang melakukan sewa tempat tinggal tersebut diduga besar mereka tinggal di wilayah perkotaan. Dan sebagian kecil mereka yang tinggal di desa karena tugas atau bekerja. Seperti juga di Kecamatan Maumere karena sebagian wilayahnya (daratan) adalah daerah perkotaan, maka 277 kepala rumah tangga yang melakukan sewa terhadap rumah tinggalnya sekarang karena bekerja dan tinggal di kota. Demikian halnya mereka yang ada di Kecamatan Kewapante karena secara lokasi berada di perbatasan perkotaan Maumere, maka daerah ini banyak yang melakukan sewa. Sedangkan mereka yang berkategori bebas sewa umumnya mereka tinggal di tempat orang tuanya atau sanak familinya.

Di Desa Kojadoi ada sekitar 9 orang (sekitar 3 persen) yang menyewa tempat tinggal sekitar 3 persen, mereka para guru sekolah yang bertugas di Desa Kojadoi. Mereka itu umumnya penduduk Pulau Flores yang bekerja di Sekolah Dasar atau SMP yang ada di Desa Kojadoi. Demikian halnya rumah tangga yang sewa di Pemanan adalah mereka yang mempunyai profesi yang hampir sama dengan di Kojadoi. Di Watumilok dan Namangkewa karena wilayah berdekatan dengan kota dan transportasi ke wilayah ini sangat mudah, maka mereka yang melakukan sewa tempat tinggal masih sangat kecil. Mereka yang bekerja umumnya bisa pulang pergi ke dan dari daerah asalnya lebih mudah dari pada penduduk yang berada di kepulauan.

Tabel 3.4.8 :
Distribusi Kepala Rumah Tangga Menurut Status Tempat Tinggal ,
Kab. Sikka

Keterangan	Bebas Sewa	Sewa	Milik sendiri	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Kec.Maumere)	1.172	277	4.609	6.058
Desa Kojadoi	49	9	323	381
Desa Pemana	94	22	745	861
Desa Kojagete	20	5	225	250
Kawasan Daratan (Kec.Kewapante)	615	310	6.200	7.125
Desa Namangkewa	15	6	158	179
Desa Watumelok	30	2	357	389
Kab. Sikka	7.452	3.766	46.603	57.821

Sumber : Bappeda Kab, Sikka, Database Kabupaten Sikka, 2004

Secara umum rumah tangga di Kabupaten Sikka menunjukkan sebagian besar menempati rumah tinggal seluas 20 hingga 50 m² (70,36 persen). Hanya kira-kira 2 persen pada tahun 2003 rumah tangga di Kabupaten Sikka yang menempati rumah tinggal di atas 100 m². Menurut data statistik pada Tabel 3.2 ada indikasi peningkatan rumah tangga menempati luas rumah tinggalnya. Contoh pada tahun 2001 mereka yang tinggal dengan luas lantai antara 50- hingga 99 m² sekitar 16 persen kepala keluarga pada tahun 2003 menjadi 24 persen. Gambaran ini tampaknya akan cenderung meningkat selaras dengan perkembangan ekonomi yang akan dicapai. Hal ini karena tanah lapang masih terlihat masih luas di wilayah Kabupaten Sikka. Meskipun kondisi tanahnya tidak datar, namun masih layak untuk dibuat suatu pemukiman.

Tabel 3.4.9 :
Distribusi Rumah Tangga Dan Menurut Luas Lantai Tempat Tinggal
(Persen)

Luas Lantai	2001	2002	2003
(1)	(2)	(3)	(4)
< 20 m2	4,6	2,5	3,7
20-49 m2	77,7	73,1	70,4
50-99 m2	15,6	21,3	23,9
>100 m2	2,1	3,1	2,00
Jumlah	100,0 (53 792)	100,0 (54 949)	100,0 (54 253)

Sumber : BPSK, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab. Sikka, 2003

Kepemilikan lahan produktif.

Dari pemilikan rumah, pembahasan kemudian diarahkan untuk melihat seberapa besar rata-rata rumah tangga di daerah penelitian memiliki lahan produktif. Lahan produktif adalah lahan yang bisa dibudidayakan. Asumsinya semakin luas lahan yang dikuasai atau dimiliki oleh suatu rumah tangga, maka rumah tangga tersebut semakin memiliki kesempatan untuk mendapatkan hasil dari lahan secara ekonomi. Sehingga tingkat kekayaan maupun kemiskinan dapat dilihat dari aspek pemilikan ini.

Yang menarik adalah lebih dari 40 persen rumah tangga di Kabupaten Sikka tidak memiliki lahan produktif. Bahkan mereka yang memiliki lahan produktif sebagian besar di bawah satu hektar, (35 persen). Hal ini bisa dipastikan tanah merkapun bisa berupa tanah pegunungan dan berada di dataran tinggi. Keadaan tersebut hampir sama dengan pola pemilikan di Kecamatan Kewapante bahkan rumah tangga yang tidak memiliki lahan produktif cukup besar yaitu hampir 47 persen. Sedangkan yang memiliki lahan

produktif yang memiliki luas diatas satu hektar hanya kurang dari 10 persen. Demikian halnya di Kecamatan Maumere yang memiliki lahan produktif dengan luas satu hektar lebih hanya kurang dari 6 persen.

Di daerah penelitian kawasan pulau-pulau kecil, Desa Kojadoi memperlihatkan hampir 65 persen tak memiliki lahan pekarangan produktif. Hal ini dapat dimengerti karena lahan pulauanya saja beralaskan batu karang yang sudah mati. Sedangkan rumah tangga yang ingin membuka lahan harus berjalan kaki ke Pulau Besar. Hal ini berbeda dengan Desa Pemana atau Kojagete yang lokasinya berada di suatu pulau, di mana pemukiman penduduk berada di tepi pantai. Pemana adalah pulau yang bertanah pasir dan pekarangannya dapat ditanami pohon pisang atau tumbuhan lainnya. Sedangkan kawasan Kojagete memiliki pekarangan sebagian berada di pantai yang berpasir.

Tabel 3.4.10:
Distribusi Rumah Tangga Menurut Pemilikan Lahan (Persen)

Keterangan	Tidak memiliki lahan	< 0,5 ha	0,5 - 1 ha	1-1,5 ha	>1,5 ha	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kawasan Pulau-Pulau Kecil :						
Kec. Maumere	37,5	38,7	17,2	4,6	1,9	100 (6119)
Desa Kojadoi	64,8	28,6	5,2	0,5	0,7	100 (381)
Desa Pemana	59,5	34,6	2,6	1,9	1,2	100 (861)
Desa Kojagete	29,2	41,2	13,6	7,2	8,8	100 (250)
Kawasan Daratan :						
Kec. Kewapante	46,8	23,2	18,8	6,8	2,9	100 (7218)
Desa Namangkewa	69,2	15,6	9,5	2,2	3,4	100 (179)
Desa Watu melok	77,6	11,5	8,7	1,1	1,1	100 (389)
Kab. Sikka	42,3	27,7	17,3	6,3	6,7	100 (56846)

Sumber : Bappeda Kab, Sikka, Database Kabupaten Sikka, 2004

Catatan : () angka absolute.

Sumber penerangan dan jenis bahan bakar untuk memasak

Sumber penerangan merupakan faktor utama bagi suatu penduduk untuk memperoleh kesempatan untuk meningkatkan produksi. Mereka yang ada di daratan Pulau Flores seperti di sekitar Kota Maumere tampaknya sumber penerangan utamanya adalah dari tenaga listrik. Bahkan rumah tangga di Kabupaten Sikka ada peningkatan dari tahun 2001 mereka yang memanfaatkan listrik dari 40,7 persen menjadi 41,4 persen pada tahun 2003. Kemudian mereka yang menggunakan alat penerangan dengan minyak tanah justru mengalami penurunan, yakni dari 57 persen pada tahun 2001 menurun cukup berarti menjadi 55 persen pada tahun 2003. Namun yang mungkin menjadi perhatian sumber lain-lain bisa saja meningkat dari 0,3 persen tahun 2001 menjadi 0,5 persen. Gambaran ini mungkin mengindikasikan bahwa pembangunan kelistrikan terhadap penduduk semakin ditingkatkan khususnya di Kawasan Kabupaten Sikka.

Tabel 3.4.11 :
Distribusi Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Yang Digunakan, Kabupaten Sikka. (Persen)

Jenis Penerangan	2001	2002	2003
(1)	(2)	(3)	(4)
Listrik	40,71	35,16	41,41
Petromak	1,94	3,11	3,28
Lampu Minyak	56,99	61,25	54,82
Lainnya	0,35	0,49	0,50
Jumlah	100,0	100,0	100,0
(N)	(53 792)	(54 949)	(54 253)

Sumber : BPS Kab Sikka, Indikator Kesejahteraan rakyat kab. Sikka, 2003

Catatan : () angka absolute.

Pada umumnya sumber penerangan erat kaitannya dengan jenis energi yang digunakan untuk memasak maupun kepentingan energi dalam rumah tangga. Sebagai contohnya jika rumah tangga

tersebut memanfaatkan minyak tanah untuk penerangan maka ada kecenderungan untuk memasak bisa memanfaatkan kompor atau mungkin juga kayu . Menurut pengamatan di lapangan, misalnya di kawasan Kecamatan Kewapante banyak ibu-ibu rumah tangga memasak minyak kelapa menggunakan tungku yang sumber energinya dari kayu bakar. Gambaran ini mengindikasikan bahwa kayu bakar masih menjadi sumber energi utama untuk memasak. Selain kawasan Desa Watumilok dan Namangkewa masih setengah pedesaan dan pohon-pohon masih banyak ditanam di sekitar pekarangan rumah, maka kayu juga sangat mudah untuk diperoleh.

Keadaan ini mungkin berbeda dengan di kawasan pulau-pulau kecil, di Desa Kojadoi, tanaman keras hampir tidak bisa tumbuh. Kompor minyak tanah sudah dimanfaatkan oleh penduduk untuk memasak, meskipun ada juga yang masih memanfaatkan kayu bakar untuk memasak. Umumnya di daerah Kojadoi menggunakan kayu dari hutan, sedangkan hutan bakau hampir habis karena digunakan . Hal ini juga di Pemana maupun di Desa Kojagete hampir tidak dijumpai lagi hutan bakau.

Kondisi perumahan

Kondisi perumahan atau bentuk bangunan dapat menggambarkan budaya penduduknya. Seperti di pedesaan Sulawesi umumnya penduduk membangun rumah dengan bentuk panggung. Hal ini tentu saja terkait dengan bahan rumah terutama dengan memerlukan bambu dan kayu. Di wilayah perkotaan di Jawa banyak ditemukan rumah dengan dinding tembok atau batu bata (berbentuk *loji*). Di kawasan daratan Flores terutama di Kecamatan Kewapante umumnya bangunan rumah sudah berdinding tembok dan berdiri di atas tanah. Di kawasan Kojadoi dan Kojagete rumah berbentuk panggung, sehingga bahan bangunan banyak menggunakan kayu. Kayu umumnya diperoleh dari sekitar hutan yang ada di Pulau Besar atau mendatangkan daerah lain.

Tabel 3.4.12 :
Distribusi Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Tempat Tinggal,
Kabupaten Sikka. (Persen)

Keterangan	Luas lantai			
	< 8 m2	8 - 12 m2	> 12 m2	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kawasan Pulau- Pulau Kecil :				
Maumere	31,3	28,9	39,8	100,0(6070)
Kojadoi	48,8	25,2	35,2	100,0 (381)
Pemana	45,6	22,9	27,4	100,0 (861)
Kojagete	38,0	15,2	46,8	100,0 (250)
Kawasan Daratan :				
Kewapante	34,9	24,6	40,5	100,0 (7178)
Namangkewa	39,1	27,9	32,9	100,0 (179)
Watumilok	47,1	34,2	18,7	100,0 (389)
Kab. Sikka	34,7	27,4	30,1	100,0 (61498)

Sumber: Bappeda Kab, Sikka, Database Kabupaten Sikka, 2004

Catatan: () angka absolute.

Proporsi terbesar perumahan penduduk di Kabupaten Sikka kurang dari 8 m2. Keadaan ini ditunjukkan bahwa persentase terbesar luas lantai yang didiami rumahtangga tersebut 34,7 persen adalah luas lantai tempat tinggalnya kurang dari 8 m2. Namun di Kecamatan Kewapante ternyata persentase rumah tangga terbesar mendiami luas lantai 12 m2 lebi 40,5 persen) Hal ini ternyata juga seperti di Kecamatan Maumere (39,8 persen). Sedangkan untuk Desa Kojadoi tampak sebaliknya mereka umumnya tinggal dalam rumah yang luas lantainya kurang dari 8 m2 (48,8 persen), berbeda di Kojagete malah menunjukkan persentase terbesar (46,8 persen) mereka menenmpati luas lantai lebih dari 12 m2. Gambaran tersebut tampaknya berbeda di kawasan penelitian di Watumilok dan Namangkewa, yang mana rumah tangga di kedua desa tersebut sebagian besar mendiami rumah yang kurang dari 8 m2.

Tabel 3.4.13 :
Distribusi Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Rumah Tinggal ,
Kabupaten Sikka
(Persen).

Tempat	Tanah/ Pasir	Semen/ Papan	Ubin	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kawasan Pulau-Pulau Kecil :				
Kec. Maumere	43,9	49,8	6,2	100(6.201)
Desa Kojadoi	58,5	40,4	1,0	100(381)
Desa Pemana	26,8	65,1	8,1	100(861)
Desa Kojagete	65,2	31,8	2,0	100 (250)
Kawasan Daratan :				
Kec. Kewapante	48,5	46,4	3,7	100(7.218)
Desa Namangkewa	36,3	55,8	7,2	100(179)
Desa Watumilok	43,2	52,2	4,6	100(389)
Kab. Sikka	51,9	42,2	5,8	100(58.400)

Sumber : Bappeda Kab, Sikka, Database Kabupaten Sikka, 2004

Catatan : () angka absolute.

Kondisi tempat tinggal penduduk Kabupaten Sikka ternyata sebagian besar terdiri dari lantai tanah (52 persen). Keadaan ini hampir sama polanya dilihat dari kawasan penelitian yang mana umumnya rumah tangga penduduk mendiami rumah yang berlantai tanah. Hanya di Kecamatan Maumere mereka yang mendiami tempat tinggal berlantai semen atau papan tampaknya menunjukkan persentase terbesar (50 persen). Di Pemana dan Kojadoi bahwa sebagian besar penduduk tinggal di rumah berlantaikan semen dan kayu. Sebagian rumah tangga di Kojadoi tinggal di rumah panggung.

Tabel 3.4.14 :
Distribusi Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding
Rumah Tinggal Keluarga
(Persen)

Keterangan	Tidak Permanen	Setengah Permanen	Tembok/Bata	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kawasan Pulau-Pulau Kecil :				
Kec. Maumere	-	-	-	(6.070)
Desa Kojadoi	-	-	-	(381)
Desa Pemana	-	-	-	(861)
Desa Kojagete	-	-	-	(250)
Kawasan Daratan :				
Kec. Kewapante	65,4	21,8	12,7	100,0 (7.178)
Desa Namangkewa	58,1	22,9	18,9	100,0 (179)
Desa Watumilok	59,4	22,8	17,7	100,0 (389)
Kab. Sikka	63,4	22,9	13,6	100,0 (58.213)

Sumber : Bappeda Kab, Sikka, Database Kabupaten Sikka, 2004

Catatan : () angka absolut.

Kecamatan Kewapante yang sebagian besar rumah tangga tinggal di rumah tidak permanen dan setengah permanen (Tabel 3.4.14). Di dua desa kajian (Namangkewa dan Watumilok) pola rumah tinggal penduduknya juga tidak begitu banyak berbeda, di mana sebagian besar rumah tangga tinggal di rumah tidak permanen dan setengah permanen.

Sanitasi lingkungan

Dalam deskripsi tentang sanitasi lingkungan penduduk di Kabupaten Sikka akan dikemukakan tentang kondisi sumber air minum, keberadaan MCK dan tempat buang air besar.

Tabel 3.4.15 menunjukkan bahwa baru sekitar 25 persen rumah tangga di Kabupaten Sikka yang sudah memanfaatkan sumber air minum dari leding. Nampaknya hanya rumah tangga di perkotaan yang sudah menggunakan sumber air minum dari leding. Sementara sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Sikka masih menggunakan sumber air minum sumur, mata air dan lainnya. Kebanyakan para rumah tangga tersebut berada di daerah pedesaan. Sedangkan rumah tangga yang masih menggunakan mata air masih cukup tinggi (28,3 persen).

Tabel 3.4.15 :
Distribusi Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum
di Kabupaten Sikka. (Persen)

Jenis	2001	2002	2003
(1)	(2)	(3)	(4)
Leding	22,9	20,5	25,6
Pompa air	0,7	1,5	0,9
Sumur/perigi	18,1	20,5	17,6
Mata air	34,1	32,7	28,3
Lainnya	24,2	24,8	27,7
Jumlah	100,0	100,0	100,0
(N)	(53 792)	(54 949)	(54 253)

Sumber : BPSK, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab. Sikka, 2003

Tabel 3.4.16 menunjukkan bahwa di Kabupaten Sikka MCK sudah digunakan oleh 56 persen rumah tangga. Meskipun sebagian rumah tangga masih menggunakan MCK umum atau MCK bersama. Sedangkan 44 persen rumah tangga yang lain menyatakan belum ada sarana MCK. Dari Tabel 3.4.16 tersebut menunjukkan bahwa di

Kecamatan Maumere kondisinya cukup baik sekitar 61 persen rumah tangga telah memanfaatkan MCK. Namun di daerah kajian Desa Kojadoi ternyata masih ada sekitar 61 persen dan sekitar 52 persen rumah tangga di Desa Kojagete yang belum menggunakan MCK. Di Desa Pemana kondisinya kelihatan lebih baik dari pada Desa Kojadoi dan Kojagete.

Di Kecamatan Kewapante sekitar 59 persen rumah tangga menyatakan telah menggunakan MCK. Di desa penelitian (Namangkewa dan Watumilok) sebagian besar rumah tangga telah menggunakan MCK (Tabel 3.4.16). Perbedaan penggunaan MCK antara desa-desa kepulauan (Kojagete dan Kojadoi) dengan desa daratan (Namangkewa dan Watumilok) disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis dan kemampuan ekonomis rumah tangga.

Tabel 3.4.16 :
Distribusi Rumah Tangga Menurut Kepemilikan
Sarana MCK di Kabupaten Sikka. (Persen)

Keterangan	Tidak Ada	Ada/ Untuk Bersama	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Kawasan Pulau-Pulau Kecil :			
Kec. Maumere	38,9	61,1	100(6.070)
Desa Kojadoi	61,1	39,6	100(381)
Desa Pemana	32,1	67,8	100(861)
Desa Kojagete	52,3	47,7	100 (250)
Kawasan Daratan :			
Kec. Kemapante	42,2	58,8	100 (7. 156)
Desa Namangkewa	27,9	72,1	100(179)
Desa Watumilok	33,1	66,8	100(389)
Kabupaten Sikka	43,7	56,3	100(56.761)

Sumber : Bappeda Kab, Sikka, Database Kabupaten Sikka, 2004

Catatan : () angka absolute.

Khusus di Kojadoi dan Pemana ada perbedaan kondisi sanitasi yang cukup mencolok. Di Desa Pemana hampir seluruh rumah tangga telah menggunakan WC. Sebaliknya di Desa Kojadoi sebagian besar rumah tangga masih membuang air besar di sembarang tempat. Kondisi fisik tanah pemukiman di Kojadoi yang tidak memungkinkan rumah tangga membuat WC. Lahan tempat tinggal penduduk Kojadoi merupakan lahan timbunan batu karang, sehingga sulit untuk membuat galian lubang WC dan pembuangannya tetap ke laut juga.

Tabel 3.4.17 :
Distribusi Rumah Tangga Menurut Tempat Buang Air Besar
di Desa Kojadoi dan Desa Pemana, 2006

Tempat Buang Air Besar	Desa Kojadoi	Desa Pemana
(1)	(2)	(3)
WC	11,4	99,3
Sembarang tempat	88,6	0,7
Jumlah (N)	100,0 (317)	100,0 (897)

Sumber: Kantor Desa Kojadoi dan Pemana, 2006

BAB IV

PENDAPATAN PENDUDUK

Salah satu tujuan utama penelitian ini adalah meneliti tentang tingkat pendapatan penduduk, khususnya pendapatan dari kegiatan ekonomi dari sumber daya laut utamanya yang berbasis terumbu karang. Di samping itu, dalam bahasan juga menyajikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan tersebut. Pembahasan pendapatan disajikan dari tingkat makro kabupaten hingga tingkat mikro kawasan penelitian. Pada tingkat makro kabupaten data yang digunakan adalah produk domestik regional bruto. Sementara pada tingkat mikro menggunakan data hasil survei. Oleh karena itu, pendapatan penduduk pada tingkat mikro menyajikan pendapatan menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan kenelayanan. Dalam kenelayanan dibahas pendapatan menurut musim. Bagian akhir bab ini menyajikan tentang sintesa pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

4.1. Pendapatan di Tingkat Kabupaten

Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga yang berlaku) dianalisis untuk mendapatkan gambaran makro tentang kondisi perekonomian daerah, distribusi perekonomian per sektor dan mengukur pendapatan per kapita. Sebagai gambaran umum tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sikka antara tahun 2002 – 2004 adalah sekitar 5,2 persen, sementara pendapatan per kapita telah mencapai Rp. 1,951,000,- per tahun. Akan tetapi tingkat kemiskinan secara makro di kabupaten ini masih cukup tinggi, yaitu sebesar 19,2 persen (HDI, 2004). Menurut data Bappeda Kabupaten Sikka (2004)

juga menunjukkan jumlah rumah tangga miskin di kabupaten ini masih cukup tinggi, yakni mencapai 24,3 persen. Sementara di Kecamatan Maumere yang sebagian wilayahnya merupakan kawasan pulau-pulau kecil, jumlah rumah tangga miskin sedikit di bawah kabupaten adalah 21,2 persen dan di kawasan daratan Kecamatan Kewapante lebih rendah lagi 13,5 persen (Tabel 4.1.3). Sebagai indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah, analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga yang berlaku, digunakan dalam tulisan ini untuk mengamati struktur ekonomi dan pendapatan per sektor. Dalam tulisan ini tidak akan membandingkan dengan tahun sebelumnya untuk melihat pertumbuhan ekonomi Kabupaen Sikka, karena tidak tersedianya data series dan tidak tersedianya data PDRB pada harga konstan pada tahun tertentu. Tabel 4.1.1 menunjukkan bahwa kontribusi terbesar pada PDRB di Kabupaten Sikka pada tahun 2005 masih berasal dari sektor pertanian, sumbangan dari sektor tersebut masih sebesar 43,3 persen.

Tabel 4.1.1 :
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sikka Menurut Sektor
(Atas Dasar Harga Yang Berlaku), Tahun 2005

Sektor	PDRB (jutaan Rp)	Persen
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian	245,282,545	43,3
- Tanaman Pangan	118,959,202	21,0
- Tanaman Perkebunan	36,820,705	6,5
- Peternakan	42,485,429	7,5
- Kehutanan	8,497,085	1,5
- Perikanan	38,520,124	6,8
2. Pertambangan dan Galian	8,497,086	1,5
3. Industri Pengolahan	9,630,031	1,7
4. Listrik, Gas dan Air Minum	5,664,723	1,0
5. Bangunan / Kontruksi	44,184,846	7,8
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	88,369,693	15,6
7. Angkutan dan Komunikasi	43,051,902	7,6
8. Keuangan, Tersewaan dan Jasa Persh	14,161,809	2,5
9. Jasa lainnya	107,629,754	19,0
Jumlah	566,472,390	100,0

Sumber : Bappeda Kab. Sikka, 2005

Distribusi sektor pertanian terhadap PDRB tersebut merupakan kontribusi yang paling tinggi, kemudian diikuti oleh sektor jasa lainnya sebesar 19 persen dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 15,6 persen. Sektor jasa dan perdagangan merupakan sektor informal yang merupakan katup pengaman ekonomi baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Sektor informal tersebut kemungkinan sumbangannya akan cenderung meningkat selama sektor formal belum berkembang.

Untuk seluruh sektor pertanian tersebut (43,3 persen), ternyata kontribusinya masih didominasi subsektor tanaman pangan, yaitu sebesar 21 persen. Subsektor perikanan yang potensinya sangat besar di Kabupaten Sikka ternyata sumbangannya terhadap PDRB masih rendah, yaitu hanya 6,8 persen. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dan pengembangan sektor perikanan atau sumber daya laut di Kabupaten Sikka masih rendah. Apabila subsektor perikanan akan diangkat menjadi salah satu unggulan perekonomian daerah dan untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka diperlukan kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kemampuan teknologi yang dimiliki dan dikuasai dan permodalannya.

Tabel 4.1.2 :
Profil Rumah Tangga/Keluarga Kabupaten Sikka Berdasar Indikator Kemiskinan Menurut Kecamatan, Tahun 2004

Kecamatan		Status Rumah Tangga/ Keluarga					Jumlah
		Sangat Miskin	Miskin	Sedang	Mampu	Sangat Mampu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Maumere	a. Absolut	127	1.148	2.826	1.702	213	6.016
	b. <i>Persen</i>	2,1	19,1	47,0	28,3	3,5	100,0
2. Alok	a. Absolut	85	1.367	3.962	3.601	673	9.688
	b. <i>Persen</i>	0,9	14,1	40,9	37,2	6,9	100,0
3. Mego	a. Absolut	46	668	1.206	683	57	2.660
	b. <i>Persen</i>	1,7	25,1	45,3	25,7	2,1	100,0
4. Lela	a. Absolut	85	849	1.251	539	62	2.786
	b. <i>Persen</i>	3,1	30,5	44,9	19,3	2,2	100,0
5. PaluE	a. Absolut	171	922	722	137	3	1.955
	b. <i>Persen</i>	8,7	47,2	36,9	7,0	0,1	100,0

6. Paga	a. Absolut	235	1.544	2.690	1.207	92	5.768
	<i>b. Persen</i>	4,1	26,8	46,6	20,9	1,6	100,0
7. Nita	a. Absolut	108	1.220	2.545	1.494	199	5.566
	<i>b. Persen</i>	1,9	21,9	45,7	26,8	3,6	100,0
8. Kewapante	a. Absolut	62	902	3.655	2.394	166	7.179
	<i>b. Persen</i>	0,9	12,6	50,9	33,3	2,3	100,0
9. Talibura	a. Absolut	129	1.027	2.395	1.485	138	5.174
	<i>b. Persen</i>	2,5	19,8	46,3	28,7	2,7	100,0
10. Waigete	a. Absolut	154	1.096	1.943	760	74	4.027
	<i>b. Persen</i>	3,8	27,2	48,2	18,9	1,8	100,0
11. Bola	a. Absolut	181	1.508	2.240	1.252	105	5.286
	<i>b. Persen</i>	3,4	28,5	42,4	23,7	2,0	100,0
Kabupaten Sikka	a. Absolut	1.383	12.251	25.435	15.254	1.782	56.105
	<i>b. Persen</i>	2,5	21,8	45,3	27,2	3,2	100,0

Sumber : *Bappeda Kab. Sikka, Data Base Kabupaten Sikka Tahun 2004.*

4.2. Pendapatan Penduduk Tingkat Kawasan Penelitian

4.2.1. Kawasan Pulau-Pulau Kecil

- *Pendapatan per kapita dan pendapatan rumah tangga*

Pendapatan per kapita dalam tulisan ini disajikan dalam rata-rata pendapatan per bulan. Dalam tulisan ini pendapatan per kapita dihitung dari pendapatan seluruh rumah tangga sampel per bulan dibagi seluruh penduduk sampel. Tabel 4.2.1 menunjukkan bahwa pendapatan per kapita di daerah sampel kawasan pulau-pulau kecil hanya mencapai Rp 181. 850,17. Angka pendapatan per kapita tersebut apabila dibandingkan dengan batasan kemiskinan Bank Dunia (< 2 dollar/ hari = Rp 19.000) menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan per kapita per bulan di daerah penelitian kawasan pulau-pulau kecil masih jauh di bawahnya. Apabila dalam bentuk rupiah menurut kurs dollar pada saat penelitian dilakukan pendapatan per kapita mestinya minimal Rp 570.000 per bulan atau Rp 19.000 per hari. Kenyataan bagi penduduk di daerah sampel kawasan pulau-pulau kecil hanya sekitar Rp 181.850,00 per bulan atau sekitar

Rp 6.061,00 per hari. Ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk sampel di kawasan pulau-pulau kecil masih termasuk kategori miskin.

Rata-rata pendapatan rumah tangga sampel di kawasan pulau-pulau kecil ini mencapai sekitar Rp 756.503,00 per bulan. Angka tersebut ternyata terletak di atas angka mediannya hanya Rp 556.250,00. Ini menunjukkan bahwa modus pendapatan rumah tangga sampel di kawasan pulau-pulau kecil ini berada di bawah angka rata-rata pendapatan rumah tangga. Dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa minimum pendapatan rumah tangga di daerah penelitian ini sebesar Rp 113.333,33. Sementara maksimum pendapatan rumah tangga mencapai Rp 650.000,00. Ada kesenjangan yang cukup berarti antara pendapatan minimum rumah tangga dan maksimum pendapatan rumah tangga di daerah penelitian tersebut. Angka maksimum pendapatan rumah tangga tersebut masih berada di atas angka batasan Bank Dunia.

Tabel 4.2.1 :
Statistik Pendapatan, Kawasan Pulau-Pulau Kecil,
Kabupaten Sikka, Tahun 2006.

Pendapatan Per Bulan	Rupiah
(1)	(2)
• Per kapita	181.850,17
• Rata-rata Rumah Tangga (RT)	756.503,33
• Median RT	556.250,00
• Minimum pendapatan RT	113.333,33
• Maksimum pendapatan RT	650.000,00

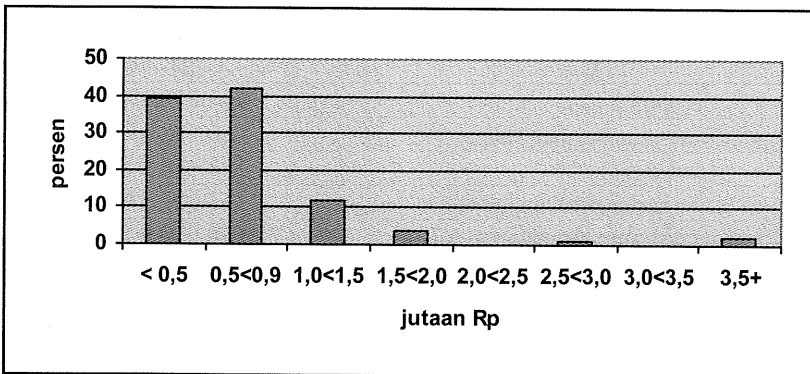
Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006

Catatan : Batas kemiskinan per kapita kriteria Bank Dunia 2 dollar atau Rp 18.000 per hari Kurs dollar pada saat penelitian Juni/Jul 2006 = Rp 9.500,00/ dollar

- *Pendapatan menurut kelompok pendapatan*

Berdasarkan kelompok pendapatan, sebagian besar (81 persen) rumah tangga sampel di kawasan pulau-pulau kecil ini berada pada kelompok pendapatan di bawah Rp 1.000.000,00 per bulan. Dari persentase tersebut 39 persen ternyata rumah tangga yang pendapatan per bulannya di bawah Rp 500.000,00. Kelompok rumah tangga ini merupakan rumah tangga miskin, di mana ada beberapa hal yang menyebabkan kemiskinannya. Pertama, rumah tangga tersebut merupakan rumah tangga nelayan dengan teknologi tradisional dengan armada (sampan) dan peralatan tangkap yang sederhana, sehingga pendapatan setiap kali melaut sangat kecil. Kedua, nelayan bagi rumah tangga tersebut merupakan satu-satunya sumber pendapatan. Ketiga, rumah tangga tersebut merupakan rumah tangga orang-orang jompo yang sudah tidak produktif lagi, sehingga pendapatannya sangat rendah. Bagi rumah tangga nelayan budi daya rumput laut kecilnya pendapatan mereka karena luas lahan budi daya mereka masih sempit lantaran permodalannya masih terbatas.

Gambar 4.1 :
Diagram Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan Kawasan Pulau-Pulau Kecil, Kabupaten Sikka, Tahun 2006.



Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sekitar 19 persen rumah tangga memiliki pendapatan di atas satu juta rupiah dan sekitar 3 persen adalah rumah tangga yang penghasilannya di atas Rp 2 juta per bulan. Nampaknya rumah tangga tersebut adalah rumah tangga di sektor perdagangan dan sektor jasa. Kemungkinan lain sumber pendapatan rumah tangga tersebut lebih dari satu sumber, ada yang dari kenelayanan, perdagangan, jasa dan sumber pendapatan lainnya, sehingga jumlah pendapatan rumah tangga seluruhnya menjadi lebih tinggi.

Tabel 4.2.2 :
Distribusi Rumah Tangga Terpilih Menurut Kelompok/Kategori
Pendapatan, Kawasan Pulau-Pulau Kecil, Kabupaten Sikka,
Tahun 2006.

No	Kelompok/ Kategori Pendapatan	Frekuensi	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<Rp 500.000	39	39,0
3	Rp 500.000 - Rp 999.000	42	42,0
4	Rp 1.000.000 – Rp 1.499.000	12	12,0
5	Rp 1.500.000 – Rp 1.999.000	4	4,0
6	Rp 2.000.000 – Rp 2.499.000	-	-
7	Rp 2.500.000 – Rp 2.999.000	1	1,0
8	Rp 3.000.000 – Rp 3.499.000	-	-
9	Rp 3.500.000 – Rp 4.000.000	2	2,0
	Jumlah	100	100,0
	Pendapatan rata-rata (Rp)	756.503,33	

Sumber: *Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006*

- *Pendapatan menurut lapangan pekerjaan*

Tabel 4.2.3 menunjukkan distribusi rumah tangga sampel menurut lapangan pekerjaan dan rata-rata pendapatan. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa ternyata sebagian besar jumlah rumah tangga

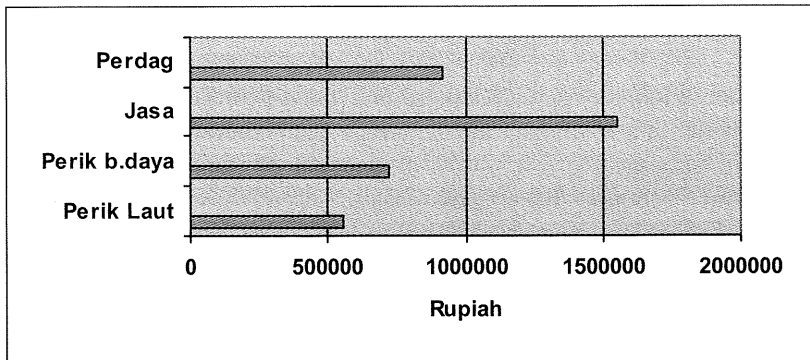
sampel (90 persen) di kawasan pulau-pulau kecil adalah rumah tangga perikanan budi daya. Sementara rumah tangga perikanan laut hanya mencapai 3 persen, rumah tangga sektor jasa 4 persen dan rumah tangga pedagang 3 persen.

Rumah tangga yang kepala rumah tangganya bekerja di sektor jasa rata-rata pendapatan per bulannya paling tinggi (Rp 1.555.250,00). Kemudian rumah tangga di sektor perdagangan mencapai Rp 918.333,33 per bulan. Pada urutan ketiga adalah rumah tangga di perikanan budi daya sebesar Rp 722.409,26 per bulan. Rumah tangga yang kepala rumah tangganya bekerja di sektor perikanan laut ternyata justru yang rata-rata pendapatan per bulannya paling rendah. Jumlah kepala rumah tangga di sektor perikanan laut dan rata-rata pendapatan yang rendah menandakan bahwa kegiatan di perikanan tangkap bagi kepala rumah tangga di kawasan pulau-pulau kecil sudah kurang menarik lagi. Banyak para nelayan yang beralih ke perikanan budi daya, utamanya budi daya rumput laut. Mengapa banyak kepala rumah tangga di kawasan pulau-pulau kecil beralih ke usaha budi daya rumput laut ?. Alasan yang berkaitan dengan pendapatan rumah tangga adalah :

1. Budi daya rumput laut telah menciptakan kesempatan kerja yang banyak, baik untuk diri nelayan maupun bagi keluarganya. Dengan adanya budi daya rumput laut seluruh anggota keluarga ikut aktif membantu usaha tersebut. Bagi isteri dan nenek/kakek dapat membantu menjemur hasil rumput yang telah dipanen. Isteri dan anak-anaknya dapat ikut menyiapkan tali pengikat bibit rumput laut, memasang pelampung dan mengikat bibit-bibit rumput laut sebelum ditebarkan atau ditanam di perairan yang mereka kuasai. Masing-masing rumah tangga semestinya memiliki lebih dari satu lokasi pengembangan rumput laut. Hal dilakukan agar panen dapat terus-menerus dengan lokasi yang berbeda, sehingga kegiatan dari penyiapan sampai panen, pencemuran dan pemasaran dapat terus berlangsung/ tak terputus. Selama ini rumah tangga yang memiliki lebih dari satu lokasi belum banyak.

2. Pemasaran hasil rumput laut cukup menjanjikan dan pemasarannya mudah, karena di desa penelitian sudah ada pedagang pengumpul rumput laut yang mau membeli setiap saat.
3. Dengan adanya usaha budi daya rumput laut pendapatan para nelayan relatif stabil, meskipun pendapatan dari usaha tersebut belum begitu tinggi. Menurut beberapa informan setelah memiliki usaha rumput laut mereka mampu menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah lanjutan.

Gambar 4.2 :
Diagram Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga/Bulan Menurut Lapangan Pekerjaan, di Kawasan Pulau-pulau Kecil, 2006



Peralihan usaha nelayan tangkap ke usaha budi daya rumput laut tersebut juga berkat adanya program COREMAP I yang masuk ke daerah penelitian pada tahun 2003. Program tersebut memberikan bantuan permodalan, bibit dan penyuluhan tentang teknologi usaha budi daya rumput laut yang benar.

Ilustrasi 4.1 :

Menurut informan H program pemberdayaan yang masuk ke Desa Kojadoi pada tahun 2000-an ada dua. Pertama, pada tahun 2003 dari COREMAP yang memberikan bantuan pinjaman modal Rp 1,5 juta per rumah tangga nelayan. Bantuan modal tersebut digunakan untuk membeli bibit, tali, pelampung dan tenaga kerja. Kedua, pada bulan Juni 2006 program dari Dinas Perikanan Kelautan, berupa pinjaman modal sebesar Rp 4 juta per rumah tangga nelayan, dengan bunga 1 persen dan harus lunas dalam jangka 2 tahun. Bantuan modal tersebut digunakan untuk membeli sampan, mesin, bibit, tali, pelampung dan ongkos kerja. Di Desa Kojadoi pada program kedua ini pinjaman modal diberikan kepada 70 rumah tangga atau 2 kelompok nelayan.

Sumber : Wawancara Mendalam

Kesenjangan pendapatan rumah tangga di sektor jasa tidak begitu mencolok, di mana rumah tangga yang memiliki pendapatan minimum sebesar Rp 1.336.000,00 dan rumah tangga pendapatan maksimum sebesar Rp 1.850.000,00. Rendahnya kesenjangan tersebut disebabkan mereka adalah PNS/guru dan karyawan lain yang pendapatan per bulan perbedaannya tidak begitu mencolok. Dalam peraturan pengajiannya tidak begitu ekstrim perbedaannya antar karyawan. Sebaliknya di sektor perdagangan, kesenjangan pendapatannya cukup mencolok. Pendapatan rumah tangga dari sektor perdagangan minimum adalah hanya sebesar Rp 300.000,00, sebaliknya pendapatan rumah tangga tertinggi adalah Rp 1.850.000,00. Rumah tangga yang memiliki pendapatan terendah di sektor perdagangan tersebut adalah hanya kios-kios kecil, seperti kios rokok atau warung-warung minum yang asetnya kecil dan pendapatannya juga kecil. Sedangkan rumah tangga yang pendapatannya dari sektor perdagangan yang pendapatannya maksimum adalah pedagang pengumpul rumput laut. Angka Rp 1.850.000,00 tersebut hanya pedagang pengumpul rumput laut yang kebetulan terkena sampel. Namun ada pedagang pengumpul lain yang

pendapatannya lebih tinggi yang kebetulan sebagai informan dalam wawancara mendalam (lihat Ilustrasi).

Ilustrasi 4.2 :

KD pedagang pengumpul rumput laut tiap minggu mampu mengumpulkan rumput laut kering dari para nelayan dari Desa Kojadoi sekitar 2 ton. Harga 2 ton rumput laut kering tersebut dibeli dari para nelayan seharga Rp 8.500.000,00. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan :

- *Biaya transpor = Rp 82.500,00*
- *Biaya tenaga angkut di desa = Rp 100.000,00*
- *Biaya tenaga angkut di pasar Geliting = Rp 100.000,00*
- *Jumlah seluruh biaya-biaya = Rp 282.500,00*

Hasil penjualan 2 ton rumput laut kering di Pasar Geliting (Kecamatan Kewapante) = Rp 9.500.000,00. Keuntungan bersih yang diterima KD = Rp 717.500,00/ minggu. Sebulan 4 kali mengirim dagangan rumput laut ke Pasar Geliting, jadi keuntungan yang diterima sekitar Rp 2.870.000,00/ bulan

Sumber : Wawancara Mendalam.

Kesenjangan pendapatan dalam rumah tangga perikanan laut tidak begitu mencolok, di mana pendapatan minimum sebesar Rp 333.333,33 dan pendapatan maksimum hanya Rp 907.500,00. Rendahnya kesenjangan tersebut disebabkan di daerah penelitian kawasan pulau-pulau kecil sudah tidak ada nelayan yang memiliki armada dengan kapal motor yang besar dan peralatan tangkap yang modern. Kebanyakan rumah tangga nelayan tangkap merupakan usaha nelayan tradisional dengan armada dan alat tangkap yang sederhana. Sayangnya kasus sampel rumah tangga perikanan laut ini sangat kecil, hanya 4 rumah tangga (4 persen). Sebagian besar nelayan tangkap di daerah ini telah beralih ke perikanan budi daya rumput laut.

Tabel 4.2.3 :
Statistik Pendapatan Rumah Tangga Menurut Lapangan Pekerjaan
Utama Kepala Rumah Tangga, Sampel Kawasan Pulau-Pulau Kecil,
Kabupaten Sikka, 2006

No	Lapangan Pekerjaan KRT	Pendapatan (Rupiah)			N
		Rata-Rata	Minimum	Maksimum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perikanan laut	552.500,00	333.333,33	907.500,00	4
2	Perikanan budi daya	722.409,26	113.333,33	650.000,00	89
3	Jasa	1.555.250,00	1.336.000,00	1.850.000,00	4
4	Perdagangan	918.333,33	300.000,00	1.800.000,00	3
5	Transportasi	-	-	-	-
6	Lainnya	-	-	-	-

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006

- *Pendapatan menurut jenis pekerjaan*

Sebagaimana telah diungkapkan di atas sebagian besar kepala rumah tangga sampel di kawasan pulau-pulau kecil memiliki jenis pekerjaan sebagai nelayan rumput laut. Sebagai wilayah kepulauan, sebagaimana telah dikemukakan di atas di daerah penelitian sebagian besar penduduk yang semula sebagai nelayan tangkap, sejak tahun 2003 telah banyak yang beralih ke usaha budi daya rumput laut. Pengetahuan dan teknologi usaha rumput laut telah lama dimiliki oleh sebagian penduduk daerah penelitian. Pada awal tahun 90-an ada pengusaha dari luar yang mengembangkan usaha budi daya rumput laut di Desa Kojadoi dan Kojagete. Usaha budi daya tersebut cukup berhasil. Usaha tersebut dilola secara baik dan yang lebih penting lagi telah memanfaatkan penduduk di desa-desa tersebut. Mereka mendapatkan pengetahuan bagaimana membudi dayakan rumput laut yang benar untuk mendapatkan produksi dan pendapatan yang tinggi.

Kemudian pada tanggal 12 Desember 1992 telah terjadi gempa bumi dan tsunami di daerah tersebut. Bencana tersebut telah merusak terumbu karang dan lahan usaha budi daya rumput laut. Akhirnya usaha rumput laut tersebut terhenti. Sebagaimana telah diungkap di atas pada tahun 2003 program COREMAP mengembangkan usaha budi daya rumput laut untuk penduduk nelayan Desa Kojadoi dan Kojagete, dengan memberikan permodalan dan pembibitan tentang rumput laut. Dengan modal pengetahuan dan teknologi yang telah dikenalnya, para nelayan di desa-desa tersebut menyambut program tersebut. Usaha budi daya rumput laut sampai sekarang diikuti oleh sebagian besar penduduk Desa Kojadoi.

Makin banyak penduduk dalam usaha budi daya rumput laut, sementara usaha nelayan tangkap makin menurun. Dari hasil penelitian ini hanya 4 persen kepala rumah tangga yang bekerja sebagai usaha nelayan tangkap. Ada 3 persen jumlah kepala rumah tangga yang memiliki usaha perdagangan dan ada 4 persen rumah tangga yang kepala rumah tangganya sebagai PNS/ guru/ jasa lainnya.

Ilustrasi 4.3 :

Kasus Pak Rajab nelayan berusia 50 tahun dengan satu isteri dan 3 orang anaknya yang telah beranjak dewasa memiliki usaha budi daya di beberapa lokasi dengan tanam dan panen yang bergantian. Dalam usaha budi daya rumput laut tersebut Rajab dibantu isteri dan tiga anaknya. Kegiatannya mulai dari membuat tali ikatan bibit, mengikat bibit di tali-tali tersebut dalam menanam di perairan. Kegiatan usaha telah dilakukan keluarga ini sekitar 4 tahun. Untuk menanam bibit-bibit tersebut tidak bisa dilakukan sendiri biasanya dibantu anak-anaknya dengan menggunakan perahu sampan. Dari hasil usaha rumput laut tersebut Rajab dapat tiap bulan panen atau 12 kali dalam setahun. Penghasilan rumah tangga Rajab dalam sebulan dapat mencapai Rp 1 juta atau Rp 12 juta dalam setahun.

Sumber: Wawancara Mendalam

Kesenjangan pendapatan pada rumah tangga yang kepala rumah tangganya sebagai nelayan rumput laut cukup tinggi. Rumah tangga dengan pendapatan terendah adalah Rp 113.333,33 dan pendapatan tertinggi adalah Rp 6.500.000,00. Kesenjangan yang cukup mencolok tersebut karena banyak para pengelola usaha rumput laut yang cukup berhasil. Usaha rumput laut bisa memanen tiap bulan, apabila memiliki lahan rumput laut yang luas atau beberapa tempat, sehingga panennya bisa berganti-ganti tempat tiap bulan.

Tabel 4.2.4 :
Statistik Pendapatan Rumah Tangga Terpilih Menurut Jenis Pekerjaan Kepala Rumah Tangga, Sampel Kawasan Pulau-Pulau Kecil, Kabupaten Sikka, Tahun 2006

No	Jenis Pekerjaan KRT	Pendapatan (Rupiah)			N
		Rata-rata	Minimum	Maksimum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nelayan tangkap	494.375,00	320.000,00	907.500,00	4
2	Nelayan rumput laut	726.930,71	113.333,33	6.500.000,00	89
3	Perdagangan	918.333,33	300.000,00	1.800.000,00	3
4	PNS/Guru/jasa lain	1.555.250,00	1.336.000,00	1.850.000,00	4

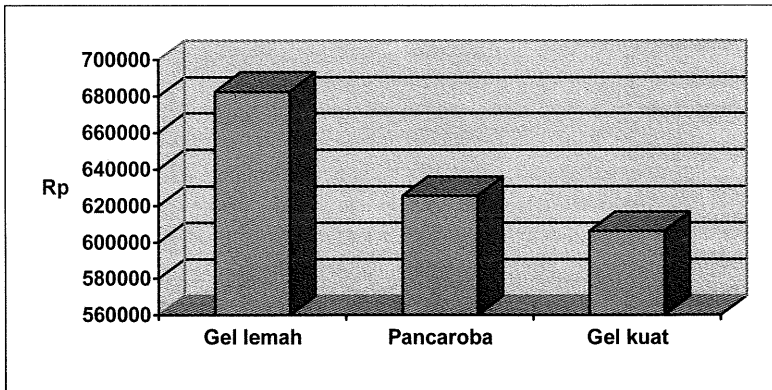
Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006

- *Pendapatan kenelayanan menurut musim dan kelompok pendapatan*

Setelah membahas pendapatan rumah tangga menurut lapangan pekerjaan dan jenis pekerjaan, berikut akan lebih fokus pada pendapatan rumah tangga khusus kenelayanan. Rumah tangga kenelayanan dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang

anggotanya bekerja di sektor perikanan tangkap dan mendapatkan pendapatan dari pekerjaan sebagai nelayan tangkap.

Gambar 4.3 :
Diagram Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga/ Bulan Kenelayanan
Menurut Musim di Kawasan Pulau-Pulau Kecil, 2006



Sebagaimana disinggung di atas, di kawasan pulau-pulau kecil jumlah rumah tangga kenelayanan (nelayan tangkap) yang terkena sampel hanya sebanyak 34 rumah tangga (34 persen). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga kenelayanan berdasarkan musim cukup bervariasi. Di mana rata-rata pendapatan tertinggi terjadi pada musim gelombang tenang/ lemah dan pendapatan yang terendah terjadi pada musim gelombang kuat. Sementara pada musim pancaroba terletak di antara dua angka pendapatan tersebut. Seperti telah diungkap pada bab sebelumnya mengapa pada musim gelombang tenang pendapatan kenelayanan paling tinggi? Pada musim tersebut jumlah hari melaut tiap bulan para nelayan jauh lebih banyak dari pada musim lainnya, sehingga jumlah pendapatan rata-rata per bulan paling tinggi (Rp 682.625,00). Apabila hal tersebut dibandingkan dengan musim gelombang kuat jauh berbeda, di mana pada musim tersebut jumlah hari melautnya jauh

lebih sedikit. Oleh karena itu, rata-rata jumlah pendapatan rumah tangga per bulannya menjadi lebih rendah (Rp 606.125,00).

Ilustrasi 4.4 :

Pak Tahiru nelayan bubu dari Kojadoi, Kecamatan Maumere yang berusia 80 tahun masih memanfaatkan penangkapan ikan sebagai sumber penghasilan utama. Sumber penghasilan lainnya adalah usaha budi daya rumput laut, usaha pertanian tanaman pangan dan kerajinan rumah tangga. Pada musim gelombang kuat (bulan 12- 02) mereka melaut hanya 14 kali sebulan, rata-rata pendapatan hanya Rp 140.000,00. Pada musim pancaroba (bulan 03-05) melaut 16 kali sebulan, rata-rata pendapatan Rp 300.000,-. Pada musim gelombang tenang (bulan 09-11) mereka berani melaut setiap hari, rata-rata pendapatan per bulan Rp 1.050.000,00. Biaya operasional sekali melaut Rp 20.000,00. Jumlah pendapatan rata-rata per bulan dalam satu tahun dengan sumber pendapatan lainnya rumah Tahiru mencapai di atas Rp 700.000,00. Tahiru tinggal bersama seorang isteri dan seorang anak perempuannya. Mereka semuanya bekerja membantu Tahiru. Alat/ sarana produksi yang dimiliki rumah tangga Tahiru hanya satu unit perahu tanpa motor ukuran 3 m x 0,6 m, 8 unit bubu dan 0,5 hektar lahan pertanian. Dengan pengeluaran rumah tangga sekitar Rp 326.000,00 per bulan, rumah tangga Tahiru masih bisa menabung dalam bentuk uang dan perhiasan.

Sumber : Wawancara Mendalam

Angka median pendapatan rumah tangga kenelayanan pada semua musim terletak di atas angka rata-rata pendapatan rumah tangga. Angka median juga variatif menurut musim, di mana tertinggi (Rp 698.333,33) pada musim gelombang tenang, agak menurun (Rp 664.125,00) pada musim pancaroba dan angka median terendah (Rp 609.125,00) pada musim gelombang kuat. Kemudian kesenjangan antara pendapatan kenelayanan minimum dan

maksimum pada semua musim menunjukkan angka yang cukup ekstrim. Pada musim gelombang tenang pendapatan minimum pada angka Rp 100.000,00 dan maksimum mencapai Rp 1.446.666,70, pada musim pancaroba pendapatan minimum hanya Rp 130.000,00 dan maksimum Rp 1.376.666,70, sementara pada musim gelombang kuat pendapatan minimum sebanyak Rp 100.000,00 dan maksimum sebesar Rp 1.376.666,70. Jadi dari tiga musim pendapatan maksimum per bulan mencapai angka di atas Rp 1 juta rupiah. Hal ini disebabkan bagi rumah tangga nelayan karena penggunaan armada kapal motor yang relatif agak besar dan alat tangkap yang lebih modern dibandingkan nelayan tradisional, sehingga dalam gelombang kuatpun masih mampu dan berani melaut. Jumlah hari melautnyapun juga tak banyak berbeda dengan musim gelombang tenang dan pada musim gelombang kuat, sehingga pendapatan tiap musim bagi nelayan kaya tidak ada perbedaan yang kontras.

Tabel 4.2.5 :
Statistik Pendapatan Rumah Tangga Dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim, Sampel Kawasan Pulau-Pulau Kecil, Kabupaten Sikka, Tahun 2006.

Pendapatan	Musim		
	Gelombang Lemah (Rp)	Pancaroba (Rp)	Gelombang Kuat (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata	682.625,00	625.492,65	606.125,00
Median	698.333,33	664.125,00	609.125,00
Minimum	100.000,00	130.000,00	100.000,00
Maksimum	1.446.666,70	1.376.666,70	1.376.666,70
Jumlah rumah tangga nelayan	(34)	(34)	(34)

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006

Bagaimana distribusi pendapatan rumah tangga yang dibedakan menurut kelompok pendapatan dan musim. Tabel 4.2.6. telah menunjukkan bahwa ternyata distribusi pendapatan menurut

kelompok pendapatan dan musim memperlihatkan pola yang hampir sama. Di mana jumlah rumah tangga sampel yang terbanyak adalah pada kelompok pendapatan Rp 500.000 – Rp 999.999. Pada musim gelombang tenang jumlah rumah tangga mencapai 47,1 persen, pada musim pancaroba dan musim gelombang kuat masing-masing 50 persen. Urutan kedua jumlah rumah tangga adalah pada kelompok pendapatan kurang Rp 500.000, di mana pada musim gelombang tenang sebanyak 32,4 persen rumah tangga kenelayanan, pada musim pancaroba sebanyak 38,2 persen dan pada musim gelombang kuat 35,3 persen. Pendapatan tertinggi di semua musim terletak pada kelompok pendapatan Rp 1.000.000,00 – Rp 1.500.000,00. Pada kelompok pendapatan tertinggi tersebut jumlah rumah tangga kenelayanan terletak antara sekitar 12 persen – 21 persen. Di mana rumah tangga terbanyak pada musim gelombang tenang/lemah sekitar 20,6 persen, musim gelombang kuat sekitar 14,7 persen dan yang terendah musim pancaroba (11,8 persen).

Tabel 4.2.6 :
Distribusi Rumah Tangga Sampel Menurut Kelompok Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan dan Musim, di Kawasan Pulau-Pulau Kecil, Kabupaten Sikka, Tahun 2006. (VERSI I)

No	Kategori Pendapatan	Musim (Persen)		
		Gelombang Lemah	Pancaroba	Gelombang Kuat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	< Rp 500.000	32,4	38,2	35,3
2	Rp 500.000 – Rp 999.999	47,1	50,0	50,0
3	Rp 1.000.000 – Rp 1.499.999	20,6	11,8	14,7
4	Rp 1.500.000 – Rp 1.999.999	-	-	-
5	Rp 2.000.000 – Rp 2.499.999	-	-	-
6	Rp 2.500.000 – Rp 2.999.999	-	-	-
7	Rp 3.000.000 – Rp 3.499.999	-	-	-
8	Rp 3.500.000 +	-	-	-
	Jumlah	100,0	100,0	100,0
	(N)	(34)	(34)	(34)

Sumber: *Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006*

Tabel 4.6a menunjukkan bahwa sekitar sepertiga jumlah rumah tangga sampel kenelayanan memperoleh pendapatan per bulan di bawah Rp 500.000,00. Dari jumlah rumah tangga tersebut ternyata menyebar di semua kelompok pendapatan. Dari tabel tersebut tidak satupun rumah tangga sampel yang pendapatannya di bawah Rp 100.000,00.

Tabel 4.2.6a
Distribusi Rumah Tangga Sampel Menurut Kelompok Pendapatan
dari Kegiatan Kenelayanan dan Musim, di Kawasan Pulau-Pulau
Kecil, Kabupaten Sikka, Tahun 2006
(VERSI II)

No	Kategori Pendapatan	Musim (Persen)		
		Gelombang Lemah	Pancaroba	Gelombang Kuat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	< Rp 100.000	-	-	-
2	Rp 100.000 - Rp 199.999	8,8	8,8	11,8
3	Rp 200.000 – Rp 299.999	11,8	11,8	11,8
4	Rp 300.000 – Rp 399.999	2,9	11,8	8,8
5	Rp 400.000 – Rp 499.999	8,8	5,9	2,9
6	Rp 500.000 +	67,6	61,8	64,7
	Jumlah	100,0	100,0	100,0
	(N)	(34)	(34)	(34)

Sumber: *Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006*

4.2.2. *Kawasan daratan*

- *Pendapatan per kapita dan pendapatan rumah tangga*

Pendapatan per kapita penduduk sampel di kawasan daratan di Kabupaten Sikka ini ternyata lebih tinggi (Rp 246.316,48) dari pada di kawasan pulau-pulau kecil (Tabel 4.7). Kondisi ini ternyata juga tercermin dari rata-rata pendapatan rumah tangga, di mana di

kawasan pulau-pulau kecil hanya Rp 756.503,33, sementara di kawasan daratan ini telah mencapai Rp 1.115.437,70. Mengapa pendapatan rata-rata rumah tangga sampel di kawasan daratan lebih tinggi dari pada di kawasan pulau-pulau kecil akan dibahas lebih rinci pada subbab berikutnya. Sementara angka median (nilai tengah) pendapatan rumah tangga sampel di kawasan ini jauh lebih rendah dari pada rata-rata pendapatan rumah tangga sampel, yakni hanya mencapai Rp 500.000,00. Dengan angka median tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar rumah tangga sampel nelayan di kawasan ini memperoleh pendapatan yang agak rendah, hanya sekitar Rp 500.000,00. Uraian ini akan lebih jelas dalam pembahasan tentang distribusi rumah tangga menurut kelompok pendapatan dalam subbab berikutnya.

Dari Tabel 4.2.7 juga menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat tajam antara rumah tangga sampel dengan pendapatan minimum dengan rumah tangga sampel dengan pendapatan maksimum. Fakta ini mengindikasikan kurang adanya pemerataan pendapatan dalam rumah tangga di kawasan daratan. Rumah tangga dengan pendapatan minimum di kawasan ini hanya sekitar Rp 20.000,00, sementara rumah tangga yang pendapatannya maksimum dapat mencapai Rp 7.370.000,00. Penyebab kesenjangan pendapatan ini akan dibahas dalam subbab berikutnya.

Tabel 4.2.7 :
Statistik Pendapatan Penduduk dan Rumah Tangga Sampel,
di Kawasan Daratan, Kabupaten Sikka, Tahun 2006.

Pendapatan Per Bulan	Rupiah
(1)	(2)
• Per kapita	246.316,48
• Rata-rata Rumah Tangga (RT)	1.115.437,70
• Median RT	500.000,00
• Minimum pendapatan RT	20.000,00
• Maksimum pendapatan RT	7.370.000,00

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006

- *Pendapatan menurut kelompok pendapatan*

Di kawasan daratan pola distribusi rumah tangga menurut kelompok pendapatan menunjukkan gambaran yang menarik. Meskipun rata-rata pendapatan rumah tangga sampel di atas angka Rp 1 juta, namun ternyata apabila dilihat distribusinya ternyata lebih mengelompok ke kelompok pendapatan rendah. Tabel 4.2.8 memperlihatkan bahwa secara umum sebagian besar rumah tangga (81,8 persen) berada pada kelompok pendapatan yang rendah (di bawah Rp 1.000.000). Kemudian ada sekitar 50 persen rumah tangga berada pada kelompok pendapatan kurang dari Rp 500.000,00. Secara umum hanya sekitar 18 persen rumah tangga sampel yang memiliki pendapatan di atas Rp 1 juta. Distribusi rumah tangga menurut kelompok pendapatan tersebut memang belum menunjukkan lapangan pekerjaan mana yang pendapatannya tinggi dan kelompok mana yang pendapatannya rendah. Dalam uraian subbab berikutnya dibahas tentang jenis lapangan pekerjaan tersebut.

Tabel 4.2.8 :

Distribusi Rumah Tangga Sampel Menurut Kelompok/ Kategori Pendapatan, di Kawasan Daratan, Kabupaten Sikka, Tahun 2006.

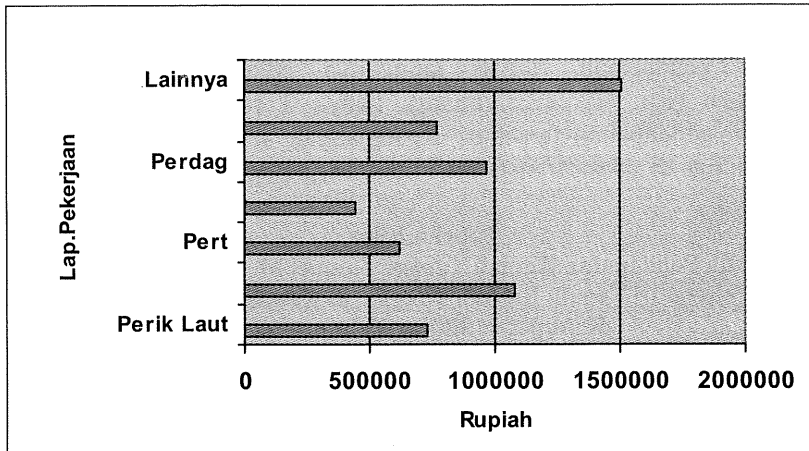
No	Kategori Pendapatan	Frekuensi	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<Rp 500.000	50	50,5
3	Rp 500.000 - Rp 999.000	31	31,3
4	Rp 1.000.000 – Rp 1.499.000	7	7,1
5	Rp 1.500.000 – Rp 1.999.000	4	4,0
6	Rp 2.000.000 – Rp 2.499.000	3	3,0
7	Rp 2.500.000 – Rp 2.999.000	1	1,0
8	Rp 3.000.000 – Rp 3.499.000	1	1,0
9	Rp 3.500.000 – Rp 4.000.000	2	2,0
	Jumlah	99	100,0
	Pendapatan rata-rata	1.115.437,70	

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, 2006

- *Pendapatan menurut lapangan pekerjaan*

Tabel 4.2.9 menunjukkan adanya variasi pendapatan menurut lapangan pekerjaan/ sektor. Rata-rata pendapatan rumah tangga sampel menurut lapangan pekerjaan yang nampak tertinggi adalah perikanan budi daya, yakni sebesar Rp 1.079.166,70 per bulan. Sayang jumlah sampelnya hanya 4 rumah tangga. Mereka adalah rumah tangga yang kepala rumah tangganya mengusahakan rumpun yang penghasilannya lebih baik dari pada kebanyakan nelayan tangkap. Namun demikian rata-rata pendapatan rumah tangga di perikanan tangkap per bulan masih cukup baik, yakni Rp 727.424,53. Hanya disparitas pendapatan antara rumah tangga pendapatan minimum dengan rumah tangga pendapatan maksimum cukup mencolok. Di mana rumah tangga pendapatan minimum hanya mencapai Rp 20.000,00, sementara rumah tangga pendapatan maksimum jauh lebih tinggi (Rp 6.768.333,30). Rumah tangga yang berpendapatan tinggi tersebut apabila dalam rumah tangga nelayan adalah nelayan kaya yang menggunakan sarana yang teknologinya lebih tinggi. Mereka memiliki armada kapal motor yang mampu menangkap ikan tuna sampai perairan Sulawesi Tenggara, sekitar Pulau PaluE, di belakang Pulau Babi, perairan Larantuka bahkan ke perairan Maluku Tenggara. Mereka berani melaut di kedalaman lebih dari 100 m. Oleh karena itu, mereka sekali melaut sampai menghabiskan waktu lebih dari satu minggu. Namun pendapatan para nelayan dan sekaligus pemilik kapal motor tersebut cukup tinggi, bisa mencapai lebih Rp 6 juta per bulan.

Gambar 4.4:
Diagram Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga/Bulan Menurut Lapangan Pekerjaan, di Kawasan Pulau-pulau Kecil, 2006



Di kawasan daratan (di Desa Namangkewa dan Watumilok) pendapatan rata-rata di sektor perdagangan cukup baik. Meskipun hanya 15 rumah tangga sampel namun rata-rata pendapatannya sebesar Rp 968.222,22. Disparitas pendapatan tertinggi dan terendah di sektor perdagangan ini cukup tinggi. Minimum pendapatan sebesar Rp 166.666,67 sedangkan pendapatan maksimumnya dapat mencapai Rp 2.533.333,30. Pendapatan rumah tangga terkecil adalah rumah tangga yang kepala rumah tangganya hanya membuka kios-kios kecil yang pendapatannya kecil atau sebagai *papalele* (penjaja ikan). Sementara pendapatan rumah tangga tertinggi adalah rumah tangga yang membuka toko-toko kelontong dengan pendapatan cukup tinggi.

Rata-rata pendapatan rumah tangga menurut lapangan pekerjaan di sektor pertanian menunjukkan angka yang cukup baik (Rp 622.950,98/bulan), meskipun masih di bawah rata-rata pendapatan rumah tangga di sektor perikanan laut. Hanya kesenjangan antara pendapatan tertinggi dan terendah cukup tinggi. Pendapatan rumah tangga minimum hanya mencapai Rp 33.333,33,

sementara pendapatan maksimumnya mencapai Rp 1.486.000,98. Perbedaan yang tajam dalam pendapatan di sektor pertanian tersebut disebabkan perbedaan luas lahan yang dikuasai dan jenis tanaman yang ditanam. Bagi rumah tangga dengan lahan luas, sektor pertanian ini merupakan sumber pendapatan alternatif. Sektor lainnya yang rata-rata pendapatan rumah tangganya cukup tinggi adalah transportasi (Rp 772.222,22/bulan), hanya 3 rumah tangga yang memiliki pendapatan tersebut. Kesenjangan rata-rata pendapatan rumah tangga di sektor transportasi tidak begitu besar.

Tabel 4.2.9 :
Statistik Pendapatan Rumah Tangga Sampel Menurut Lapangan Pekerjaan Kepala Rumah Tangga, di Kawasan Daratan, Kabupaten Sikka, Tahun 2006

No	Lapangan Pekerjaan KRT	Pendapatan (Rupiah)			N
		Rata-rata	Minimum	Maksimum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perikanan laut	727.424,53	20.000,00	6.768.333,30	53
2	Perikanan budi daya	1.079.166,70	200.000,00	3.666.666,70	4
3	Pertanian tanaman pangan dan keras	622.950,98	33.333,33	1.486.000,98	17
4	Jasa	441.566,67	85.000,00	848.666,67	5
5	Perdagangan & Industri Rumah Tangga	968.222,22	166.666,67	2.533.333,3	15
6	Transportasi	772.222,22	550.000,00	1.000.000,00	3
7	Lainnya	1.510.000,00	820.000,00	2.200.000,00	2

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, 2006

- *Pendapatan menurut jenis pekerjaan*

Pendapatan rumah tangga sampel menurut jenis pekerjaan di kawasan daratan dapat dilihat dalam Tabel 4.2.10. Rata-rata pendapatan rumah tangga sampel tertinggi (Rp 1.041.282,10) ternyata pada rumah tangga yang kepala rumah tangganya sebagai pedagang kebutuhan rumah tangga. Mereka adalah rumah tangga yang membuka toko. Rumah tangga berikutnya adalah rumah tangga yang kepala rumah tangganya sebagai tenaga industri (Rp 762.222,22). Mereka adalah rumah tangga yang kepala rumah tangganya memiliki usaha pembuatan minyak goreng dari kelapa.

Kemudian urutan ketiga adalah rumah tangga nelayan tangkap (Rp 746.431,55). Pada rumah tangga nelayan tangkap ini kesenjangan antara pendapatan minimum dan maksimum sangat mencolok. Kesenjangan terjadi antara rumah tangga nelayan tradisional atau ABK (anak buah kapal) dengan nelayan pemilik kapal motor. Nelayan pemilik ini biasanya mendapat bagian dari sewa kapal, bagian sebagai nelayan (ikut melaut) dan biasanya juga merangkap sebagai pedagang/ pengumpul ikan. Oleh karena itu, jumlah seluruh penerimaannya dari hasil melaut paling tinggi.

Tabel 4.2.10 :

Statistik Pendapatan Rumah Tangga Sampel Menurut Jenis Pekerjaan Kepala Rumah Tangga, di Kawasan Daratan, Kabupaten Sikka, Tahun 2006.

No	Jenis Pekerjaan KRT	Pendapatan (Rupiah)			N
		Rata-rata	Minimum	Maksimum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nelayan tangkap	746.431,55	20.000,00	6.768.333,33	56
2	Petani pangan	637.093,75	33.333,33	1.486.000,00	16
3	Pedagang ikan	493.333,33	166.666,67	493.333,33	2
4	Pedagang kebutuhan RT	1.041.282,10	200.000,00	2.533.333,30	13
5	Tenaga jasa	426.958,33	85.000,00	848.666,67	4
6	Tenaga industri	762.222,22	400.000,00	1.066.666,70	3
7.	Tenaga lainnya	1.003.333,30	500.000,00	2.200.000,00	5

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, 2006

- *Pendapatan rumah tangga kenelayanan menurut musim dan kelompok pendapatan*

Di kawasan daratan ada variasi rata-rata pendapatan rumah tangga kenelayanan menurut musim. Tabel 4.2.11 menunjukkan bahwa pada musim gelombang tenang rata-rata pendapatan rumah tangga kenelayanan ternyata paling tinggi. Pada musim tersebut pendapatan mencapai Rp 1.311.690,50. Dalam musim ini pendapatan rata-rata rumah tangga cukup tinggi hampir semua nelayan dapat melaut dan frekuensi melaut tiap bulannya cukup tinggi. Mereka melaut bisa lebih dari 20 kali dalam sebulan. Rata-rata pendapatan rumah tangga tersebut selanjutnya menurun agak drastis pada musim pancaroba, yakni hanya sebesar Rp 757.407,41. Rata-rata pendapatan rumah tangga mencapai titik terendah pada musim gelombang kuat. Pada musim ini pendapatan turun drastis hanya sebesar Rp 247.619,05.

Tabel 4.2.11 memperlihatkan adanya kesenjangan antar pendapatan pada rumah tangga kenelayanan yang cukup tinggi. Hal ini terjadi di semua musim, baik musim gelombang tenang, musim pancaroba maupun musim gelombang kuat. Kesenjangan paling tinggi terjadi pada musim gelombang tenang, kemudian agak rendah pada musim pancaroba dan yang terendah pada musim gelombang kuat.

Tabel 4.2.11 :
Statistik Pendapatan Rumah Tangga Sampel Dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim, di Kawasan Daratan, Kabupaten Sikka, Tahun 2006.

Pendapatan	Musim (Rupiah)		
	Gelombang Lemah	Pancaroba	Gelombang Kuat
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata	1.311.690,50	757.407,41	247.619,05
Median	490.000,00	212.500,00	30.000,00
Minimum	16.000,00	10.000,00	10.000,00
Maksimum	15.000.000,00	13.600.000,00	3.000.000,00

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006.

Di kawasan daratan ada korelasi antara kondisi musim dengan distribusi pendapatan rumah tangga. Pada musim gelombang tenang pendapatan rumah tangga kenelayanan menyebar hampir di semua kelompok pendapatan. Hanya proporsi pada kelompok pendapatan di bawah Rp 500.000,00 ternyata masih cukup besar. Sekitar 54 persen rumah tangga masih berada pada kelompok pendapatan di bawah Rp 500.000,00. Mereka adalah para rumah tangga nelayan tradisional yang wilayah tangkapannya tidak jauh dari pantai.

Dalam musim pancaroba pola distribusi pendapatan rumah tangga tersebut berbeda dengan di musim gelombang tenang. Proporsi jumlah rumah tangga pada kelompok pendapatan menengah ke atas ada kecenderungan menurun, bahkan tidak ada rumah tangga pada kelompok pendapatan Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000. Jumlah rumah tangga pada kelompok pendapatan Rp 3 juta ke atas cenderung menurun. Sementara jumlah rumah tangga pada kelompok pendapatan di bawah Rp 1 juta meningkat cukup berarti. Penurunan pendapatan tersebut lebih pasti disebabkan jumlah frekuensi atau jumlah hari kegiatan melaut sudah mulai menurun, sehingga jumlah pendapatan per bulannya cenderung menurun.

Dalam musim gelombang kuat, di kawasan daratan pola distribusi pendapatannya sangat berbeda dengan musim-musim lainnya. Pada musim gelombang kuat ini jumlah rumah tangga kenelayanan ini ternyata sangat terkonsentrasi pada kelompok pendapatan terbawah (di bawah Rp 500.000,00). Hal yang menarik ternyata 98,5 persen rumah tangga berada pada kelompok pendapatan tersebut. Dalam penelitian tidak muncul rumah tangga kenelayanan yang pendapatannya terletak pada kelompok Rp 500.000 – Rp 3.000.000. Dalam penelitian hanya sekitar 1,5 persen rumah tangga yang berada pada kelompok pendapatan di atas Rp 3 juta.

Ilustrasi 4.5 :

UJ salah satu contoh nelayan yang cukup berhasil di Namangkewa, Kecamatan Kewapante. Nelayan yang berusia 46 tahun, beristri SF dan 2 anak Sl dan Sf ini tetap bertahan sebagai nelayan khusus ikan kombong. Rata-rata penghasilan per bulan mencapai Rp 3.000.000,00 pada musim gelombang kuat dan di atas Rp10.000.000,- di musim lainnya. Alat/ sarana produksi yang dimiliki rumah tangga adalah satu unit perahu motor dalam, ukuran mesin 8 PK dan ukuran body 7m x 1 m; satu unit perahu tanpa motor dengan ukuran body 3m x 0,7m; 8 unit pukot dan 5 unit pancing rintas. Dalam kegiatan melaut UJ dibantu 4 orang ABK (anak buah kapal). Rumah tangga Umoro juga memiliki rumah permanen, satu unit TV, satu unit VCD player, satu unit parabola dan 5 unit perhiasan. Dengan pendapatan yang cukup tinggi dibanding tetangganya, rumah tangga Umoro tidak pernah mengalami kesulitan keuangan.

Sumber : Wawancara Mendalam

Tabel 4.2.12 :

Distribusi Rumah Tangga Sampel Menurut Kelompok Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan dan Musim, di Kawasan Daratan, Kabupaten Sikka, 2006. (VERSI I)

No	Kategori Pendapatan	Musim (Persen)		
		Gelombang Lemah	Pancaroba	Gelombang Kuat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	< Rp 500.000	53,8	75,4	98,5
2	Rp 500.000 - Rp 999.000	9,2	12,3	-
3	Rp 1.000.000 – Rp 1.499.000	12,3	7,7	-
4	Rp 1.500.000 – Rp 1.999.000	3,1	-	-
5	Rp 2.000.000 – Rp 2.499.000	9,2	-	-
6	Rp 2.500.000 – Rp 2.999.000	1,5	-	-
7	Rp 3.000.000 – Rp 3.499.000	4,6	1,5	1,5
8	Rp 3.500.000 +	6,2	3,1	-
	Jumlah	100,0	100,0	100,0
	(N)	(65)	(65)	(65)

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006

Tabel 4.2.12a menggambarkan distribusi pendapatan yang lebih rinci pada kelompok pendapatan di bawah Rp 500.000. Tabel tersebut memperlihatkan adanya pola distribusi rumah tangga nelayan yang berbeda pada kelompok pendapatan dan musim yang berbeda. Pada musim gelombang tenang jumlah rumah tangga nelayan menyebar di semua kelompok pendapatan di bawah Rp 500.000,00. Sementara di musim pancaroba sedikit berbeda, di mana jumlah rumah tangga nelayan pada kelompok pendapatan di bawah Rp 100.000,00 cukup menonjol (40 persen). Pola tersebut lebih berbeda lagi pada musim gelombang kuat. Pada musim ini jumlah rumah tangga nelayan sangat terkonsentrasi pada kelompok pendapatan yang terbawah. Di mana sekitar 89 persen jumlah rumah tangga nelayan berada pada kelompok pendapatan di bawah Rp 100.000,00. Pola ini disebabkan pada musim tersebut frekuensi para nelayan melaut paling sedikit, sehingga banyak rumah tangga nelayan yang pendapatannya menurun drastis.

Tabel 4.2.12a :
Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan dan Musim, Sampel Kawasan Daratan, Kabupaten Sikka, 2006 (Persen). (VERSI II)

No	Kategori Pendapatan	Musim		
		Gelombang Lemah	Pancaroba	Gelombang Kuat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	< Rp 100.000	18,5	40,0	89,2
2	Rp 100.000 - Rp 199.999	4,6	15,4	-
3	Rp 200.000 – Rp 299.999	9,2	10,8	4,6
4	Rp 300.000 – Rp 399.999	6,2	1,5	4,6
5	Rp 400.000 – Rp 499.999	13,8	7,7	-
6	Rp 500.000 +	47,7	24,6	1,5
	Jumlah	100,0	100,0	100,0
	(N)	(65)	(65)	(65)

Sumber: *Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006*

4.3. Sintesa Pendapatan Penduduk

Ada perbedaan yang mencolok tentang pendapatan per kapita dan rata-rata rumah tangga antara daerah kawasan pulau-pulau kecil dan kawasan daratan. Di kawasan pulau-pulau kecil pendapatan per kapita penduduk per bulan (Rp 181.850,07) lebih kecil dibandingkan dengan di kawasan daratan (Rp 246.316,48). Apabila menggunakan kriteria Bank Dunia (2 dollar/ hari atau 60 dollar/ bulan) pendapatan per kapita di dua lokasi penelitian masih termasuk di bawah garis kemiskinan. Tapi apabila menggunakan kriteria BPS (2001) tahun 1999 batas garis kemiskinan per kapita di daerah pedesaan Rp 69.420,00, maka pendapatan per kapita di dua lokasi penelitian ini masih di atas garis kemiskinan.

Dilihat dari rata-rata pendapatan rumah tangga per bulan juga ada perbedaan yang cukup besar antara dua lokasi penelitian tersebut, di mana rata-rata pendapatan rumah tangga di kawasan pulau-pulau kecil (Rp 756.503,33) juga lebih rendah dari pada di kawasan daratan (Rp 1.115.437,70). Namun dilihat tingkat kesenjangan rata-rata pendapatan rumah tangga antara yang maksimum dan minimum, ternyata di kawasan daratan justru kesenjangan lebih lebar dari pada di kawasan pulau-pulau kecil. Dengan kata lain tingkat pemerataan pendapatan rumah tangga di kawasan pulau-pulau kecil lebih merata dibandingkan di kawasan daratan. Perbedaan kesenjangan tersebut disebabkan adanya perbedaan variasi lapangan dan jenis pekerjaan. Di kawasan daratan, lapangan dan jenis pekerjaan penduduknya lebih variatif, sedangkan di kawasan pulau-pulau kecil kurang variatif dan lebih banyak terkonsentrasi pada lapangan perikanan budi daya dan jenis pekerjaan melakukan usaha budi daya rumput laut. Jadi di kawasan pulau-pulau, lapangan dan jenis pekerjaan penduduknya relatif lebih homogen.

Ada variasi rata-rata pendapatan rumah tangga pada lapangan dan jenis pekerjaan kepala rumah tangga yang berbeda. Besarnya rata-rata pendapatan rumah tangga tersebut di samping karena perbedaan lapangan dan jenis pekerjaan, juga dipengaruhi oleh besarnya partisipasi anggota rumah tangganya yang berkontribusi dari

sumber pendapatan lainnya. Bagi rumah tangga sampel di kawasan pulau-pulau kecil kegiatan usaha budi daya menghasilkan pendapatan yang lebih baik dan menjanjikan daripada kegiatan perikanan tangkap. Usaha budi daya rumput laut mempunyai beberapa manfaat baik bagi rumah tangga nelayan maupun pelestarian lingkungan. Manfaat ini antara lain memberikan pendapatan rumah tangga yang lebih baik tidak begitu terpengaruh musim, memberikan peluang kerja bagi seluruh anggota rumah tangga nelayan, dan membantu pelestarian terumbu karang sebab tidak menguras biota yang ada di karang dan ikut membersihkan kotoran atau sampah di karang. Sementara budi daya rumput laut di daerah penelitian kawasan daratan belum banyak dikembangkan. Di daerah ini bagi para nelayan, kegiatan perikanan tangkap masih menjadi sumber penghasilan utama dan juga kegiatan yang terkait, seperti pengumpul dan pedagang ikan (*papalele*).

Masuknya teknologi budi daya rumput laut pada awal tahun 90-an telah memberikan pengetahuan dan mengenalkan teknologi budi daya rumput laut. Masuknya program COREMAP I untuk memberikan pinjaman modal dan pelatihan dalam budi daya rumput laut telah membawa perubahan atau peralihan kegiatan di kawasan pulau-pulau kecil dari nelayan tangkap ke nelayan budi daya rumput laut. Peralihan kegiatan tersebut mulai terjadi sejak tahun 2003 dan ternyata makin banyak nelayan kawasan ini yang melakukannya, apalagi setelah mereka mengetahui manfaat yang dirasakan. Di samping itu, sebagai wilayah kepulauan secara geografis perairan di kawasan tersebut cukup cocok untuk budi daya rumput laut. Perairannya agak kurang terpengaruh ombak besar/ terlindung di teluk atau selat dan agak dangkal. Peralihan dari nelayan perikanan tangkap ke arah budi daya seperti di kawasan pulau-pulau kecil tersebut di daerah penelitian kawasan daratan belum begitu nampak. Memang sudah ada beberapa rumah tangga nelayan yang telah mencoba budi daya rumput laut dan budi daya ikan melalui rumpon, namun masih sangat terbatas jumlahnya dan belum berpengaruh terhadap nelayan yang lain. Pada tahun 2003 memang ada program dari Dinas Perikanan dan Kelautan untuk budi daya perikanan, namun

untuk pengembangan rumpon dan jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan program lainnya berupa bantuan alat tangkap dan penyuluhan.

Baik bagi para nelayan di kawasan pulau-pulau kecil maupun di kawasan daratan, musim berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga nelayan. Di mana rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan pada musim gelombang tenang/ lemah lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pendapatan rumah tangga di musim gelombang kuat. Pengaruh musim tersebut akan berkurang apabila rumah tangga nelayan tradisional telah menggunakan armada dan alat tangkap dengan teknologi yang lebih modern. Oleh karena itu, untuk mengembangkan dan membantu para nelayan agar pendapatannya meningkat bantuan sarana (armada dan alat tangkap) yang lebih modern sangat diperlukan, agar pengaruh musim dapat berkurang. Di samping itu, tersedianya sarana pendukung lainnya seperti pabrik es, pabrik pengolahan hasil laut pasca panen dan yang terkait dengan pemasaran juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.

BAB V

KESIMPULAN & REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Wilayah Kabupaten Sikka memiliki bentangan terumbu karang yang cukup luas, yakni tersebar di perairan wilayah selatan dan di perairan wilayah utara (Teluk Maumere). Di wilayah utara sebagian besar bentangan terumbu karangnya telah mengalami kerusakan, terutama selama 15 tahun terakhir. Kerusakan terumbu karang tersebut disebabkan oleh bencana alam dan ulah manusia. Bencana alam yang merusak terumbu karang adalah gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada tanggal 12 Desember 1992, sementara kerusakan karena ulah manusia antara lain : penangkapan sumber daya laut yang menggunakan bom dan racun, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (pukat harimau) dan pembabatan hutan.

Sebagian besar penduduk kawasan pulau-pulau kecil dan penduduk pesisir kawasan daratan adalah para nelayan, namun hasil tangkapan sumber daya lautnya sudah semakin berkurang selama 15 tahun terakhir akibat rusaknya ekosistem terumbu karang. Sebagian penduduk di kawasan pulau-pulau kecil (utamanya di Desa Kojadoi) pada tahun 2000-an ada yang sudah beralih usaha dari nelayan tangkap menjadi nelayan budi daya rumput laut. Sebagian yang lain (di Desa Pemana) beralih pada usaha non-kenelayanan, seperti ke sektor perdagangan, ke sektor jasa angkutan barang dan penumpang. Sementara di daerah penelitian kawasan daratan peralihan kegiatan dari nelayan tangkap ke nelayan budi daya rumput laut belum begitu nampak. Penyebab beralihnya para nelayan dari nelayan tangkap ke nelayan budi daya rumput laut di kawasan pulau-pulau kecil kecuali disebabkan makin menurunnya jumlah hasil tangkapan ikan,

penyebab kedua adalah secara geografis sebagian perairan di daerah tersebut cocok atau potensial untuk usaha budi daya rumput laut. Usaha baru ini dapat memberikan lapangan kerja seluruh anggota rumah tangga, penghasilan relatif stabil tak terpengaruh musim dan sekaligus ikut melestarikan terumbu karang. Meskipun sebagian besar penduduk di kawasan pulau-pulau hanya berpendidikan rendah (tamat SD ke ke bawah), namun banyak penduduk nelayan yang memiliki ketrampilan budi daya rumput laut. Kemudian kondisi tersebut ditunjang oleh akses transportasi yang semakin lancar dan pemasaran yang menjanjikan mengakibatkan usaha budi daya rumput laut semakin berkembang.

Sementara untuk kawasan daratan proporsi penduduk sebagai nelayan tangkap masih paling besar, meskipun tidak dominan. Karena potensi lahan untuk usaha pertanian pangan dan kebun kelapa memungkinkan banyak penduduk yang memiliki usaha pertanian tanaman pangan dan ada sebagian nelayan yang memiliki pekerjaan tambahan di lahan pertanian. Meskipun pendidikan sebagian besar penduduk berpendidikan rendah, namun jenis ketrampilan yang dimiliki penduduk cukup variatif antara lain ketrampilan melaut, membuat minyak goreng, berdagang dan perbengkelan.

Sebagian besar para penduduk nelayan adalah nelayan tradisional dengan armada sederhana (sampan tanpa motor) yang hasil tangkapannya kecil. Bagi nelayan budi daya untuk pengembangannya masih terbentur masalah permodalan untuk biaya produksi dan bibit, terbatasnya modal yang menyebabkan usaha budi daya rumput laut belum maksimal. Kesejahteraan rumah tangga yang ada kaitannya aset rumah tangga dan sanitasi, sebagian besar penduduk daerah penelitian memiliki rumah sendiri, namun sebagian luas lantai bangunannya tidak luas, sebagian besar rumah tinggal dengan dinding tidak permanen. Penerangan rumah sebagian telah menggunakan listrik sebagai penerangan rumah dan sebagian besar belum menggunakan listrik. Di desa pulau-pulau kecil meskipun sudah ada listrik dan merupakan swadaya masyarakat, tapi hanya mampu melayani beberapa (4) jam setiap hari. Sumber air bersih bagi sebagian besar penduduk di dua daerah penelitian masih menjadi

masalah. Penduduk daerah penelitian kebanyakan buang air besar sebarangan dan baru sebagian kecil yang telah menggunakan WC. Sebagian penduduk kawasan daratan memiliki lahan untuk pertanian, sementara hanya sebagian kecil penduduk kawasan pulau-pulau yang memiliki lahan pertanian.

Pendapatan per kapita per bulan penduduk sampel di kawasan pulau-pulau kecil baru mencapai sekitar Rp 181.850, sementara di kawasan daratan mencapai sekitar Rp 246.316. Angka pendapatan per kapita tersebut ternyata masih jauh di bawah kriteria kemiskinan dari Bank Dunia (2 dollar per hari). Rata-rata pendapatan rumah tangga per bulan dari berbagai sumber pendapatan di daerah penelitian kawasan pulau-pulau kecil adalah sekitar Rp 756.503, sedangkan di kawasan daratan telah mencapai Rp 1.115.437. Rata-rata pendapatan rumah tangga dari kegiatan khusus nelayan tangkap di kawasan pulau-pulau kecil hanya mencapai Rp 494.375, karena kegiatan nelayan tangkap hanya sebagai pekerjaan tambahan saja. Sedangkan rata-rata pendapatan khusus dari usaha budi daya rumput laut ternyata lebih tinggi telah mencapai Rp 726.930. Namun rata-rata pendapatan tersebut masih berada di bawah rata-rata pendapatan rumah tangga dari berbagai sumber pendapatan.

Di kawasan daratan, rata-rata pendapatan rumah tangga dari perikanan tangkap masih cukup baik sebesar Rp 727.424 per bulan. Namun usaha perikanan tangkap tersebut ternyata masih lebih rendah dibandingkan dengan perikanan budi daya biota laut (rumpon) yang telah mencapai Rp 1.079.166. Dengan demikian apabila ingin meningkatkan pendapatan rumah tangga pada masyarakat nelayan nampaknya pengembangan usaha budi daya biota laut (rumpon) perlu dikembangkan dan ditingkatkan.

Pendapatan rumah tangga dari budi daya rumput di daerah penelitian kawasan pulau-pulau kecil belum optimal. Belum tingginya pendapatan rumah tangga budi daya rumput laut karena masalah keterbatasan modal untuk biaya produksi. Modal untuk membeli bibit, tali, pelampung, pemberat dan tenaga kerja. Rendahnya pendapatan rumah tangga budi daya rumput laut juga karena jumlah lahan yang diusahakan masih terbatas satu dua lokasi saja. Apabila

jumlah modalnya terpenuhi biaya produksi meningkat, makin banyak lokasi lahan usaha rumput laut, maka frekuensi memanen semakin meningkat dan total pendapatan semakin meningkat. Rumah tangga di daerah penelitian kawasan daratan, meskipun pendapatan lebih tinggi daripada di kawasan pulau-pulau kecil, namun masih belum tinggi dan masih bisa ditingkatkan. Masalah penyebab masih rendahnya pendapatan rumah tangga nelayan, karena terbatasnya kemampuan modal, armada yang dimiliki sebagian besar masih tradisional, daerah tangkapannya terbatas tidak jauh dari pantai, hasil tangkapannya sedikit. Faktor musim juga menjadi kendala banyaknya frekuensi melaut tiap bulan dan lokasi tangkapan.

5.2. Rekomendasi

1. Untuk kelestarian terumbu karang di kawasan pulau-pulau kecil (Kecamatan Maumere), seperti di Desa Kojadoi dan Kojagete terus dikembangkan usaha budi daya rumput laut. Agar para nelayan tidak perlu mengganggu biota di kawasan terumbu karang, bahkan ikut membersihkan sampah-sampah di hamparan terumbu karang, sebab tanaman rumput laut juga harus dijaga dari pencemaran sampah supaya pertumbuhannya baik. Lahan perairan di sekitar pulau di desa-desa tersebut memang secara geografis cocok untuk pengembangan budi daya rumput laut. Perairannya relatif tidak begitu dalam, terletak pada teluk-teluk/ selatan yang agak terlindung dari gelombang laut yang kuat. Sedangkan kemampuan SDM di dua desa tersebut telah memenuhi syarat, banyak warga yang telah memiliki pengalaman/ ketrampilan budi daya rumput laut sejak awal tahun 90-an sebelum terkena bencana tsunami tahun 1992.
2. Untuk mengembangkan usaha budi daya rumput laut bagi rumah tangga nelayan di kawasan pulau-pulau tersebut yang utama adalah permodalan. Penghasilan rumah tangga nelayan budi daya yang masih rendah akhir-akhir ini karena lahan budi daya rumput laut yang diusahakan masih terbatas satu atau dua lokasi saja. Padahal mestinya tiap rumah tangga nelayan perlu

memiliki paling tidak 6 lokasi, agar tiap dua bulan sekali dapat memanen. Sebab dengan lokasi yang banyak dengan waktu tanam yang berbeda, waktu panenpun akan berbeda-beda. Untuk mendapatkan lahan yang lebih banyak perlu modal. Modal tersebut digunakan untuk membeli bibit, tali, pelampung, pemberat, perahu dan bayar tenaga. Selama ini sudah pernah ada pinjaman dari COREMAP tapi belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan usaha budi daya. Dalam hal ini Dinas Kelautan Perikanan, koperasi dan lembaga perbankan daerah yang peduli terhadap masyarakat nelayan perlu terus meningkatkan perannya.

3. Para nelayan di daerah pesisir kawasan daratan (Kecamatan Kewapante) rata-rata pendapatan per bulan belum begitu tinggi. Sebagian besar para nelayan adalah nelayan tradisional yang armada dan alat tangkapnya masih sederhana. Untuk meningkatkan pendapatan para rumah tangga nelayan diperlukan bantuan pinjaman modal, agar para nelayan tersebut mampu membeli armada yang lebih modern (kapal motor) dan alat tangkap yang lebih produktif. Hal tersebut dimaksudkan agar para nelayan tersebut tidak tergantung pada hasil tangkapan di perairan dangkal di terumbu karang, namun mereka mampu menangkap ikan di laut dalam. Dengan demikian jumlah tangkapan dan jenis ikan tangkapannya lebih baik atau yang harganya lebih mahal, seperti ikan tuna, ikan cakalang, ikan layang dsb. Di samping itu, kegiatan melaut mereka tidak terlalu tergantung pada alam. Untuk membantu permodalan para nelayan tersebut perlu digalakkan peran koperasi dan lembaga perbankan setempat.
4. Usaha budi daya ikan di rumpon menghasilkan rata-rata pendapatan yang lebih baik dari pada usaha perikanan tangkap. Oleh karena itu, dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan di kawasan daratan ini dapat digalakkan usaha budi daya ikan di rumpon. Hanya untuk usaha rumpon perlu modal yang cukup besar untuk pembelian bahan dan pembuatan rumpon. Untuk membantu para nelayan dalam

usaha rumpon perlu bantuan permodalan dan pembinaan cara pembuatannya, meskipun ada sebagian kecil nelayan sudah membuat dan mengusahakannya. Karena modalnya cukup besar, maka perlu dipikirkan usaha rumpon secara berkelompok agar pinjaman modal dapat ditanggung bersama.

5. Untuk peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan, diperlukan variasi sumber pendapatan rumah tangga. Usaha-usaha rumah tangga seperti industri rumah tangga pembuatan minyak goreng dari buah kelapa nyiur perlu ditingkatkan mengingat potensi kelapa nyiur di daerah Kecamatan Kewapante cukup banyak. Untuk peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan dengan variasi usaha peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil di daerah perlu berperan memberikan permodalan, penyuluhan dan pelatihan usaha yang sesuai dengan potensi setempat.

DAFTAR PUSTAKA

BAPPEDA Kabupaten Sikka (2004).

Database Kabupaten Sikka, Profil Keluarga di Kabupaten Sikka Berdasarkan Indikator Pangan, Sandang, Papan, Ketahanan Pangan, Kepemilikan Lahan, Pendidikan dan Kesehatan.

BAPPEDA Kabupaten Sikka (2004).

Profil Perekonomian Daerah Kabupaten Sikka, Maumere : Bappeda Kabupaten Sikka.

BPS Kabupaten Sikka (2003).

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sikka Tahun 2003, Maumere : BPS Kabupaten Sikka.

BPS Kabupaten Sikka (2003a)

Penduduk Ksbsubstn Sikka 2003, Maumere : BPS Kab. Sikka.

BPS Kabupaten Sikka (2003b)

Kecamatan Kewapante Dalam Angka 2003, Maumere : BPS Kab. Sikka

COREMAP – AusAID (2003)

Laporan Enam Bulanan NTT Pilot Sub-Proyek

Daliyo dan Suko Bandiyono (2002)

Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia : Studi Kasus Kampung Boni, Distrik Waigeo Utara Kabupaten Sorong, Propinsi Papua, Jakarta : COREMAP LIPI.

Hidayati, Deny dan Laksmi Rachmawati (2002)

Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia : Studi Kasus Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, Jakarta : COREMAP LIPI.

- Jones, Gavin W dan Yulfita Raharjo, (1998).
Penduduk, Lahan Dan Laut Tantangan Pembangunan di Indonesia Timur, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- PMU – COREMAP Kab. Sikka (2005)
'Gambaran Umum Desa Pesisir Binaan COREMAP I dan Calon Binaan COREMAP II di Kabupaten Sikka', dalam Base Line Studi dilakukan PMU –COREMAP Kab. Sikka bekerjasama dengan Konsultan Jasa Patria Nusa Perkasa.
- Suharsono (2005)
www.COREMAP.or.id
- Widayatun dkk (2002)
Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia : Studi Kasus Kampung Meobekwan, Distrik Waigeo Utara Kabupaten Sorong, Propinsi Papua, Jakarta : COREMAP LIPI

LAMPIRAN

Lampiran 1 :

Tabel 1
Perkembangan Garis Kemiskinan di Daerah Perkotaan
Dan Pedesaan di Indonesia, 1976 – 1999

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	
	Perkotaan	Pedesaan
(1)	(2)	(3)
1976	4.522	2.849
1980	6.831	4.449
1984	13.731	7.746
1990	20.614	13.295
1996	42.220	31.141
1999	89.845	69.420

Sumber : BPS, 2001 diambil dari Irdam Ahmad dan Ilyas Saad (ed) Kajian Implementasi Kebijakan Trilogi Pembangunan Di Indoensia, Jakarta : STEKPI

Lampiran 2 :

Konsep Dan Definisi

Bekerja adalah seseorang yang dalam satu minggu terakhir melakukan pekerjaan/kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa, atau membantu menghasilkan barang atau jasa dengan maksud untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan atau balas jasa berupa uang atau barang. Termasuk dalam kategori bekerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan tetapi sedang tidak bekerja, seperti, sakit dan cuti.

Menganggur adalah mereka yang tidak bekerja dan juga tidak mencari kerja

Mencari pekerjaan adalah mereka yang selama satu minggu yang lalu berusaha mencari pekerjaan, sedangkan usaha untuk mendapatkan pekerjaan misalnya dapat dilakukan dengan cara: mendatangi majikan untuk mendapatkan pekerjaan, mendatangi kantor pabrik, dsb.

Sekolah adalah mereka yang selama satu minggu yang lalu mempunyai kegiatan sekolah/kuliah. Anak sekolah yang selama seminggu yang lalu sedang libur dan tidak melakukan kegiatan atau lainnya dimasukkan ke dalam kategori sekolah.

Mengurus rumah tangga adalah mereka yang satu minggu terakhir mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga.

Pekerjaan Utama yang biasanya dilakukan selama satu minggu terakhir adalah pekerjaan yang menurut pengakuan responden paling banyak menyita waktu selama satu minggu terakhir, misalnya: nelayan pancing dengan kapal sendiri, nelayan bagan/bubu/keramba milik sendiri, nelayan bagan yang bekerja pada orang lain, nelayan yang bekerja dengan cara bagi hasil (sebagai pemilik atau sebagai pembawa kapal), pegawai negeri di kantor kecamatan, staf

administrasi di kantor desa, perawat Puskesmas, pedagang makanan keliling, pedagang ikan di pasar, pemilik warung sembako. Informasi mengenai pekerjaan utama tersebut dapat dirinci berdasarkan:

- a. Jenis pekerjaan yang dilakukan misalnya nelayan punggawa, nelayan keluarga, petambak, petani, buruh tani
- b. Status pekerjaan yang dilakukan (bekerja sendiri, membantu keluarga-pekerja tak dibayar, memperkerjakan orang lain, karyawan, PNS dsbnya)
- c. Lapangan kerja adalah sektor dimana ia bekerja (pertanian, industri, jasa)

Pekerjaan tambahan yang biasanya dilakukan selama satu minggu terakhir adalah pekerjaan tambahan diluar pekerjaan utama. Pekerjaan tambahan tersebut diuraikan seperti pada pekerjaan utama

Pendapatan rumah tangga (pendapatan bersih rumah tangga) dalam satu bulan terakhir adalah pendapatan setelah dikurangi biaya produksi yang diterima oleh rumah tangga dalam satu bulan terakhir. Pendapatan rumah tangga mencakup penghasilan dari pekerjaan pokok dan pekerjaan tambahan. Pendapatan keluarga tersebut dikelompokan dalam 5 kategori yaitu :

- a. **Pendapatan dari kegiatan usaha perikanan tangkap di laut**, dihitung dari pendapatan bersih yang diterima oleh nelayan setiap kali melaut. Pendapatan bersih ini merupakan penjualan hasil tangkapan dikurangi biaya produksi untuk melaut yang umumnya meliputi biaya BBM, ransum dan rokok. Pendapatan bersih sekali melaut ini kemudian dikonversikan ke dalam pendapatan satu bulan dengan mengalikan pendapatan bersih dengan jumlah melaut dalam satu bulan. Pendapatan dari kegiatan usaha perikanan laut ini dibagi ke dalam 3 musim yaitu :
 - (i) Musim banyak ikan atau musim panen di daerah yang bersangkutan.
 - (ii) Musim pancaroba adalah musim peralihan antara musim banyak ikan dan tidak banyak ikan dan

sebaliknya dari musim kurang ikan ke musim banyak ikan.

- (iii) Musim kurang/sulit ikan (musim paceklik) di daerah yang bersangkutan.

Pendapatan sebulan dari kegiatan perikanan tangkap merupakan penjumlahan dari pendapatan rata-rata per bulan per musim dibagi dengan banyaknya musim, dengan rumus :

$$I_p = \frac{(I_1 \times n_1) + (I_2 \times n_2) + (I_3 \times n_3)}{12}$$

Di mana :

I_p adalah pendapatan sebulan dari perikanan tangkap;

I_1 adalah pendapatan rata-rata per bulan per musim ke-1;

I_2 adalah pendapatan rata-rata per bulan per musim ke-2;

I_3 adalah pendapatan rata-rata per bulan per musim ke-3;

n_1 adalah banyaknya musim bulan 1 (gelombang kuat)

n_2 adalah banyaknya musim bulan 2 (masa pancaroba)

n_3 adalah banyaknya musim bulan 2 (gelombang lemah)

- b. Pendapatan dari budi daya perikanan adalah pendapatan bersih yang diterima oleh seseorang yang mengusahakan budi daya biota laut/hasil laut seperti tambak bandeng, udang, pembesaran ikan kerapu, tanaman rumput laut dll. Pendapatan bersih per sekali panen dihitung dari harga penjualan produksi biota/hasil laut yang dibudi dayakan (tambak bandeng, udang, pembesaran kerapu dan rumput laut) dikurangi dengan biaya produksi seperti benih, pakan dan ongkos tenaga kerja. Pendapatan sebulan dari budi daya perikanan dihitung dari penjumlahan pendapatan bersih yang diterima setiap panen dibagi dengan banyaknya panen dalam satu tahun terakhir, maka formulanya adalah :

$$I_b = \frac{P_1 + P_2 + \dots + P_n}{n}$$

Di mana :

I_b adalah pendapatan sebulan dari budi daya perikanan

P_1 adalah pendapatan bersih dari panen ke-1

P_2 adalah pendapatan bersih dari panen ke-2

P_n adalah pendapatan bersih dari panen ke-n

n adalah banyaknya panen dalam satu tahun terakhir

- c. **Pendapatan dari usaha pertanian di luar perikanan** adalah pendapatan bersih yang diterima oleh seseorang yang mengusahakan tanaman padi, palawija, kelapa, dll. Pendapatan bersih per sekali panen dihitung dari harga penjualan produksi (padi, palawija, kelapa dll) dikurangi dengan biaya produksi seperti benih, pupuk, obat-obatan dan upah tenaga kerja. Produksi yang ditanyakan pada bagian ini adalah produksi yang dijual. Pendapatan sebulan dari usaha pertanian di luar perikanan merupakan perkalian dari pendapatan bersih rata-rata yang diterima setiap panen dengan banyaknya panen dalam satu tahun terakhir terakhir yang kemudian dibagi dengan 12.

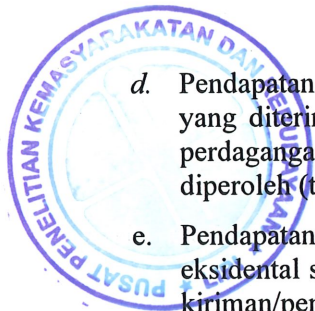
$$I_t = \frac{P \times j}{12}$$

Di mana :

I_t adalah pendapatan sebulan dari usaha pertanian

P adalah pendapatan rata-rata setiap panen

j adalah banyak panen dalam satu tahun terakhir



- d. Pendapatan dari usaha perdagangan adalah pendapatan bersih yang diterima oleh seseorang yang berusaha di bidang jasa perdagangan. Pendapatan bersih merupakan keuntungan yang diperoleh (tidak termasuk modal).
- e. Pendapatan lainnya yang diterima baik secara rutin maupun eksidental setiap bulan seperti PNS/Guru, ABK yang diupah, kiriman/pemberian orang tua/saudara, dll.

Pendapatan rata-rata rumah tangga per bulan merupakan penjumlahan pendapatan dari seluruh anggota rumah tangga yang bekerja di berbagai sektor: perikanan tangkap, budi daya, perdagangan, pertanian dan pendapatan lainnya.

Pendapatan per-kapita per bulan dihitung dari jumlah pendapatan rumah tangga dibagi dengan seluruh jumlah anggota rumah tangga.